

2003

A

1713

ACEH

WAWASAN NASIONAL DAN TEROBOSAN PEMBANGUNAN

Alfian
A. Hasjmy
Saleh Afiff
Syamaun Gaharu
Dayan Dawood
Wardoyo
Ibrahim Hasan
H.M. Amin Aziz
Barlian AW

BIBLIOTHEEK KITLV



0270 4367

246 538 856

ACEH

WAWABAN NASIONAL DAN TEROBOSAN PEMBANGUNAN



Affian

A. Hasjmy

Salih Afri

Syamsun Gaharu

Dayan Dawood

Wardoyo

Ibrahim Harza

H.M. Amin Asir

Redlan AW

ACEH

WAWASAN NASIONAL DAN TEROBOSAN PEMBANGUNAN



Alfian
A. Hasjmy
Saleh Afiff
Syamaun Gaharu
Dayan Dawood
Wardoyo
Ibrahim Hasan
H.M. Amin Aziz
Barlian AW

KATA PENGANTAR

Buku ini diterbitkan dalam rangka menyambut pelantikan **Prof. Dr. Ibrahim Hasan, MBA** sebagai Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, priode 1991-1996.

Aceh, selama kepemimpinannya telah banyak membawa perubahan dan kemajuan di berbagai bidang. Tentu saja upaya itu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak kepadanya.

Buku yang diterbitkan ini merupakan kumpulan makalah para pakar, baik di pusat dan di daerah. Mereka menyoroti Aceh dari berbagai aspek. Dan sekaligus menjawab semua persoalan yang menyangkut daerah ini, khususnya dalam konteks Wawasan Nasional dan terobosan dan pembangunan.

Di dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, tentulah Wawasan Nusantara (nasional) sudah harus menjadi landasan dan latar belakang pemikiran dan konsepsi. Wawasan Nusantara adalah tolok ukur yang harus dinalarkan dalam pendekatan yang integral dan komprehensif.

Wawasan Nusantara adalah sendi, bahkan tolok ukur dalam pengembangan seluruh daya yang terdapat sebagai potensi bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Wawasan Nasional adalah karakter bangsa dan negara kita yang harus dijabarnalarkan di dalam berbagai konsep pembangunan yang makin mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembangunan Nasional pada hakikatnya adalah wujud konkret dari proses interdepedensi dan interalasi pembangunan regional dan daerah dalam kerangka Wawasan Nasional. Maka salah satu jawaban dari strategi pembangunan, seperti juga yang tersirat dalam GBHN, adalah prinsip untuk memecahkan berbagai problematik yang dihadapi oleh daerah-daerah dalam sistem keterkaitan ekonomi secara regional.

Ini bermakna, bahwa kepastian maupun integritas pembangunan nasional akan tertumpu pada mekanisme kontribusi timbal balik antara kepentingan nasional dan daerah secara seimbang, baik menyangkut pada aspek informasi, strategi,

perencanaan sumber daya dan berbagai variable potensial lainnya.

Berkait dengan pola pikir seperti di atas, maka yang sangat menentukan pula dalam pola pembangunan nasional kita adalah faktor peran serta dan dampak pembangunan itu sendiri kepada masyarakat yang di dalam ungkapan lazim kita nyatakan bahwa "Rakyat atau Masyarakat adalah subjek dan sekaligus objek pembangunan itu".

Sebagai bagian dari wilayah tanah air, Daerah Istimewa Aceh merupakan suatu propinsi yang agak terlambat melaksanakan pembangunan dibandingkan dengan beberapa propinsi lainnya di Indonesia.

Keterlambatannya, yang oleh para pengamat disebut sebagai konsekwensi berbagai proses dinamis sejarah masa lampau, kiranya telah melahirkan semacam siklus nilai dalam masyarakat Aceh dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah sistem nilai tradisional yang bersumber dari perkembangan sejarah yang gemilang. Sementara dimensi lainnya adalah bentukan nilai baru dalam masyarakat yang sarat dengan harapan masa depan.

Kiranya kita memahami, bahwa sistem nilai masyarakat dan kebangsaan kita juga bersumber dari proses dan perkembangan sejarah.

Dalam hubungan dengan Aceh, maka iapun tidak dapat melepaskan diri dari pandangan Wawasan Nusantara. Ia adalah bahagian dari Indonesia, yang telah menyumbangkan kebanggaan tersendiri. Sebagai daerah Nusantara ia adalah bagian yang paling sedikit mengalami masa penjajahan, karena baru dapat dipasifikasi penjajah Belanda pada awal abad kedua puluh. Dari segi sejarah, daerah Aceh telah pula menampilkan heroisme dan kegigihan perlawanan terhadap penjajah.

Dalam konteks inilah, di dalam dekade pembangunan nasional sekarang ini Aceh harus dapat berperan, membuka dirinya sebagai bahagian dari Indonesia yang besar dan berjuang mengejar ketertinggalannya, dalam satu Wawasan Nusantara yang membangun untuk mensejahterakan rakyat. Sebaliknya bagi daerah di luar Aceh, diharapkan pula agar tulisan dalam buku ini dapat memberi manfaat dan

menumbuhkan motivasi dalam kerangka meningkatkan kesadaran masyarakat daerah akan manfaat pembangunan, baik dalam arti meningkatkan hasil pemerataannya, yang bersumber pada hikmah Wawasan Nusantara sebagai buah persatuan dan kesatuan bangsa kita.

Ide terbitnya buku ini berasal dari Teuku Rusli (Cek Li) dan Sdr. Safwan Martova, Zainuddin Hamid, Abdullah Zakaria, Nur Husein, Hanafiah Sati, Ramzie Tharfie, Djamal Muhammad, Razali, Lukman CM, dan Jhonny Yoesoef.

Selain itu terima kasih kami tujukan kepada Sdr. Barlian AW, Erwiyen Syafri, Mustafa A. Gelanggang dan Dinar Nyak Idin yang telah banyak membantu dalam proses penyuntingan. Perkenankanlah kami sekali lagi dengan rela, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya sehingga memungkinkan buku ini terbit pada waktunya. Terima kasih.

Syarief Harris, editor

Banda Aceh, 27 Agustus 1991

menumbuhkannya motivasi dalam kegiatan pembelajaran ini
adalah masyarakat daerah akan memiliki pengetahuan lebih
dalam arti meningkatkan hasil belajarnya yang berorientasi
pada kehidupan masyarakat setempat baik pribadi dan
keseluruhan bangsa kita.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam proses belajar
adalah motivasi. Menurut Maslow (1954) motivasi adalah
keadaan yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu
yang dianggap penting atau bermakna. Menurut Maslow (1954),
motivasi adalah keadaan yang mendorong individu untuk
melakukan sesuatu yang dianggap penting atau bermakna.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam proses belajar
adalah motivasi. Menurut Maslow (1954) motivasi adalah
keadaan yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu
yang dianggap penting atau bermakna. Menurut Maslow (1954),
motivasi adalah keadaan yang mendorong individu untuk
melakukan sesuatu yang dianggap penting atau bermakna.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam proses belajar
adalah motivasi. Menurut Maslow (1954) motivasi adalah
keadaan yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu
yang dianggap penting atau bermakna. Menurut Maslow (1954),
motivasi adalah keadaan yang mendorong individu untuk
melakukan sesuatu yang dianggap penting atau bermakna.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam proses belajar
adalah motivasi. Menurut Maslow (1954) motivasi adalah
keadaan yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu
yang dianggap penting atau bermakna. Menurut Maslow (1954),
motivasi adalah keadaan yang mendorong individu untuk
melakukan sesuatu yang dianggap penting atau bermakna.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam proses belajar
adalah motivasi. Menurut Maslow (1954) motivasi adalah
keadaan yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu
yang dianggap penting atau bermakna. Menurut Maslow (1954),
motivasi adalah keadaan yang mendorong individu untuk
melakukan sesuatu yang dianggap penting atau bermakna.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam proses belajar
adalah motivasi. Menurut Maslow (1954) motivasi adalah
keadaan yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu
yang dianggap penting atau bermakna. Menurut Maslow (1954),
motivasi adalah keadaan yang mendorong individu untuk
melakukan sesuatu yang dianggap penting atau bermakna.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam proses belajar
adalah motivasi. Menurut Maslow (1954) motivasi adalah
keadaan yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu
yang dianggap penting atau bermakna. Menurut Maslow (1954),
motivasi adalah keadaan yang mendorong individu untuk
melakukan sesuatu yang dianggap penting atau bermakna.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam proses belajar
adalah motivasi. Menurut Maslow (1954) motivasi adalah
keadaan yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu
yang dianggap penting atau bermakna. Menurut Maslow (1954),
motivasi adalah keadaan yang mendorong individu untuk
melakukan sesuatu yang dianggap penting atau bermakna.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam proses belajar
adalah motivasi. Menurut Maslow (1954) motivasi adalah
keadaan yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu
yang dianggap penting atau bermakna. Menurut Maslow (1954),
motivasi adalah keadaan yang mendorong individu untuk
melakukan sesuatu yang dianggap penting atau bermakna.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	IX
ARUS NILAI BARU MASYARAKAT ACEH DALAM KONSEP PEMBANGUNAN BERWAWASAN NUSAN- TARA	
Oleh : Dr. Alfian.	11
BENARKAH ACEH ANGKER DAN TERTUTUP	
Oleh : Prof. A. Hasjmy	33
PEMBANGUNAN DAERAH DAN KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL	
Oleh : Prof. Dr. Saleh Afiff	51
MEMBANGUN MASUSIA INDONESIA YANG UTUH DAN INTEGRALISTIK	
Oleh : Brigjen TNI (Purn) H. Sjamaun Gaharu	61
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI DAERAH ISTIMEWA ACEH	
Oleh : Dr. Dayan Dawood, MA	69
MENUJU PERTANIAN YANG TANGGUH	
Oleh : Ir. Wardoyo	95
PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN INDUSTRI	
Oleh : Ibrahim Hasan	107

KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Oleh Ir. H. M. Amin Aziz 155

IBRAHIM HASAN : TALAM DI TENGAH SEBUAH JAMUAN

Oleh : Barlian AW 185

**ARUS NILAI BARU
MASYARAKAT ACEH DALAM
KONSEP PEMBANGUNAN
BERWAWASAN NUSANTARA**

O

L

E

H

DR. ALFIAN

ARUS NILAI BARU MASYARAKAT ACEH DALAM KONSEP PEMBANGUNAN BERWAWASAN NUSANTARA

Alfian

I

Setelah pembangunan fisik digalakkan sejak awal Orde Baru, banyak terjadi perubahan perilaku sosial politik masyarakat Aceh. Selanjutnya dikemukakan bahwa karena terjadinya "perubahan atau adanya pergeseran nilai itu, ternyata telah menumbuhkan arus nilai baru yang lebih berorientasi pada konsep Wawasan Nusantara. Gejala ini perlu dibahas untuk memahami kondisi sosial yang objektif dalam mensukseskan program pembangunan Pelita V". Dari situ tersimpul salah satu pokok permasalahan yang ingin dikupas.

Kalau tidak salah konsep pembangunan berwawasan nusantara mengandung makna bahwa pembangunan nasional dalam berbagai bidang merupakan kesatuan bagi seluruh wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan mengandung berbagai ciri kemajemukan.

Pembangunan itu bersifat menyeluruh dan merata kesemua daerah yang beraneka ragam itu sehingga dengan demikian semua rakyat dapat bersama-sama berpartisipasi didalam pelaksanaannya dan bersama-sama pula menikmati hasil-hasilnya. Demikianlah konsep pembangunan berwawasan nusantara ini menghendaki kesadaran bangsa kita yang majemuk ini tersebar diribuan pulau untuk memiliki orientasi yang sama dalam pembangunan nasional diberbagai bidang ekonomi, politik, sosial - budaya dan hankam.

Memang bahwa masing-masing daerah memiliki ciri-cirinya yang khas, seperti sejarah, latar belakang sosial - budaya, agama dan letak geografis merupakan kenyataan yang tak dapat dipungkiri, bahwa merupakan khasanah kekayaan bangsa.

Tetapi dalam kebhinekaan kita itu kita menyatu melalui wawasan nasional yang sama, yaitu wawasan nusantara.

Keanekaragaman bangsa kita merupakan warna-warni dalam pelangi kebersatuan dan kebersamaan kita. Itulah barangkali makna yang terkandung dalam lambang negara kita: "Bhinneka Tunggal Ika".

Ditinjau dari sisi posisi Aceh, sebagaimana halnya dengan daerah-daerah Indonesia lainnya, dalam pembangunan berwawasan nusantara barangkali dapat disimpulkan sebagai berikut:

"Bagaimana Aceh dalam proses pembangunan nasional menyatukan dirinya dengan Indonesia, dan pada waktu yang sama bagaimana pula Aceh sebagai bagian integral dari Indonesia dapat ikut serta mewarnai proses pembangunan nasional tersebut secara bermakna".

Dari segi nilai, pembangunan nasional berwawasan nusantara itu disatu pihak menghendaki agar masyarakat Aceh memahami, menghayati dan membudayakan nilai-nilai yang terkandung dalam paradigma bersama bangsa Indonesia yang bersumber pada ideologi dan konstitusi bersama, yaitu Pancasila dan UUD'45. Di pihak lain ia juga menghendaki agar masyarakat Aceh mengembangkan nilai-nilai mereka yang berguna dan relevan untuk memperkuat dan memperkaya nilai-nilai yang terkandung dalam padigma bersama bangsa kita itu. Melalui proses itu masyarakat Aceh meng-Indonesia melalui pembudayaan nilai-nilai bersama bangsa (nasional) kita, dan waktu yang sama sekaligus meng-Indonesiakan nilai-nilai mereka yang berguna dan relevan bagi kehidupan bersama bangsa kita. Proses itu sebenarnya sudah lama berlangsung, tetapi kadang-kadang ia tampak berhenti dan terputus. Dalam Era Orde Baru ini untuk kesekian kalinya ia hidup dan bergerak lagi, dan dari tahun ketahun dinamika proses itu tampak semakin tinggi dan kentara.

Barangkali setelah mengamati dengan seksama proses yang masih terus berlangsung sekarang ini Panitia Seminar ini, dan mungkin juga kita semua yang hadir disini, sampai kepada kesimpulan bahwa apa yang kita amati itu sesungguhnya merupakan arus nilai baru yang sedang berkembang dan meluas dalam masyarakat Aceh. Seandainya arus nilai baru itu memang mengandung ciri-ciri yang diungkapkan diatas, maka arus nilai baru itu bukan saja merupakan sesuatu hal sehat bagi pembangunan Aceh sebagai bagian integral dari tanah air kita tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dengan konsep

pembangunan nasional yang berwawasan nusantara yang sedang kita kembangkan dewasa ini.

Soalnya sekarang bukan hanya menjaga agar proses arus nilai baru itu tidak berhenti dan terputus, tapi juga mengupayakan agar dapat terus berkembang dan membudaya dalam masyarakat Aceh. Hal ini tentunya sebahagian besar tergantung pada masyarakat Aceh sendiri, terutama para pemimpin strategis mereka. Tetapi tidak kalah pentingnya ia juga sebagian tergantung pada persepsi, sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia yang bukan orang Aceh terhadap masyarakat Aceh. terutama mereka yang berwewenang dalam menentukan kebijaksanaan nasional dalam, berbagai bidang kehidupan bangsa kita. Sebelum itu kita terlebih dahulu perlu mengetahui secara lebih jelas dan terinci tentang ciri-ciri yang terkandung dalam arus nilai baru itu dan posisi yang sesungguhnya dalam masyarakat Aceh. Faktor-faktor apa mungkin mendukung proses pengembangan serta pembudayaannya dan faktor-faktor apa pula yang mungkin menghalangi atau merusak proses tersebut? Lalu apa implikasinya bagi pembangunan Aceh sebagai bagian integral dari pembangunan nasional kita?

II

Berbicara tentang nilai dan pembangunan di Aceh, kita barangkali dapat membandingkannya dengan Bali dan Sumatera Barat (Minang Kabau). Sebagaimana di Aceh di Bali dan Minang Kabau agama dan adat adakah menyatu, bersenyawa, atau dua hal yang sudah senafas dan karena itu tidak dapat dipisah-pisahkan. Agama dan adat bagi orang Aceh adalah bagaikan zat dan sifat, sebagaimana halnya juga bagi orang Bali yang Hindu dan orang Minangkabau yang Islam. Tetapi mengapa prestasi mereka dalam pembangunan tampak berbeda?.

Masyarakat Bali tampak berhasil melakukan apa yang disebut "kreatif respons" (creative respons) terhadap pengembangan turisme di daerahnya antara lain dengan jalan mengembangkan seni lukisnya, seni tarinya, seni patung dan seni ukirnya, serta dunia usahanya dibidang-bidang lain. Sumatera Barat yang boleh dikatakan miskin dalam kekayaan alam dan jauh tertinggal dari Bali dalam segi turisme, tetapi masyarakatnya juga kelihatan berhasil melakukan "kreatif

respons" dalam zaman pembangunan sekarang ini. Aceh dengan zona industrinya semenjak pertengahan 1970-an kelihatannya relatif belum begitu berhasil dibandingkan dengan Bali dan Sumatera Barat dalam melakukan "kreatif respons" yang dimaksud.

Mengapa? Itulah salah satu pertanyaan pokok yang kami ajukan kepada sejumlah pemimpin strategis Aceh, baik yang formal maupun yang informal, sewaktu kami melakukan serangkaian diskusi dengan mereka di Aceh dan Medan bulan Juli yang lalu.

Kalau pertanyaan itu dikaitkan dengan arus nilai baru masyarakat Aceh, seyogyanya arus nilai baru itu mendorong berkembangnya "kreatif respons" yang dimaksud. Tetapi mengapa dalam kenyataannya "kreatif respons" tersebut kelihatan masih belum begitu berkembang?. Apakah karena arus nilai baru itu masih terbatas pada sekelompok kecil, katakanlah sejumlah elit strategis, sedangkan pada sebagian terbesar anggota masyarakat ia belum berhasil mengakar? Ataukah karena sebab-sebab lain?

Dari jawaban terhadap pertanyaan di atas dan serangkaian pertanyaan lain, maka permasalahan arus nilai baru masyarakat Aceh dalam kaitannya dengan pembangunan dapat dibagi kedalam tiga kelompok problematik berikut:

1. Problematik sejarah, latar belakang sosial - budaya dan pengalaman masyarakat Aceh selama ini.
2. Problematik internal masyarakat Aceh dewasa ini.
3. Problematik eksternal yang dirasakan oleh masyarakat sekarang ini.

III

Dari serangkaian diskusi dengan sejumlah pemimpin strategis Aceh bulan Juli 1988 yang lalu, sebagian besar dari mereka menekankan pentingnya makna sejarah, latarbelakang sosial-budaya dan pengalaman masyarakat Aceh untuk memahami diri mereka yang sesungguhnya. Sebagaimana diketahui masyarakat Aceh dulu pernah jaya sebagai sebuah kerajaan yang makmur dan memiliki hubungan perdagangan dan diplomatik yang luas dengan dunia luar. Bahkan pada masa jayanya itu Aceh merupakan pusat penyebaran agama Islam

kebeberapa tempat di Indonesia dan Asia Tenggara (Malaysia, Thailand dan Philipina) Katanya empat dari wali songo yang sembilan, yaitu Sunan Ampel dan dua putranya serta Sunan Gunung Jati, berasal dari atau berdarah Aceh. Dalam masa jayanya itu jelas kelihatan betapa kreatifnya respons masyarakat Aceh terhadap dunia disekelilingnya dan dalam membangun dirinya.

Masa jaya yang gemilang itu dirusak Belanda yang datang memerangi dan mendudukinya. Apa yang disebut perang Aceh itu sesungguhnya adalah perang Belanda di Aceh yang dianggap oleh sebagian ahli sebagai perang terbesar yang pernah dilakukan Belanda, anatra lain karena banyaknya biaya dan korban di kedua belah pihak, terutama dipihak Aceh yang 4% dari penduduknya gugur dalam peperangan itu. Meskipun Aceh akhirnya kalah dan diduduki Belanda, tetapi rakyat Aceh tidak pernah merasa takluk. Hal itu terbukti dari kerusuhan berdarah, walaupun dalam skala kecil- kecil yang mereka teruskan selama pendudukan Belanda sampai kedatangan Jepang dalam tahun 1942. Perlawanan melawan Belanda yang gigih dan berkepanjangan itu bukan saja telah menghasilkan sejumlah pahlawan nasioanl kita, tetapi juga telah mendapatkan pengakuan internasional tentang heroisme yang luar bisa dari bangsa kita yang berasal dari daerah ini. Heroisme yang patut sekali kita banggakan dan sebarluaskan menjadi nilai bangsa kita semuanya.

Adalah nilai-nilai atau ajaran-ajaran agama Islam yang berhasil ditanamkan dihati sanubari rakyat Aceh yang berperan amat penting dalam membudayakan heroisme yang luar biasa itu. Semenjak itu peranan agama dengan ulamanya menjadi makin dan sangat penting bagi masyarakat Aceh. Agama dan adat menyatu sebagai paradigma bersama mereka. Tetapi, kenyataan yang tak dapat dihindari ialah aceh hancur dan lumpuh, masyarakatnya sangat menderita, terbelakang dan ketinggalan jauh dari sejumlah daerah lainnya di nusantara ini.

Proklamasi membawa angin segar baru terhadap Aceh yang serta merta mendukungnya dengan gigih. Sebagai daerah yang tak diduduki Belanda kembali Aceh menjadi daerah modal bagi Republik Indonesia yang baru berdiri. Kesungguhan rakyat Aceh dalam membantu revolusi kemerdekaan antara lain mereka buktikan dengan menyumbangkan harta kekayaan

mereka seperti untuk membeli pesawat terbang yang amat dibutuhkan pada waktu itu. Apa yang dilakukan rakyat Aceh itu barangkali dapat pula dikatakan sebagai "kreatif respons" dalam membela perjuangan kemerdekaan bangsa kita.

Tetapi peranan penting Aceh dalam revolusi kemerdekaan itu kemudian dikaburkan atau dirusak oleh meletusnya pemberontakan Darul Islam (DI/TII) di sana dalam tahun 1953.

Pemberontakan menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin dalam bukunya tentang peristiwa tragis itu sesungguhnya disebabkan oleh rasa kedaerahan orang Aceh yang masih kental pada waktu itu amat tersinggung oleh kebijaksanaan pemerintah pusat yang melebur daerah nerekanya ke dalam propinsi Sumatera Utara.

Mengetahui kefanatikan rakyat Aceh terhadap Islam, para tokoh pemberontak memakai agama ini sebagai simbol perjuangannya. Karena agama dan adat memang sudah menyatu dalam masyarakat Aceh, maka rasa kedaerahan dan agama bagi mereka sudah saling berjalin pula. Bagaimanapun juga pemberontakan itu telah membawa citra yang kurang baik bagi Aceh dalam persepsi banyak kalangan di tanah air kita. Aceh secara fisik dan mental menjadi semakin terisolasi, dan bagi orang luar menjadi semacam wilayah yang relatif tertutup dan angker.

Setelah pemberontakan DI/TII itu berhasil diselesaikan dalam tahun 1962, masyarakat Aceh untuk jangka waktu yang panjang tampak secara psikologis memikul beban mental yang berat. Disamping itu, Aceh dalam berbagai bidang seperti ekonomi dan pendidikan, sudah semakin jauh tertinggal dibandingkan dengan sejumlah daerah lain. Sungguhpun begitu, pemuka-pemuka Aceh segera melakukan respons yang kreatif dengan pemerintah pusat, antara lain dengan mendirikan kampus Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar-Raniry di Darussalam. Daud Beureuh yang dulu pemimpin pemberontakan, setelah turun dari pegunungan menyibukkan diri membangun pertanian di kampung halamannya, merangsang rakyat sekitarnya untuk berbuat yang sama antara lain karena itu tokoh ini tampak berhasil mempertahankan reputasi dan pengaruhnya.

Setelah Orde Baru lahir Aceh kembali memperlihatkan responsnya yang kreatif melalui pembentukan mejelis ulama dan

Aceh Development Board (ADB). Yang pertama ikut berperan menjadi salah satu model dari majelis ulama Indonesia yang kita kenal sekarang, dan yang kedua menjadi model dari BAPPEDA yang sekarang ini. Bahkan Profesor A. Majid Ibrahim yang menjadi arsitek ADB kemudian ditarik ke Jakarta untuk menjadi Deputy ketua Bapennas bidang Pembangunan Regional yang kemudian ikut melahirkan BAPPEDA-BAPPEDA di seluruh Indonesia.

Demikianlah pada tahun-tahun permulaan Orde Baru Aceh berhasil mengembangkan respons yang kreatif terhadap pembangunan, terutama dalam konsep dan lembaga seperti mejelis ulama dan Aceh Development Board yang telah dikemukakan di atas. Salah satu yang berperan penting dalam hal ini adalah terjalinnya kerjasama yang erat dan intim antara ABRI, PEMDA, cendekiawan/ilmuwan di Kampus Darussalam, sejumlah ulama dan pengusaha. Yang paling menonjol adalah kerjasama antara PEMDA dan cendekiawan/ilmuwan. Yang terakhir ini umumnya merupakan generasi baru. Di kalangan cendekiawan/ilmuwan ini, meskipun mereka berasal dari latarbelakang sosial yang berbeda, bahkan di masa lampau ada dari golongan yang bersaing/bertentangan (ulcebalang dan ulama). Lahir dan berkembang suatu kerjasama yang sehat dan baik di bawah pimpinan Prof. A. Majid Ibrahim.

Semenjak itu orientasi kepada pembangunan sangat kuat, keinginan untuk menyatu dengan dan menjadi bagian integral dari Indonesia sangat besar. Aceh membuka dirinya. Pusat latihan ilmu-ilmu Sosial yang pertama didirikan di sana pada tahun 1974. Banyak tenaga pengajar yang dikirim di Universitas yang dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan study. Penemuan sumber gas alam yang besar di Aceh Utara melahirkan zona Industri baru yang katanya terbesar di Asia Tenggara yang terletak di sekitar Lhokseumawe. Pembangunan zona Industri yang raksasa itu pada mulanya memang tampak mengejutkan masyarakat Aceh, antara lain karena derasnyanya arus moderniasi dari luar, baik yang positif maupun yang negatif, yang dibawanya. Kini masyarakat Aceh tampak sudah berangsur-angsur dapat menyesuaikan diri dengannya.

Kini Kampus Darussalam, baik Universitas Syiah Kuala maupun IAIN Ar-Raniry, telah memiliki sejumlah Doktor dan Profesor, terutama di Fakultas Ekonomi Universitas Syiah

Kuala. Proses peningkatan kualitas akademis masih terus berlangsung seperti terlihat dari mereka yang kini meneruskan study diberbagai tempat, termasuk di luar negeri.

Hubungan Pemda dengan cendekiawan/ilmuwan kampus masih terpelihara dengan baik. Gubernur yang sekarang adalah mantan Rektor Universitas Syiah Kuala, sedangkan Ketua Bappeda, Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud, adalah pula dari kampus yang sama.

IV

Dari pengalaman sejarah masa lampau Aceh serta latarbelakang sosial-budaya masyarakatnya ada beberapa hal yang dapat kita garis bawahi. Pertama, masyarakat Aceh memiliki dinamika yang tinggi untuk melakukan respons yang kreatif dalam membangun dirinya. Mereka memiliki harga diri yang tinggi serta kemauan yang kuat untuk mengaktualisasikan dirinya. Hal itu berkaitan erat dengan nilai-nilai agama dan adatnya yang sudah menyatu. Bersumber dari situ masyarakat Aceh berhasil membudayakan nilai heroisme yang luar biasa melalui fanatisme agama yang tinggi seperti terlihat dalam peperangan mereka melawan Belanda. Tetapi fanatisme agama itu pula yang berjaln dengan rasa kedaerahan yang kental yang berhasil dipakai tokoh-tokoh DI/TII mengajak rakyatnya memberontak melawan pemerintah republik. Dari sini dapat kita lihat bahwa bilamana fanatisme agama berjaln dengan fanatisme kedaerahan yang kental maka ia dapat bermuara pada fanatisme sempit yang mengurung dan mengisolasi masyarakat Aceh secara fisik dan mental dari bagian lain dari Nusantara ini.

Sungguhpun begitu, dinamikanya yang tinggi, harga dirinya yang hebat, kemauan untuk mengaktualisasikan diri yang kuat, serta heroisme yang luarbiasa, yang semuanya bersumber pada agama dan adatnya, mencerminkan nilai-nilai baik masyarakat Aceh yang kalau berhasil diarahkan dengan tepat dapat berperan besar sekali dalam mempercepat proses pembangunan sekarang ini. Tetapi, sebagaimana telah terungkap diatas, nilai-nilai itu dapat pula dipakai untuk melakukan hal-hal yang merusak dan tak diinginkan.

Setelah pemberontakan DI/TII berhasil diselesaikan terjadi transformasi kepemimpinan yang makin kentara terutama setelah Orde Baru lahir. Kerja sama yang intim antara ABRI, PEMDA dan teknokrat (cendekiawan/ilmuwan) merupakan inti dari kepemimpinan baru dari daerah ini. Merekalah yang memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut arus nilai baru dalam masyarakat Aceh.

Salah satu dimensi dari arus nilai baru tersebut tercermin dari keinginan yang kuat dari kaum elite strategis baru ini untuk mendobrak keterisolasian Aceh secara fisik dan mental, sehingga dengan demikian Aceh betul-betul menjadi bagian integral dari Indonesia, dan masyarakat Aceh betul-betul menyatu dengan bangsa Indonesia. Dengan lain perkataan mereka ingin meng-Indonesiakan Aceh dalam arti kata yang sesungguhnya. Sejalan dengan itu mereka mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam paradigma bersama bangsa kita, dari Pancasila dan UUD'45 sampai kepada GBHN, Pembangunan Nasional, Wawasan Nusantara dan seterusnya. Aceh ingin mengindonesia secara IPOLEKSOSBUDMILL.

Di samping itu, sebagai dimensi kedua, kepemimpinan baru di Aceh menyadari pula makna penting dari sejumlah nilai-nilai yang selama ini hidup dalam masyarakatnya untuk terus dibina dan dikembangkan secara terarah, wajar dan sehat, seperti nilai-nilai yang diungkapkan diatas. Nilai-nilai itu bukan saja relevan bagi masyarakat Aceh, tetapi juga dapat diangkat menjadi bagian dari nilai-nilai nasional kita yang masih terus tumbuh dan berkembang. Melalui itu masyarakat Aceh akan merasa ikut mewarnai paradigma bersama bangsa kita, dan oleh karena itu sekaligus merasa ikut memilikinya pula. Kehadiran sense of belonging seperti itu akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam paradigma bersama bangsa kita itu.

Demikianlah, apa yang dilakukan kepemimpinan baru di Aceh dalam Era Orde Baru ini, ditinjau dari sini dapat disimpulkan sebagai berikut: "Menyatukan masyarakat Aceh kedalam paradigma bangsa Indonesia, dan pada waktu yang sama sekaligus mengupayakan agar nilai-nilai mereka yang relevan dapat mewarnai serta memperkaya nilai-nilai yang terkandung dalam paradigma bersama bangsa kita itu". Pada hakekatnya itulah arus nilai baru yang kini sedang berkembang

dalam masyarakat Aceh. Melalui itu mereka memperbaharui dan membangun dirinya yang antara lain terlihat dalam serangkaian respons mereka yang kreatif seperti pembentukan Majelis Ulama dan Aceh Development Board. Hal itu juga terlihat dari kesediaan rakyat mengosongkan tanah, dengan ganti rugi untuk keperluan Zona Industri di sekitar Lhokseumawe dan buat proyek-proyek pembangunan lainnya. Dalam bidang politik terlihat pada berkembangnya budaya politik baru yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD'45, dan sekaligus secara berangsur-angsur meninggalkan orientasi yang menjadikan Islam sebagai ideologi politik dengan kaitannya untuk mendirikan negara berdasarkan agama. Kalau dulu dalam suasana pertentangan politik dan ideologi yang keras serta tajam, Pancasila dan Islam dipersaingan bahkan kadang-kadang dipertentangkan, kini semakin disadari bahwa antara keduanya tidak ada yang bertentangan, bahkan diakui bahwa nilai-nilai Pancasila adalah bersesuaian dengan ajaran Islam.

Sungguhpun begitu, pertanyaan yang dikemukakan di atas masih tetap mengusik hati dan pikiran kita, yaitu, mengapa tampaknya sekarang ini masyarakat Aceh masih memperlihatkan respons yang belum begitu kreatif dalam membangun dirinya kalau umpamanya dibandingkan dengan masyarakat Bali dan Masyarakat Sumatera Barat. Jawaban terhadap pertanyaan yang mengelitik ini sebagian penting mungkin terletak pada sejumlah faktor internal dan eksternal yang dihadapi masyarakat Aceh dewasa ini.

Pengalaman pahit dan traumatis yang pernah dialami Aceh di masa lampau seperti peperangan melawan Belanda dan pemberontakan DI/TII tampak menyebabkan masyarakatnya menjadi cenderung mengurung diri, mudah curiga atau sangat berhati-hati terhadap apa-apa yang datang dari luar. Tetapi bilamana yang datang dari luar berhasil mereka serap dan yakini kebbaikannya mereka akan menerima dan mendukungnya dengan penuh hati.

Sikap dan tingkah laku itu antara lain jelas terlihat pada kesediaan mereka berjuang dan berkorban dalam revolusi kemerdekaan dulu. Namun pada waktu perasaan atau rasa keadilan mereka tersinggung seperti waktu daerah mereka

dilebur ke dalam Propinsi Sumatera Utara di tahun 1950-an dulu, mereka memberontak dan kembali mengurung diri.

Menurut pemuka-pemuka masyarakat Aceh dari kalangan dan diberbagai tempat, untuk memahami dan menyelami hati serta jiwa orang Aceh adalah bagaikan memasuki rumah adat Aceh yang berpintu kecil dan sempit, dan oleh karena itu sulit dan rumit. Tetapi bilamana seseorang berhasil memasuki pintunya, maka di dalamnya ia akan menemukan hamparan ruangan yang lapang. Demikianlah, bilamana seseorang berhasil menemukan kunci untuk menyelami hati dan jiwa orang Aceh maka ia bukan saja tidak akan dicurigai, tetapi juga akan dianggap sebagai anggota keluarga sendiri. Dari situ akan berkembang suasana yang intim dan amat terbuka.

Mengungkap kecenderungan menutup diri setelah pengalaman pahit dan traumatis dimasa lampau itu adalah satu pekerjaan berat dan tidak mudah dirasakan oleh generasi pemimpin baru di Aceh dalam Orde Baru ini, terutama pemimpin-pemimpin yang keknokrat (cendekiawan/ilmuwan) yang ingin segera mengembangkan arus nilai baru untuk mempercepat proses di daerahnya. Kalau tidak hati-hati, apalagi kalau sampai tergelincir, apakah itu ucapan atau apalagi perangai dan perbuatan, salah-salah dapat dicap yang bukan-bukan, seperti sekuler dan angkuh.

Dewasa ini apa yang disebut arus nilai baru itu memang sudah menjalar dan berkembang, tetapi kemantapannya masih relatif terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, terutama dikalangan cendekiawan/ilmuwan dan generasi muda yang berpendidikan menengah ke atas. Bagi mereka ini arus nilai baru ini merupakan jalan keluar dari keterkurungan, keteringgalan dan keterbelakangan masyarakatnya, dan sekaligus sebagai landasan untuk mengaktualisasikan diri mereka secara penuh dan bermakna dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Bagi mereka yang masih ragu atau was-was terhadap arus nilai baru ini sebagian dikarenakan masih kuatnya ikatan paradigma lama, dan sebagian disebabkan oleh adanya hal-hal atau nilai-nilai yang dianggap negatif yang dibawa oleh proses pembangunan seperti gaya pergaulan bebas, korupsi, pelacuran terselubung, mabuk-mabukan dan kecenderungan yang kuat kepada kemewahan materi serta kenikmatan duniawi lainnya

yang mudah menggoda orang untuk menyeleweng atau melakukan maksiat.

Memang diakui pula bahwa tidak semua nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh selama ini adalah baik dan relevan dengan pembangunan, seperti sikap yang kurang menghargai waktu dan keengganan untuk diatur atau hidup berdisiplin.

Hal ini antara lain terlihat waktu proyek LNG di Lhokseumawe baru dibuka dimana para pekerja orang Aceh tampak terkejut (shocked) dan sulit menyesuaikan diri dengan peraturan yang ketat dan keras. Tetapi setelah mengalami proses sosialisasi yang mantap, umumnya mereka berhasil menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia industri, menerima nilai-nilai baru dan meninggalkan nilai-nilai lama yang tidak relevan.

Menurut keterangan wakil-wakil dari pabrik raksasa di Lhokseumawe, sekarang sudah cukup banyak putra-putri Aceh yang berhasil dilatih dan dididik yang kemudian menjadi pekerja-pekerja yang kualitasnya tidak kalah dari yang lain.

Tidak berbeda dengan masyarakat lain, orang Aceh memiliki potensi yang besar untuk memperbaharui dan membangun dirinya.

Salah satu penyebab mengapa arus nilai-nilai baru itu tampak agak lamban menjalar dan memantapkan diri dalam masyarakat Aceh ialah kelemahan komunikasi. Sudah lama Aceh tidak memiliki surat kabar yang terbit secara regular tiap hari, sehingga pemikiran-pemikiran yang hidup dikalangan pembawa arus nilai baru sulit disebarluaskan. Di samping itu mungkin pula perumusan nilai-nilai baru itu masih belum begitu kreatif sehingga kurang begitu komunikatif ke masyarakat di lapisan bawah. Sebagai salah satu langkah untuk menerobos kemacetan komunikasi ini Gubernur Ibrahim Hasan sering melakukan komunikasi tatap muka dengan masyarakat di daerah pedesaan melalui ceramah atau khotbah dari satu mesjid ke mesjid lain, dari satu desa ke desa lain. Melalui komunikasi sambung rasa seperti itu dia mengembangkan peralatan rakyatnya tentang arus nilai baru.

Kemacetan komunikasi ini juga disebabkan oleh kurang berfungsinya jajaran pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan. Ini sekaligus merupakan penyebab kedua yang mempersulit proses pengembangan dan pemantapan arus nilai

baru itu. Sebagian dari kesulitannya terletak pada Undang-Undang No.5/1979 tentang pemerintahan desa, yang cenderung menyeragamkan pemerintahan desa di seluruh Indonesia menurut pola desa di Jawa. Hal itu dalam pelaksanaannya dikaitkan pula dengan sumbangan Inpres untuk desa sehingga menimbulkan permasalahan tentang apa yang sesungguhnya dimaksud desa itu di Aceh. Apakah itu mukim yang terdiri atas beberapa gampong (kampung), ataukah gampong itu sendiri.

Akhirnya yang dipilih adalah gampong yang jumlahnya di seluruh Aceh lebih dari 6000 buah, dan banyak dari padanya yang berpenduduk kurang dari 500 orang. Akibatnya sistem pemerintahan desa tradisional yang ada di Aceh yang terdiri atas mukim dan gampong, walaupun masih ada, sulit untuk berfungsi, sedangkan sistem pemerintahan desa baru yang didasarkan atas gampong saja umumnya terlalu kecil untuk dapat berfungsi dengan baik. Bahkan sering terjadi kesulitan untuk mencari seseorang yang cukup representatif (berkualitas) yang mau menjadi kepala desa baru yang berpenduduk minim itu.

Oleh karena pemerintahan desa kurang berfungsi, pemerintahan kecamatan mengalami kesulitan pula untuk meneruskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dari atas ke bawah. Di samping itu disinyalir pula bahwa banyak dari perangkat pemerintahandi kecamatan yang kualitasnya belum begitu memadai. Dari itu semua dapat dilihat bahwa aparat penerintahan di tingkat desa dan kecamatan masih kurang mampu untuk merangsang masyarakat untuk melakukan respons yang kreatif terhadap pembangunan atau mengembangkan penalaran masyarakat terhadap arus nilai baru yang sudah berkembang di tingkat atas.

Erat berkaitan dengan itu adalah penyebab ketiga, yaitu masalah kepemimpinan, baik formal maupun informal. Pembaharuan pemerintahan desa yang dibawa oleh UU No. 5/1979, meskipun tampaknya mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, cenderung melemahkan posisi pemimpin-pemimpin tradisional, sedangkan pemimpin-pemimpin baru yang berkualitas dan representatif belum kelihatan. Hal itu dapat menimbulkan semacam krisis kepemimpinan di tingkat bawah yang selanjutnya dapat pula menjalar ke tingkat atas.

Mengapa? Antara lain karena pemimpin-pemimpin di tingkat atas akan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi ke bawah tanpa adanya pemimpin-pemimpin yang menjadi perantara dengan masyarakat banyak. Apalagi kalau pemimpin di tingkat atas segan pula untuk terjun langsung ke bawah.

Ada pula yang mengaitkan masalah krisis kepemimpinan ini dengan apa yang disebutnya kemerosotan budaya Aceh.

Bahwa pemerintahan di tingkat bawah masih jauh dari pada memadai ditambah pula dengan hadirnya semacam krisis kepemimpinan telah menyebabkan semakin merosotnya perhatian masyarakat terhadap kekayaan budayanya, seperti lembaga-lembaga adat dan agamanya, seni budayanya dan bahasanya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran kalau masyarakat Aceh, terutama generasi muda, lambat laun tidak mengetahui lagi apalagi membudayakan nilai-nilai yang baik dan relevan yang dimilikinya sendiri. Suasana itu mungkin akan memudahkan masuknya nilai-nilai baru, tapi karena masyarakat Aceh tidak memiliki lagi ukuran-ukuran yang terkandung dalam nilai-nilainya untuk menentukan mana yang baik dan buruk, maka mereka tidak akan memiliki kemampuan yang baik untuk menyaring nilai-nilai yang relevan dan bermanfaat. Salah-salah yang masuk dari luar malah nilai-nilai yang dianggap buruk atau tidak relevan.

Keterpencilan Aceh secara geografis, karena letaknya yang jauh di ujung barat, sering pula dikemukakan sebagai salah satu penyebab kecenderungan masyarakatnya mengurung diri. Kemajuan dalam bidang transportasi dan komunikasi yang pesat selama beberapa tahun ini memang telah banyak mengurangi keterisolasiannya, tetapi sedikit banyaknya hal itu masih dirasakan. Masyarakat Aceh yang relatif masih agak terisolir secara geografis itu kurang mengetahui perkembangan pembangunan di daerah-daerah lain di Nusantara ini sebagai bahan perbandingan dengan laju pembangunan di daerahnya sendiri. Hal itu rupanya ikut berpengaruh dalam menimbulkan kesan atau persepsi bahwa daerahnya paling terkebelakang, padahal kenyataan yang sesungguhnya barangkali tidaklah demikian.

Satu masalah lagi yang dikemukakan ialah berkembangnya kecenderungan yang relatif kuat untuk mengejar kedudukan/jabatan dan kekayaan materi di kalangan cendekiawan/ilmuwan

dan generasi muda. Hal itu antara lain terlihat pada agak mengendornya dinamika kampus Darussalam dalam melahirkan dan mengembangkan ide-ide dan konsep-konsep baru yang relevan bagi pembangunan masyarakat. Dulu pada tahun-tahun permulaan Orde Baru dengan jumlah cendekiawan/ilmuwan yang berbobot masih amat terbatas kampus Darussalam dapat dikatakan sangat kreatif. Kini dengan jumlah cendekiawan/ilmuwan yang berpendidikan lanjutan (doktor dan MA) sudah makin banyak sehingga barangkali dapat dikatakan telah mencapai apa yang disebut "critical mass" yang seyogyanya memungkinkan untuk melahirkan dan mengembangkan konsep-konsep baru yang berbobot bagi pembangunan Aceh dan juga pembangunan Indonesia. Mengapa hal itu masih belum begitu kelihatan?.

Ada semacam keprihatinan yang berkaitan dengan kesulitan mencari calon-calon pemimpin baru yang berkarakter, berbobot dan berwawasan ke depan dikalangan generasi muda. Dikalangan pengusaha, pedagang dan kontraktor yang sudah sukses di Aceh, jarang yang memperlihatkan keberanian untuk mengembangkan usahanya ke luar daerahnya. Hal itu berbeda dengan dulu, dimana banyak pengusaha dan pedagang Aceh yang berhasil di luar daerahnya seperti di Medan dan Jakarta.

Apa yang dikemukakan di atas barulah sebahagian dari sejumlah faktor internal yang diperkirakan ikut mempengaruhi suasana yang belum begitu memperlihatkan "kreatif respons" masyarakat Aceh dalam proses pembangunan, kalau umpamanya dibandingkan dengan masyarakat Bali dan masyarakat Sumatera Barat. Di samping masih terdapat sejumlah faktor eksternal yang sebagian akan dikemukakan di bawah ini.

VI

Apa yang disebut faktor-faktor eksternal di sini terutama didasarkan pada persepsi sejumlah elite strategis Aceh tentang itu. Salah satu masalah yang dianggap berat yang sampai sekarang ini masih membebani masyarakat Aceh ialah persepsi orang luar terhadap mereka yang tampak sulit berubah dan oleh karena itu terasa kurang wajar. Persepsi itu telah terbentuk lama dan terutama didasarkan atas pengalaman pahit

dan traumatis masa lampau yang mencerminkan orang Aceh yang sangat fanatik, cenderung menutup diri, mudah tersinggung dan memberontak. Memang kadang-kadang kejadian di Aceh, seperti peristiwa "Aceh Merdeka", tampak kurang menolong, kalaulah tidak makin memperkuat, berkurangnya persepsi semacam itu.

Sejalan dengan itu apa yang disebut arus nilai baru yang sudah cukup lama menjalar di Aceh dan kini masih terus berkembang rupanya kurang jelas terlihat oleh berbagai pihak di luar Aceh. Kuatnya pengaruh persepsi lama mungkin mengaburkan penglihatan orang luar terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat melalui arus nilai baru tersebut.

Demikianlah kiranya, orang Aceh masih merasa kurang dipercaya, kalaulah tidak dicurigai, oleh berbagai pihak. Mereka merasa sudah menyatukan diri dengan bangsa Indonesia, tetapi merasa masih belum sepenuhnya diterima. Itulah beban psikologis atau mental yang mereka rasakan selama ini, meskipun kini sudah agak berkurang.

Salah satu jalan untuk memecahkan masalah ini adalah mengembangkan komunikasi yang lebih wajar dan sehat tentang Aceh. Sebagaimana telah dikemukakan Aceh telah lama tidak mempunyai surat kabar yang terbit secara tiap hari. Berita-berita tentang Aceh yang dimuat oleh koran-koran yang terbit di luar di nilai lebih banyak mengemukakan isu atau hal yang negatif, dibandingkan dengan yang positif. Di samping itu masyarakat Aceh merasa bahwa mereka tidak mempunyai cukup banyak tokoh-tokoh elite strategis di tingkat nasional yang dapat menjelaskan suasana mereka yang sesungguhnya serta memperjuangkan aspirasi mereka yang murni, wajar dan sehat.

Kejutan yang dibawa arus pembangunan perusahaan-perusahaan raksasa di Zona Industri Aceh Utara menyebabkan masyarakat Aceh bersikap agak ambivalen terhadap modernisasi. Mereka dapat menerima segi-segi positifnya, tetapi risau melihat sejumlah dampak negatifnya seperti tercermin dalam gaya hidup atau pergaulan baru di kalangan generasi muda, pelacuran dan penjualan minuman keras secara tersembunyi.

Di samping itu adanya "enclave" tempat tinggal staf dan sebagian karyawan, lengkap dengan sekolah dan fasilitas lainnya

dapat menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial dengan masyarakat di sekitarnya. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan pihak perusahaan dan PEMDA setempat untuk mengurangi hal itu secara bermakna.

Ada beberapa kebijaksanaan dari pusat yang dinilai kurang positif terhadap pelestarian dan perkembangan nilai sosial-budaya masyarakat Aceh. Salah satu daripadanya adalah UU No. 5/1979 tentang pemerintahan desa yang telah dikemukakan di atas.

Meskipun disini dikemukakan beberapa faktor eksternal yang dianggap orang Aceh kurang merangsang mereka untuk lebih kreatif mengaktualisasikan dirinya dalam proses pembangunan sekarang ini, itu tidaklah berarti bahwa, sebagaimana juga halnya dengan faktor-faktor internal, tidak ada sejumlah faktor eksternal yang dinilai positif oleh mereka.

Tetapi oleh karena makalah ini terutama dikaitkan dengan problematik kesulitan masyarakat Aceh mengembangkan respons yang kreatif terhadap tantangan pembangunan, maka perhatian kita lebih terpusat kepada hal-hal yang diperkirakan menyebabkan kesulitan itu.

VII

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, arus nilai baru yang kini berkembang di Aceh bukan saja sesuai dengan tetapi juga mendukung konsep pembangunan nasional yang berwawasan nusantara. Proses arus nilai baru ini sudah cukup lama berlangsung, terutama semenjak permulaan Orde Baru, tetapi kemantapannya masih terbatas pada kalangan-kalangan tertentu seperti cendekiawan/ilmuwan, pengusaha dan generasi muda yang berpendidikan menengah ke atas. Kenyataan itu, ditinjau dari segi nilai, diperkirakan merupakan penyebab utama mengapa masyarakat Aceh, kalau umpamanya dibandingkan dengan masyarakat Bali dan Sumatera Barat, tampak kurang kreatif dalam respons mereka terhadap tantangan pembangunan dewasa ini. Dari situ dapat kita lihat salah satu pokok permasalahan yang dihadapi masyarakat Aceh dalam membangun diri dan daerahnya sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa dan negara kita.

Dalam upaya untuk menyelami pokok permasalahan ini secara lebih mendalam kita telah mengemukakan tiga kelompok problematik/permasalahan yang berkaitan erat dengan itu,

yaitu: (1) sejarah, latarbelakang sosial-budaya dan pengalaman masyarakat Aceh selama ini, (2) fakto-faktor internal yang dirasakan dewasa ini, dan (3) faktor-faktor eksternal yang dirasakan sekarang ini.

Melalui arus nilai baru kita melihat kesungguhan masyarakat Aceh, kendatipun masih relatif terbatas pada kalangan-kalangan tertentu, untuk menghayati dan membudayakan nilai-nilai yang terkandung dalam paradigma bersama bangsa kita yang pada dasarnya menjadi landasan dari konsep pembangunan nasional berwawasan nusantara. Bersamaan dengan itu kita juga melihat keinginan yang murni dan sehat dari masyarakat Aceh agar nilai-nilai mereka yang relevan yang bersumber pada agama dan adat mereka dapat ikut mewarnai dan memperkaya nilai-nilai yang terkandung dalam paradigma bersama bangsa kita itu. Nilai-nilai itu antara lain tercermin dalam dinamika masyarakat Aceh yang tinggi, rasa harga diri yang dalam, heroisme yang luarbiasa, dan keinginan yang kuat untuk mengaktualisasikan diri secara penuh dan bermakna. Memang nilai-nilai seperti itu bukanlah monopoli masyarakat Aceh, tetapi melalui pengalaman sejarah dan perkembangan sosial budaya mereka nilai-nilai itu telah menyatu dengan diri mereka, dan oleh karena itu dirasakan sebagai bagian integral dari diri mereka.

Melalui arus nilai baru ini masyarakat Aceh ingin memperlihatkan hasratnya yang tulus dan sungguh-sungguh untuk merangkul dan menyatukan diri dengan Indonesia, dan pada waktu yang sama ingin pula merasa diterima sepenuhnya dalam pelukan Indonesia. Tetapi memang betul bahwa arus nilai baru yang masih terus menjalar ini kemantapannya dewasa ini masih terbatas pada beberapa kalangan. Penetrasinya ke daerah-daerah pedesaan boleh dikatakan masih pada taraf permulaan, dan oleh karena itu belum mengakar dalam.

Ditinjau dari segi masyarakat Aceh sendiri sebagaimana telah dikemukakan ada sejumlah faktor internal yang menyebabkan kesulitan dalam membudayakan arus nilai baru itu.

Yang paling pokok adalah masalah mengungkai kecenderungan orang Aceh mengurung diri setelah pengalaman pahit dan traumatis pemberontakan DI /TII. Beban mental psikologis ini tampaknya mereka rasakan berat sekali dan oleh

karena itu mereka bersikap sangat hati-hati atau mudah curiga terhadap sesuatu yang baru yang datang dari luar. Kurang lancarnya komunikasi, aparat pemerintahan yang kurang komunikatif, krisis kepemimpinan, dampak-dampak negatif proses modernisasi, dan sejumlah hal lain yang kurang berkenan di hati mereka, merupakan faktor-faktor yang mempersulit proses pengungkapan beban mental psikologis yang mereka rasakan itu.

Di samping itu sejumlah faktor eksternal juga tampak menyulitkan mereka untuk cepat-cepat meninggalkan kecenderungan mengurung diri. Menurut mereka, orang-orang luar masih memiliki persepsi yang kurang wajar dan sehat tentang diri mereka yang sudah berupaya sungguh-sungguh merangkul dan menyatukan diri dengan bangsa Indonesia.

Mereka masih merasa belum diterima sepenuhnya sebagai bagian integral dari bangsa kita. Mereka merasa kurang memiliki tokoh-tokoh di tingkat nasional yang dapat menjelaskan dan mengkomunikasikan dengan baik transformasi diri mereka.

Koran-koran yang terbit di luar Aceh lebih banyak memberitakan hal-hal yang negatif dari pada yang positif tentang diri mereka, sehingga persepsi lama yang kurang atau tidak simpatik terhadap Aceh dari orang-orang luar sulit dihapus atau dirubah.

Sebagaimana dapat dilihat, masalah komunikasi merupakan salah satu problematik penting yang dirasakan baik dari segi internal maupun dari segi eksternal. Bahwa Aceh sudah lama tidak memiliki surat kabar yang terbit secara teratur tiap hari merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan kesulitan komunikasi ini.

Sebagaimana kita ketahui dari pengalaman sejarah kejayaannya di masa lampau masyarakat Aceh pada dasarnya adalah sangat terbuka. Pengalaman-pengalaman pahit dan traumatis yang datang beruntun kemudianlah yang menyebabkan mereka tampak memiliki kecenderungan untuk menjadi tertutup.

Bagaimana mengungkap kecenderungan ketertutupan itu ? Para pemuka masyarakat Aceh sendiri mengetengahkan jawaban yang telah kita petik di atas, yaitu dengan memakai ibarat rumah adat Aceh yang berpintu kecil lagi sempit tetapi memiliki hamparan ruangan yang luas di dalamnya. Bilamana

seseorang berhasil memasuki pintu kecil yang sempit itu, maka itu ia sudah berhasil menemukan kunci untuk menyelami hati dan jiwa mereka yang lapang. Di dalamnya ia akan menemukan orang Aceh yang bukan saja intim, tetapi sekaligus sopenemu kunci itu akan dianggap sebagai saudara sendiri, dan oleh karenanya akan berkembanglah suasana dan hubungan yang sangat terbuka.

Tetapi pintu kecil yang sempit itu juga berlaku bagi orang Aceh yang berhasrat hendak keluar dari rumah adatnya yang rancak itu. Bila ia berhasil keluar, maka ia akan menemukan hamparan nusantara ini yang lapang dan luas, dan itulah Indonesia. Jadi bilamana orang Aceh berhasil pula menemukan kunci hati dan jiwa orang-orang Indonesia yang lain, maka setelah berada di dalamnya ia akan menemukan bangsanya yang bukan saja intim, tetapi ia juga akan dianggap sebagai saudara sendiri, dan oleh karena itu akan berkembanglah suasana dan hubungan yang sangat terbuka pula.

Demikianlah, komunikasi menurut pandangan kita merupakan kunci untuk membuka pintu hati dan jiwa orang Aceh bagi orang-orang luar, dan pada waktu yang sama ia juga merupakan kunci untuk membuka pintu hati dan jiwa orang-orang luar yang sebangsa dan setanah air, bagi orang Aceh.

Catatan Kaki

Makalah untuk "Seminar Pemantapan Wawasan Nusantara Dalam Keseimbangan Pembangunan Industri dan Agribisnis di Aceh", diselenggarakan oleh PWI Pusat bekerjasama dengan PEMDA Daerah Istimewa Aceh, Jakarta, 27 - 29 September 1988.

* *Dr. Alfian, peneliti utama LIPI*

**BENARKAH ACEH ANGKER
DAN TERTUTUP**

O

L

E

H

PROF. A. HASJMY

BENARKAH ACEH ANGKER ?

A. Hasjmy

Bismillahir Rahmanir Rahim

*Sekiranya terjadi peperangan
Antara dua kelompok orang Mukmin,
Seharusnya anda mendamaikan mereka,
Kalau terjadi pengkhianatan
Salah satu kelompok atas yang lain,
Lakukan serangan terhadap mereka
Hatta mereka kembali ke Jalan Allah,
Kalau mereka telah melaksanakan perintah Allah
Damaikan kembali kedua kelompok itu
Dengan adil dan seharusnya anda berlaku adil,
Sungguh, Allah mencintai orang yang adil.*

*Memang orang-orang mukmin itu bersaudara,
Karena itu, binalah suasana damai
Antara saudara-saudara anda itu,
Seharusnya anda bertakwa kepada Allah,
Semoga anda mendapat rahmat kurnia.*

*Wahai orang-orang yang beriman !
Jangan terjadi antara anda
Yang satu mengolok-olok yang lain,
Siapa tahu, orang-orang yang diolok-olok
Lebih baik dari orang mengolok-olok
Demikian seorang wanita tidak boleh
Mengolok-olok wanita lain,
Mungkin sekali wanita yang diolok-olok
Lebih baik dari wanita yang mengolok-olok,
Janganlah anda saling mencaci maki
Dan jangan pula anda
Saling memberi gelar yang jelek,
Nama yang amat jelek bagi seorang mukmin,
Ialah gelar orang fasik,*

*Siapa saja yang tidak taubat,
Mereka itulah orang zalim.*

*Wahai orang-orang yang beriman !
Jauhilah sebanyak mungkin purbasangka,
Sungguh, sebahagian purbasangka itu dausa,
Janganlah anda saling cari kesalahan,
Dan jangan pula saling memfitnah,
Apakah ada diantara anda orang
Yang doyan memakan daging mayat saudaranya ?
Tentu tidak, anda merasa jijik !
Bertakwalah kepada Allah,
Sungguh Allah Maha Penerima Taubat,
Maha Penyayang !*

*Wahai Umat manusia !
Sungguh, Kami menciptakan anda,
Terdiri dari pria dan wanita,
Dan Kami jadikan anda berbangsa-bangsa,
Yang terdiri dari suku-suku bangsa,
Agar anda saling berhubungan dan berkenalan,
Sungguh, orang yang paling mulia disisi Allah
Ialah anda yang paling tinggi nilai takwanya,
Sungguh, Allah Maha Mengetahui,
Maha Luas Pengetahuannya.*

(Q.S. Al Hujurat 9 - 13)

Ayat-ayat Al Quranul Karim Surah Al Hujurat 9 - 13, secara umum ada hubungan dengan masalah yang saya uraikan dalam makalah ini, yang intinya bahwa Allah menegaskan keharusan hidup rukun damai antara suku-suku bangsa; tidak boleh saling mencaci dan saling memaki, tidak boleh saling memberi gelar-gelar yang jelek; karena semuanya, suku-suku bangsa itu, adalah makhluk Allah, dan orang-orang yang paling mulia dalam pandangan Allah ialah mereka yang paling tinggi nilai takwanya.

Setelah menegaskan bahwa tiap-tiap suku bangsa Indonesia mempunyai ciri khasnya sendiri, disamping mempunyai kesamaan dalam wujud sebuah bangsa (nasional), yang terpancar dari kata berhikmat yang terekam di atas Lambang Negara: Bhinneka Tunggal Ika; Setelah Dr. Alfian mengajukan sebuah pertanyaan:

"Bagaimana Aceh dalam proses pembangunan nasional menyatukan dirinya dengan Indonesia, dan pada waktu yang sama bagaimana pula Aceh sebagai bagian integral dari Indonesia dapat pula ikut serta mewarnai proses pembangunan Nasional tersebut secara bermakna".

Pertanyaan ini, tidak hanya harus dijawab dengan positif oleh Aceh sendiri, tetapi juga jawaban serupa harus datang dari daerah-daerah lain, dan yang terpenting jawaban positif dari Pemerintah Pusat, yang perlu disadari benar bahwa Aceh dan rakyatnya tidak boleh selalu dilaksanakan atau dideskreditkan terus menerus.

Menurut hemat saya, bahwa membandingkan Aceh dengan Bali dan Minangkabau kurang tepat, bahkan tidak adil, karena:

- a. Pada waktu Aceh hebat-hebatnya berperang dengan Belanda, Pariwisata di Bali telah dibangun oleh penjajah Belanda, karena Bali telah lama menyerah kepada Belanda.
- b. Pada waktu Aceh sedang berperang melawan Belanda dengan mengorbankan segala apa yang ada, untuk mempertahankan "sisa kedaulatan" dari bangsa-bangsa di Nusantara, Minangkabau telah lama diduduki Belanda setelah perang Jihad yang dipimpin Imam Bonjol dapat dipatahkan Belanda, hatta Belanda terus membangun lembaga-lembaga pendidikan di Minangkabau.
- c. Pada waktu pusat-pusat pendidikan di Aceh yang bernama "DAYAH" telah hancur sebagai akibat "perang kolonial" di Aceh puluhan tahun lamanya, Belanda telah mendirikan sekolah-sekolahnya di Bali dan di Minangkabau, bahkan telah banyak putera-putera Minangkabau yang diberi kesempatan oleh Belanda untuk belajar ke Jawa dan negeri Belanda; sementara

pada waktu Belanda lari dari Aceh dalam bulan Maret 1942 (sebelum Jepang masuk ke Aceh), Belanda baru sempat mendirikan di Aceh hanya satu SMP (MULO).

Pada bagian lain, dalam makalahnya, setelah menjelaskan tentang fanatisme agama yang berjaln dengan rasa kedaerahan yang kental, yang berhasil dipergunakan oleh tokoh-tokoh Darul Islam untuk mengajak rakyatnya memberontak terhadap Pemerintah Republik, maka Dr. Alfian menandakan:

"Dari sini dapat kita lihat bahwa bilamana fanatisme agama berjaln dengan fanatisme kedaerahan yang kental maka ia dapat bermuara pada fanatisme sempit yang mengurung dan mengisolasi dari masyarakat Aceh secara fisik dan mental dari bagian lain dari Nusantara ini".

Bagi saya, dan mungkin juga bagi orang lain, timbul pertanyaan apakah benar kesimpulan sdr. Dr. Alfian itu.

Apakah benar fanatisme agama yang berjaln dengan fanatisme kedaerahan yang kental mengakibatkan pengurungan/penutupan daerah dan pengisolasian diri ?.

Menurut saya, kesimpulan tersebut tidak seluruhnya benar. Sebab kenyataannya tidak demikian ! Terlepas dari benar tidaknya pemberontakan Darul Islam, nyatanya bahwa mereka (orang-orang atau tokoh Darul Islam Aceh) tidak mengurung diri dan tidak menutup Aceh untuk luar. Mereka mengadakan hubungan dengan Darul Islam di Jawa Barat, Darul Islam di Sulawesi Selatan, PRRI di Sumatera Barat/Minangkabau mereka meng "import" senjata dari Singapura, Pulau Penang dan lain-lainnya, mereka membuka pintu Aceh untuk orang-orang Darul Islam Jawa Barat, Darul Islam Sulawesi Selatan, PRRI Sumatera Barat/Minangkabau.

Saya rasa, masalahnya: Bukan ketertutupan dan keisolasi-an Aceh, melainkan dengan siapa Aceh berhubungan pada waktu-waktu tertentu, hatta kita mengambil kesimpulan bahwa Aceh tidak pernah dengan sengaja ditutup oleh orang atau sebagian orang Aceh. Tiap-tiap orang atau kelompok dimanapun mereka berada, selalu mencari hubungan dengan orang atau golongan yang diperhitungkan akan ada keuntungan bagi mereka. Menurut saya, inilah masalahnya.

Kalau bukan, semua daerah di Indonesia senantiasa menutup dan mengisolasi dirinya pada waktu-waktu ter-

tentu dan terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok tersebut.

Dalam bagian lain isi makalahnya Dr. Alfian menulis:

"Setelah pemberontakan DI/TII berhasil diselesaikan, terjadi transformasi kepemimpinan yang makin kentara, terutama setelah Orde Baru lahir. Kerjasama yang intim antara ABRI, PEMDA dan teknokrat (cendekiawan/ilmuwan), merupakan inti dari kepemimpinan baru di daerah ini. Merekalah yang memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut arus nilai baru dalam masyarakat Aceh".

Apakah benar kesimpulan Dr. Alfian tersebut? Apakah benar hanya ABRI, PEMDA dan teknokrat yang menjadi inti kepemimpinan baru di Aceh dan yang mengembangkan arus nilai baru dalam masyarakat.

Saya rasa tidak benar ! Karena nyatanya bukan demikian. Sejarah telah mencatat, bahwa setelah masalah Darul Islam dapat diselesaikan dengan baik, dan setelah pemberontakan kaum komunis yang pecah pada akhir September dan awal Oktober 1965 dapat dihancurkan (di Aceh) oleh kekuatan ABRI, Ulama dan Angkatan Muda, maka pada akhir Desember 1965 Ulama-ulama seluruh Aceh mengadakan musyawarah untuk menghadapi suasana yang gawat itu. Musyawarah itu antara lain melahirkan sebuah organisasi Ulama yang diberi nama Majelis Ulama Aceh, yang sepuluh tahun kemudian lahirlah MUI seluruh Indonesia atas anjuran Presiden setelah beliau mengamati betapa intensifnya kerjasama Ulama-Umara setelah terbentuk organisasi Ulama tersebut tersebut Fatwa yang pertama dikeluarkan Majelis Ulama Aceh itu, yaitu mengharamkan ajaran komunisme dan meminta agar Pemerintah melarangnya. Kalau fakta mengatakan demikian, apakah masuk akal kalau dikatakan bahwa inti pembaharuan di Aceh hanya terdiri dari ABRI, PEMDA dan teknokrat? Benarkah hanya mereka yang mengembangkan arus nilai baru di Aceh? Benarkah para Ulama berdiri di luar pagar? Tidakkah kesimpulan demikian berarti mendiskreditkan Ulama-ulama Aceh? Apakah barang kali dari pengamatan, bahwa MUI Daerah Istimewa Aceh telah mengembangkan kerjasama Ulama-Umara demikian baiknya? Apakah kurang diperhatikan, bahwa MUI Daerah Istimewa Aceh bukan saja mengembangkan kerjasama hanya dengan PEMDA, tetapi juga dengan

beberapa Kanwil dan Lembaga Negara lainnya? Apakah tidak diketahui, bahwa MUI Daerah Istimewa Aceh, telah lama mengikat kerjasama dengan BKKBN, Kanwil Perindustrian, Kanwil Kesehatan, Kanwil Koperasi, Dinas Perkebunan. Kalau demikian halnya, apakah masuk akal kalau dikatakan bahwa para Ulama Aceh berdiri di luar pagar dalam kepemimpinan baru dan tidak ikut mengembangkan nilai-nilai baru dalam masyarakat Aceh?

Dr. Alfian berharap agar orang luar Aceh berusaha untuk dapat memasuki "pintu rumah Aceh yang kecil" agar sampai ke dalam ruangan rumah yang luas dan menyenangkan.

Ini adalah satu perlambang dari orang Aceh. Selanjutnya Dr. Alfian berharap kepada orang-orang Aceh :

"Tetapi pintu yang kecil dan sempit itu juga berlaku bagi orang Aceh yang berhasrat hendak keluar dari rumah adatnya yang rancak itu, bila ia berhasil keluar, maka ia akan menemukan hamparan nusantara ini yang lapang dan luas, dan itulah Indonesia.....".

Saya sangat setuju dengan anjuran sdr. Dr. Alfian ini dengan catatan bahwa ada sementara orang-orang Aceh, baik angkatan tua maupun muda, yang bersikap seperti yang saya lukiskan di bawah ini:

Ada sementara orang-orang Aceh, baik yang muda maupun yang dewasa/tua, tidak betah tinggal dalam rumah Aceh yang pintunya sempit, tetapi di dalamnya luas dan lapang, bukan karena ingin mencari pengalaman berharga dalam Dunia Nusantara yang lebih luas. Mereka tidak betah dalam rumahnya sendiri, karena di dalamnya tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan adat Aceh dan Agama Islam, seperti judi dalam segala jenisnya, minuman neraka/arak, zina/kumpul kebo dan segala macam maksiat lainnya. Kemudian, dalam keadaan seperti "orang mabuk", mereka tidak keluar dari pintu yang sempit itu, tetapi mendobrak jendela dan melompat keluar seperti "pencuri yang kepagian". Sesampai di luar (luar daerah), mereka berkoak-koak memaki Aceh daerah tempat darahnya bertumpah ke bumi; mengkampanyekan bahwa Rakyat Indonesia di Aceh menutup dirinya, mengisolasi Aceh dari dunia luar dan Aceh adalah daerah yang angker.....

Saya rasa kita semua tidak menyetujui, bahkan mencela, sikap sementara "orang Aceh" yang demikian. Kita akan sangat

setuju kalau mereka keluar untuk meluaskan cakrawala pikirannya dan untuk memperkuat kesatuan dan persatuan Nasional Indonesia, dan sekaligus untuk mencanangkan bahwa Rakyat Indonesia di Aceh tidak pernah mengisolasi dirinya dan tidak pernah menutup daerahnya untuk orang luar.....

Di bawah topik yang berjudul : Arus Nilai Baru Masyarakat Aceh Dalam Konsep Pembangunan Berwawasan Nusantara, terekam penegasan berikut:

"Masalah ini perlu diketengahkan sebagai salah satu topik yang akan dibahas, mengingat kenyataan setelah pembangunan fisik yang akan digalakkan sejak awal Orde Baru, banyak terjadi perubahan perilaku sosial politik masyarakat Aceh".

"Perubahan atau adanya penggeseran sistem nilai itu, ternyata telah menumbuhkan arus nilai baru yang lebih berorientasi pada konsep Wawasan Nusantara. Gejala ini perlu perlu dibahas untuk memahami kondisi sosial yang objektif dalam mengsucceskan program pembangunan Pelita V".

Dalam penegasan di atas tersirat bahwa sebelum itu seakan-akan Tanah Aceh tertutup dan Rakyat Aceh mengisolasi diri (mudah-mudahan pemahaman saya tidak benar!). Memang telah lama tersiar luas di luar Aceh sebuah "cerita dongeng" bahwa masyarakat Aceh tertutup, orang Aceh mengisolasi diri (yang lebih lucu dikatakan, bahwa ketaatan kepada ajaran Islam dan kefanatikan mereka kepada agama, telah membuat orang Aceh menjadi tertutup).

Gunjingan yang menjelma dalam wujud "cerita dongeng" tentang ketertutupan dan "keterpencilan" Aceh telah menyebabkan Aceh dianggap orang luar sebagai "Daerah Angker" yang sangat merugikan Wilayah Indonesia ujung paling Barat, yang pernah tampil sebagai DAERAH MODAL Republik Indonesia dan Serambi Mekah.

Sebagai akibat dari gunjingan yang berdasarkan "cerita dongeng" tentang Aceh, telah menyebabkan para wisatawan dalam dan luar negeri takut datang ke Aceh, para pengusaha enggan menanamkan modalnya di daerah yang telah banyak jasa dalam mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945, para pegawai merasa takut kalau dipindahkan ke Aceh, para peneliti merasa ragu-ragu untuk datang meneliti yang dirasanya perlu diteliti, sekalipun akhir-akhir ini keadaan yang "lucu" itu telah berkurang.

Untuk dimaklumi, di bawah ini akan saya turunkan beberapa contoh atau fakta yang sebenarnya telah terjadi :

1. Beberapa tahun yang lalu, seorang Sarjana Belanda, B.J. Boland namanya, yang bermaksud datang ke Aceh untuk penelitian bagi bukunya yang akan ditulis (sekarang telah keluar, judulnya *The Struggle Of Islam In Modern Indonesia*), sesampainya di Jakarta ditakut-takuti orang, bahwa kalau dia ke Aceh (sebagai orang Belanda yang Kristen), tidak akan dapat kembali ke negerinya, karena akan dibunuh orang Aceh. Setelah dia menyurati saya menanyakan keadaan yang sebenarnya, dan setelah saya menjawab bahwa ia pasti akan aman di tanah Aceh, barulah ia berani ke Aceh.....dan diapun tercengang, setelah dilihatnya Aceh yang demikian aman dan ramah terhadap "orang luar", termasuk terhadap orang Belanda, bekas musuhnya dalam "perang kolonial" di Aceh yang amat lama. Sebahagian dari isi bukunya itu adalah hasil penelitiannya langsung di Aceh.
2. Pada awal tahun tujuh puluhan, seorang Jaksa yang dipindahkan dari Banjarmasin ke Banda Aceh Darussalam, merasa dirinya seperti "dibuang" ke Aceh. Hal ini, karena didengar cerita orang di "Jakarta" bahwa Rakyat Aceh sangat memencilkan dirinya dari dunia luar, hatta karenanya di Aceh kurang segala-galanya. Untuk persiapan, Jaksa tersebut membeli bermacam obat, pakaian tambahan, bahkan katanya hampir-hampir dia membawa kasur dan bantal dari Jakarta. Tetapi, alangkah herannya setelah dia sampai di Banda Aceh didapatinya kenyataan yang sebaliknya; tidaklah seperti didongengkan "orang Jakarta" kepadanya, bahwa tanah Aceh sangat angker. Hal ini, diceritakan dalam pertemuan perkenalan dengan masyarakat Banda Jaya (salah satu bahagian dari Banda Aceh). Jaksa tersebut tinggal di daerah Banda Jaya, di daerah itu juga saya tinggal. Di daerah Banda Jaya ada sebuah lembaga kerukunan yang bernama RUKUN BAJA (Rukun Banda Jaya), yang tiap-tiap ada warga baru diadakan pertemuan perkenalan.

3. Dalam tahun 1986, seorang mantan menteri P.U. Kerajaan Brunei Darussalam datang ke Banda Aceh Darussalam, menginap di Hotel Sultan. Dia berangkat ke Aceh dengan melalui Medan, dan di Medan dia menginap di Hotel Danau Toba. Ada orang di Hotel tersebut (dia tidak tahu entah siapa) menasehatkan agar dia jangan pergi ke Aceh, karena di Aceh kacau, ada pemberontakan, tidak aman dan berbahaya baginya. Dari Medan dia kembali ke Brunei Darussalam dengan amat kecewa, tetapi niatnya ke Aceh akan dilanjutkan. Pada awal tahun 1986, lima orang anaknya yang sedang belajar di London diminta segera kembali ke Brunei, dan kemudian Mantan Menteri P.U. itu bersama isteri dan lima orang anaknya berangkat ke Aceh, juga lewat Medan, dan dia tidak lagi menginap di Hotel Danau Toba, tetapi di Hotel Garuda Plaza. Di Hotel tersebut dia tidak mendengar cerita tentang "angkernya" Aceh. Menurut ceritanya bahwa sekali ini ke Aceh bersama seluruh keluarganya, agar dia bersama isteri dan lima orang anaknya sama-sama mati di tanah Aceh, yang dulu pernah bergelar Kerajaan Aceh Darussalam, kalau memang cerita orang di Hotel Danau Toba itu benar. Mantan Menteri P.U. itu sangat heran, karena didapatinya di Daerah Istimewa Aceh aman dan rakyatnya ramah. Dengan bebas beliau berkunjung ke Makam Syekh Abdurrauf Syiah Kuala dan tempat-tempat bersejarah lainnya.

III

Apakah benar tanah Aceh menutupi dirinya dan Rakyat Aceh mengisolasi diri dari "dunia luar" ?

Dengan pasti saya dapat menjawab : Tidak, sekali-kali tidak! itu hanya sebuah "gunjingan" yang bersumber dari "cerita dongeng" yang sengaja dibuat untuk menjelek-jelekkan Aceh; mungkin karena pembuat "cerita dongeng" itu irihati atas mulianya martabat dan harakat Aceh yang menjadi Modal RI

dalam perjuangan kemerdekaan di tahun-tahun Revolusi 1945, atau karena "sipengunjing" jahil-merakkab.

Karena Aceh terletak di jalur lalu-lintas Internasional (Selat Malaka), maka semenjak sejarahnya tanah Aceh selalu terbuka untuk Dunia Luar, terbukti dari kenyataan bahwa orang Aceh terdiri dari bermacam-macam turunan darah, hatta karenanya ada sementara "penulis" yang mengartikan ACEH kependekan dari A (Arab), C (Cina), E (Eropah), H (Hindi). Sekalipun saya sendiri tidak berpendapat demikian.

Semenjak zaman Islam, tanah Aceh betul-betul membuka dirinya untuk dunia luar, baik yang beragama Islam maupun yang bukan. Sulthan Alaidin Saiyid Maulana Abdul Aziz Syah, Raja Kerajaan Perlak pertama, adalah datang dari Timur Tengah, darah campuran antara Arab Quraisy dan Persia, demikian pula sebahagian para Menteri (wazir) nya dan para pejabat Kerajaan lainnya, terutama yang bekerja di bidang pendidikan (mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang bernama Madrasah/meunasah, zawiyah/dayah, zawiyah aliyah/dayah mayang dan sebagainya).

Dalam Kerajaan Islam Samudra/Pasai, banyak kita temui para Menteri/wazir dan pejabat Kerajaan lainnya, yang berasal dari Arab, Persia, Hindi dan lain-lain. Pendiri Zawiyah Blang Pria (Pusat Pendidikan Tinggi dalam Kerajaan Samudra/Pasai) adalah seorang Ulama Besar yang datang dari Persia, yang sekarang terkenal dengan Teungku Chik Blang Pria; adalah nenek moyang dari ulama terkenal dua bersaudara, Syekh Ali Al Fansuri dan Syekh Hamzah Al Fansuri (sastrawan Sufi Melayu yang amat terkenal di Nusantara). Syekh Ali Fansuri adalah ayahnya Syekh Abdurrauf Syiah Kuala, Ulama Aceh/Nusantara yang berkaliber Internasional.

Orang yang rajin mempelajari Kerajaan Aceh Darussalam (penggabungan dari Kerajaan Islam Perlak, Kerajaan Islam Samudra/Pasai, Kerajaan Islam Lingga dan Kerajaan Islam Daya), tentu mengetahui bahwa Kerajaan tersebut tidak pernah tertutup untuk dunia luar. Sulthan Iskandar Meukuta Alam, turunan Bani Seljuk dari Timur Tengah Sulthan Iskandar Sani (mantunya Iskandar Muda) berasal dari Pahang, Semenanjung Tanah Melayu, Sulthan Badrul Alam Jamalul Lail berasal dari turunan Syarif Mekah; ada diantara Sulthan Aceh yang berasal dari Bugis. Putrou Phang Permaisuri

Iskandar Muda berasal dari Pahang, Semenanjung Tanah Melayu.

Menjelang Kerajaan Belanda mengumumkan Pernyataan Perang terhadap Kerajaan Aceh Darussalam, Perdana Menteri Kerajaan Aceh adalah Saiyid Abdurrahman yang berasal dari Arab Quraisy/Mekah dan Panglima Perangnya ialah Panglima Tibang yang berasal dari Hindi/India.

Tentang banyaknya orang-orang luar datang ke Aceh Darussalam, antara lain terbukti dengan adanya nama-nama kampung berasal dari luar dalam kota-kota di Kerajaan Aceh Darussalam. Antaranya ada Kampung Jawa, Kampung Kedah, Kampung Keling, Kampung Arab, Kampung Hadlaramaut, Kampung Tibang, Kampung Ranir, Kampung Cina, Kampung Adan/Aden, Kampung Yaman, Kampung Blang Arab, Kampung Bitay/Baital Maqdis, Kampung Meuse/Mesir, Kampung Menyakpahat/Majapahit, yang masing-masingnya didiami oleh kebanyakan orang-orang berasal dari Jawa, Semenanjung Tanah Melayu, Hindi/India, Arab, Hadlaramaut/Yaman Selatan, Tibang/India, Ranir/India, Cina/Tiongkok, Aden/Yaman Selatan, Yaman (maksudnya Yaman Utara sekarang), Baital Maqdis/Palestina, Mesir, Jawa/Kerajaan Majapahit.

Yang paling banyak pendatang ke Kerajaan Aceh Darussalam, ialah pendatang dari Hindi (sekarang menjadi Pakistan, India dan Banglades), terbukti mereka juga membuat pusat pendidikan sendiri, yang bernama Dayah Kling dan mendapat konsesi untuk mengusahakan hutan, yang bernama Gunong Kling dan lain-lain.

Sekali lagi Aceh membuktikan dirinya terbuka untuk semua orang, kecuali untuk kejahatan, ialah dalam tahun-tahun revolusi 17 Agustus 1945. Pada waktu hampir seluruh kota-kota besar, menengah dan kecil telah dikuasai Tentara penjajah Belanda, tinggallah Aceh satu-satunya Wilayah Republik Indonesia yang bebas "tentara pendudukan" pada saat itu, Aceh membuka pintunya lebar-lebar untuk mereka yang mengungsi dari Sumatra Timur, Tapanuli, Sumatra Barat, Riau, Pulau Jawa dan sebagainya. Nama-nama para pendatang ke Aceh pada waktu itu, yang kemudian menjadi orang-orang terkemuka dalam republik tercinta ini, cukup banyak, misalnya Jenderal Hidayat (waktu di Aceh Kolonel), mantan Menteri Per-

hubungan, Laksamana Sudomo (waktu di Aceh Letnan Angkatan Laut), sekarang Menko Polkam, Kolonel Subiyakto (waktu di Aceh Letnan Kolonel Angkatan Laut), mantan Kepala Staf Angkatan Laut, Kolonel Marta Dinata (waktu di Aceh Mayor Angkatan Laut), mantan Kepala Staf Angkatan Laut, Kolonel Jhon Lee (waktu di Aceh Kapten Angkatan Laut), mantan Komandan salah satu Kapal Perang RI, Jenderal Askari (waktu di Aceh Letnan Kolonel), mantan Duta Besar RI di salah satu Negara Eropah Barat, Sulthan Syarif Kasim, mantan Sulthan Siak Sri Indrapura. Semua mereka ini baru kembali ke Jawa setelah Belanda menyerahkan Kedaulatan kepada Indonesia.

IV

Makna konsep pembangunan yang berwawasan Nusantara seperti yang dijelaskan sdr. Dr. Alfian pada halaman satu makalahnya, menurut saya bahwa ia dalam penjelmaan dari "Bhinneka Tunggal Ika" yang termaktub pada lambang Negara Republik Indonesia. Karena itu, ia harus berarti bahwa pembangunan tidak harus serupa di seluruh Indonesia, tetapi harus merata hatta hasilnya dapat dinikmati oleh semua bangsa Indonesia.

Bhinneka berarti bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku yang beraneka ragam adat dan kebudayaannya. Pembangunan yang serupa/Tunggal Ika, berarti memaksakan gulai pedas orang Aceh dan orang Minangkabau kepada orang Jawa yang biasanya makan gulai manis. Demikian pula sebaliknya, memaksakan gulai orang Jawa yang manis kepada orang Aceh dan Minangkabau adalah keliru, karena orang Aceh dan Minangkabau tidak merasa nikmat dengan makanan/lauk pauk yang manis itu. Ia bukanlah konsep pembangunan yang berwawasan Nusantara seperti yang diartikan Dr. Alfian. Dalam hubungan itu, disinilah kita melihat kelirunya Undang-Undang No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang itu memaksakan "gulai manis" orang Jawa kepada orang Aceh dan orang Minang, atau sebaliknya, yang menyebabkan "sakit perut atau sakit gula" masing-masing pihak.

Bagi orang Aceh tidak ada alasan untuk menolak konsep pembangunan yang berwawasan Nusantara, karena semenjak awal sejarah Islam di Nusantara, Aceh pada hakekatnya telah melaksanakan konsep pembangunan yang berwawasan demikian.

Karena itu, tentang pelaksanaan konsep pembangunan berwawasan Nusantara tidaklah perlu diragukan lagi. Yang mendesak sekarang, ialah bagaimana cara kita memberi informasi kepada Rakyat Indonesia Suku Aceh tentang hal tersebut (konsep pembangunan yang berwawasan Nusantara), sehingga masuk akal mereka dan enak didengar tidak menyinggung perasaan dan tidak mengoyak harga diri mereka.

Saya akhiri pendapat ini dengan beberapa kesimpulan dan saran, yaitu :

1. Makalah Dr. Alfian yang berjudul : *Arus Nilai Baru Masyarakat Aceh dalam Konsep Pembangunan Berwawasan Nusantara*, secara umum sudah cukup baik untuk dipakai menjadi pedoman penyusunan rencana Pembangunan Aceh, sekalipun disana-sini ada hal-hal yang perlu penghalusan.
2. Makalah bandingan/sandingan saya yang berjudul : *Benarkah Aceh Menutupi Dirinya dan Angker ?* (Sebuah Usaha Untuk Menjelaskan Keadaan Yang Sebenarnya), bertujuan :
 - a. Menanggapi Makalah Dr. Alfian.
 - b. Membela atau menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang Aceh, berhubung adanya suara-suara sumbang yang menyatakan bahwa Aceh tertutup, Rakyat Indonesia Suku Aceh menutupi dirinya dan Tanah Aceh Angker.
3. Tujuan atau niat sebaik apapun dalam usaha membangun suatu Daerah, akan gagal atau kurang berhasil kalau cara penyampaian informasi tentang hal tersebut dapat menyinggung perasaan dan menyentuh harga diri rakyat daerah bersangkutan. Untuk inilah, sasaran kedua dari Makalah saya; membangkit-bangkitkan batang terendam.
4. Perlu dengan segera diusahakan, agar Undang-Undang No. 5/1979 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang lain yang tidak bertentangan dengan makna yang terkandung

dalam kata berhikmat : BHINNEKA TUNGGAL IKA yang termaktup di atas Lambang Negara Garuda Pancasila.

5. Sebelum berhasil pencabutan Undang-Undang No. 5/1979 dan penggantian dengan Undang-Undang lain yang tidak berlawanan dengan makna Lambang Negara Garuda Pancasila, disarankan agar Pemda Daerah Istimewa Aceh dan LAKA (Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh) mengambil langkah yang perlu, umpamanya dengan menghidupkan kembali LEMBAGA TUHA PEUT sebagai Lembaga Adat, dengan Lurah Kepala Desa (yang ada dalam Undang-Undang No. 5/1979 ditetapkan menjadi Ketua Lembaga Tuha Peut dengan gelar Keuchik dan Teungku/Imeum Meunasah (yang telah dihapus oleh Undang-Undang No. 5/1979) ditetapkan menjadi Wakil Ketua Lembaga Tuha Peut, dan para anggotanya dapat saja ditunjuk pengurus LSD (Lembaga Sosial Desa) dan pengurus Lembaga-lembaga resmi lainnya yang berada di Desa bersangkutan, sekalipun pada hakekatnya hampir-hampir tidak berfungsi.
6. Agar dengan segera diusahakan terbit sebuah surat kabar harian yang terbit tiap-tiap hari di Banda Aceh Darussalam. Untuk maksud amat baik ini, kecuali memerlukan bantuan Menteri Penerangan dan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, juga yang sangat penting ialah usaha sungguh-sungguh dari para wartawan (PWI) yang bermukim di tanah Aceh. Kesepakatan dan persatuan kata perbuatan mereka merupakan faktor yang amat menentukan.
7. Kerjasama Ulama-Umara perlu ditingkatkan terus, ditambah dengan Aghniya dan Abriya (ABRI). Kalau kita kadangkang tidak menyebut dua kelompok terakhir, karena dalam kalangan Abriya (ABRI) dan Aghniya (hartawan) ada juga Ulama.
8. Tidak ada lagi saling menjelek, saling memfitnah, saling curiga, saling menghasut, saling memberi gelar yang jelek, saling menuduh, saling tidak percaya dan saling tidak menghargai antara kelompok-kelompok atau golongan-golongan dalam masyarakat Aceh.
9. Rakyat Indonesia Suku Aceh tidak boleh "buruk sangka" (suud han) kepada Pemerintah Pusat; sebaliknya Pemerintah Pusat tidak boleh mencurigai Rakyat Indonesia Suku

Aceh, hanya karena ada sementara "laporan Intelijen" yang belum dicek kebenarannya atau benar tetapi salah tafsir.

10. Untuk menghindari saling tuduh dan saling curiga antara Pemerintah Pusat dan Rayat Indonesia Suku Aceh, perlu kecermatan dan kehati-hatian menilai sesuatu "laporan" oleh Pemerintah Pusat, dan kearifan serta keahlian Rakyat Indonesia Suku Aceh dalam menyaring berita dan isu; karena banyak sekali tersebar atau sengaja disebarkan berita-berita bohong atau isapan jempol.
-

Catatan Kaki.

Prof. A. Hasjmy, Ketua MUI Propinsi Daerah Istimwewa Aceh. Disampaikan dalam Forum Seminar Pembangunan Aceh, yang dilaksana kan PWI Pusat bekerjasama dengan Pemda Aceh, yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 27-28-29 September 1988.

PEMBANGUNAN DAERAH DAN
KAITANNYA DENGAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL

O

L

E

H

PROF. DR. SALEH AFIFF

PEMBANGUNAN DAERAH DAN KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Saleh Afiff

Terdapat beberapa hal yang tetap, yang konstan di bidang pembangunan daerah dalam kaitannya dengan pembangunan nasional. Pembangunan daerah adalah pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia di daerah. Penekanannya kepada unsur manusia ini sesuai dengan pesan GBHN dan mempunyai implikasi penting bagi penyusunan strategi dan kebijaksanaan pembangunan di masing-masing daerah.

Keseluruhan pembangunan di daerah yang disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah merupakan satu kesatuan pembangunan nasional sebagai perwujudan Wawasan Nusantara. Hal ini berarti bahwa cita-cita dan harapan dalam pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan rakyat Indonesia yang ada di daerah tidaklah berdiri sendiri tetapi adalah dalam rangka lebih memperkokoh terwujudnya Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Namun terdapat hal-hal yang berubah yang kiranya perlu diperhitungkan dalam upaya pembangunan selanjutnya di berbagai daerah. Perubahan ini bersumber dari dalam maupun dari luar daerah. Keberhasilan pembangunan telah merubah berbagai parameter pembangunan di berbagai daerah termasuk perubahan dalam struktur ekonomi. Dengan pertumbuhan penduduk relatif tinggi, jumlah sumber daya manusia terus meningkat. Berhasilnya dibangun berbagai prasarana dan sarana telah meningkatkan mobilitas penduduk. Meningkatnya tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk bukan saja telah meningkatkan mutu sumber daya manusia tetapi sekaligus juga berarti meningkatnya aspirasi dan wawasan rakyat pada umumnya. Perubahan-perubahan ini terdapat juga di Aceh. Hal yang berubah ini merupakan faktor-faktor dinamis yang perlu diperhitungkan dalam merumuskan strategi pembangunan suatu daerah dalam kaitannya dengan pembangunan nasional.

Di samping itu hasil-hasil pembangunan yang telah tercapai telah meningkatkan persyaratan apa yang dianggap sebagai

pembangunan yang berhasil di masa depan. Pada dasarnya pembangunan yang berhasil akan tergantung bukan saja kepada sejauhmana hal-hal fisik yang telah berhasil dibangun tetapi juga sejauhmana telah berhasil dikomunikasikan makna dan arti hasil-hasil fisik bagi pencapaian kehidupan yang lebih baik sesuai dengan visi dan harapan rakyat di daerah. Komunikasi pembangunan yang efektif semakin dituntut sebagai bagian pelaksanaan pembangunan yang berhasil. Seminar ini perlu mengkaji sistem komunikasi yang efektif khususnya untuk Daerah Istimewa Aceh.

Seperti yang telah dimaklumi kebijaksanaan pembangunan daerah yang selama ini ditempuh dapatlah dikemukakan sebagai terdiri atas dua kelompok kebijaksanaan utama. Pertama adalah pengarahannya kebijaksanaan pembangunan agar kegiatan pembangunan di berbagai sektor dapat terlaksana di daerah secara lebih merata; juga agar kegiatan pembangunan di berbagai sektor ini dapat lebih tanggap terhadap aspirasi daerah, terhadap potensi dan permasalahan serta prioritas daerah. Kedua adalah kebijaksanaan khusus yang ditempuh dalam rangka memanfaatkan potensi, mengatasi permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan di daerah. Kebijakan khusus ini mengambil bentuknya yang penting antara lain pada apa yang dikenal sebagai program-program Inpres.

Pada tahap-tahap awal pengetrapan kebijaksanaan ini dihadapi berbagai masalah khususnya yang menyangkut koordinasi efektifitas serta efisiensi dalam pelaksanaan. Tetapi di dalam Repelita IV, kadar masalah-masalah yang ditemui jauh berkurang dari masa-masa sebelumnya. Apa yang disebut sebagai penyakit "egoisme sektoral", umpamanya dalam pembangunan di daerah kelihatannya sudah jauh berkurang. Pelaksanaan program-program Inpres pada saat ini jauh lebih lancar, bahkan kadang-kadang cenderung bersifat rutin.

Berbagai indikator yang ada memperlihatkan bahwa sasaran utama pembangunan daerah kiranya telah berhasil diwujudkan, bukan saja secara umum tetapi juga pada masing-masing daerah, termasuk di daerah Aceh. Pada masa yang lalu Daerah Istimewa Aceh sering digambarkan sebagai daerah yang terbelakang, baik secara ekonomi maupun sosial, dan merupakan daerah terisolasi. Dan selalu digambarkan sebagai daerah yang sulit dibangun dan masyarakat sulit

digerakkan untuk maju. Gambaran yang demikian telah berubah. Daerah Aceh tidak bisa lagi digolongkan sebagai daerah yang tertinggal, dan tidak lagi sebagai daerah yang terisolasi. Hal tersebut terutama sejak berkembangnya sektor industri besar yang mendorong berkembangnya berbagai kegiatan lainnya di wilayah itu. Di samping itu telah dibangun prasarana (jalan, jembatan, pelabuhan laut, pelabuhan udara serta sarana angkutan darat, laut dan udara) sehingga perhubungan di dalam daerah dan ke luar daerah telah berjalan secara lancar.

Data yang ada menunjukkan bahwa, dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita (dengan konstant tahun 1983) D.I Aceh berada jauh di atas rata-rata nasional. Demikian juga rata-rata PDRB - per kapita D.I. Aceh jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Jika pendapatan migas dikeluarkan, pendapatan perkapita D.I Aceh masih tetap lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Bukan saja di bidang ekonomi Daerah Istimewa Aceh menunjukkan kemajuan yang pesat, tetapi indikator-indikator sosial juga demikian. Pada tahun 1985 angka buta huruf, di Daerah Istimewa Aceh adalah 12,8 % (sama dengan rata-rata nasional), angka harapan hidup adalah 63,7 tahun, rata-rata nasional adalah 61,4 tahun, angka kematian bayi 54 per 1000 kelahiran hidup (rata-rata nasional adalah 71 per 1000 bayi). Hal ini adalah wajar oleh karena fasilitas kesehatan yang tersedia di Aceh lebih banyak dari pada yang tersedia di Indonesia secara rata-rata. Jumlah Puskesmas per seribu jiwa pada tahun 1986 di Aceh adalah 0,233. Indeks ini secara nasional adalah 0,135. Begitu pula indikator-indikator sosial lainnya, seperti tingkat pendidikan menunjukkan bahwa D.I. Aceh telah menunjukkan perkembangan yang pesat.

Salah satu hasil pembangunan daerah yang tidak bisa diukur dengan angka statistik adalah berfungsinya seperangkat lembaga pembangunan di daerah yang kiranya akan berperan penting untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan. Berhasilnya dibangun seperangkat kelembagaan pembangunan sangat penting artinya bagi masa depan, sebab hanya melalui lembaga-lembaga ini, ditopang dengan pengalaman dan dibimbing dengan visi dan harapan masa depan masyarakat, sumber daya manusia dan kekuatan pembangunan lainnya, dikerahkan secara produktif bagi tujuan-tujuan pembangunan.

Dengan lembaga-lembaga pembangunan yang ada maka akan dapat ditingkatkan modal intelektual dan modal spiritual sumber daya manusia, yaitu kesadaran mengenai apa yang telah dicapai, masalah apa yang masih dihadapi dan langkah-langkah apa yang perlu ditempuh. Melalui lembaga-lembaga pembangunan di Aceh cukup berkembang dan telah memiliki pengalaman pada berbagai segi pelaksanaan pembangunan dan pemecahan masalah dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia dan alam di Aceh dalam rangka mencapai hasil pembangunan tersebut. Aceh tentu dapat berbangga oleh karena di masa lalu mempelopori berdirinya dan berfungsinya salah satu lembaga yang penting peranannya dalam pembangunan daerah Aceh yaitu ACEH DEVELOPMENT BOARD, yang amat berperan dalam pembangunan dan yang menjadi modalbagi terciptanya sistem BAPPEDA untuk seluruh Indonesia. Kiranya di masa depan BAPPEDA di Aceh akan dapat memainkan peranannya dalam merumuskan serta memanfaatkan sumber-sumber pertumbuhan yang terkait dengan atau berasal dari sumber daya manusia Aceh.

Meskipun data-data yang ada diperlihatkan pertumbuhan ekonomi Aceh selama empat tahun REPELITA IV memadai, tetapi oleh karena berbagai kondisi awal yang berbeda di berbagai wilayah di Aceh maka pertumbuhan tentu tidak sama di semua wilayah. Sebagian besar dari kemajuan-kemajuan yang digambarkan tadi terdapat di belahan sebelah Timur. Di samping itu sebagian besar PDRB Aceh bersumber dari sektor pertanian, sektor yang mempekerjakan sebagian besar angkatan kerja Aceh. Peranan sektor pertanian dalam menghasilkan PDRB selama 4 tahun terakhir bertambah kecil meskipun secara absolut meningkat. Tetapi perbandingan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian dan sektor industri tidak seimbang dengan peranannya dalam menghasilkan PDRB. Hal ini mengisyaratkan adanya kesenjangan produktifitas.

Kesenjangan sektoral produktifitas angkatan kerja di Aceh ditimbulkan oleh teknologi pemanfaatan sumber daya alam kiranya dalam jangka pendek merupakan sesuatu yang tidak terelakkan dan perlu dimanfaatkan bagi meningkatkan pembangunan di daerah. Namun demikian kesenjangan secara bertahap harus diperkecil.

Melalui kebijaksanaan pokok pembangunan daerah yang ditempuh sejak Orde Baru, telah dapat diusahakan berbagai kemajuan dan sasaran di bidang pembangunan daerah khususnya di Aceh dalam kaitannya dengan pembangunan nasional di samping beberapa masalah yang timbul sebagai akibat dari kemajuan tersebut. Adalah penting kita memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang telah dicapai bagi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada demi masa depan lebih baik.

Bilamana demikian halnya apakah tantangan yang dihadapi dalam masa mendatang?

Secara singkat dapatlah dikemukakan kesempatan sekaligus tantangan yang dihadapi ialah membina dan mengarahkan kekuatan dan potensi Aceh bagi pembangunan Aceh dalam rangka pembangunan nasional. Pembinaan dan pengarahan ini berarti pengerahan sumber daya manusia di Aceh sebagai modal pembangunan seoptimal dan seefektif mungkin.

Sebesar apa masalah pengerahan sumber daya manusia ini bagi Aceh? Untuk Aceh proyeksi yang ada menunjukkan bahwa jumlah penduduk Aceh akan meningkat dengan 2,5% antara 1985 - 1995, yaitu dari 2,98 juta pada tahun 1985 menjadi 3,82 juta pada tahun 1995. Yang memasuki pasar kerja, atau angkatan kerja barangkali tidak akan kurang dari 3,7% per tahun dalam kurun waktu sama. Proyeksi yang ada memperlihatkan angkatan kerja meningkat dari 1,2 juta tahun 1987 menjadi 1,7 juta pada tahun 1995 atau sekitar 55000 per tahun. Selain itu pada tahun 1985, dari 1,09 juta orang yang bekerja, 50,78% bekerja kurang dari 35 jam kerja per minggu pada pekerjaan utama. Selanjutnya, dari 1,09 juta yang bekerja, 23,2% berpendidikan SLP ke atas. Prosentase angkatan kerja yang berpendidikan SLP ke atas ini lebih tinggi dari keadaan Indonesia pada tahun yang sama yaitu 16,3% atau keadaan di Sumatera yaitu 19,2%.

Secara singkat, strategi pembangunan di Aceh di masa depan ialah memanfaatkan secara produktif potensi besar Aceh yang bertumpu pada angkatan kerja baru yang bertambah dengan sekitar 55.000 orang setiap tahun dan menyerap jam kerja yang masih tersisa yang relatif besar.

Dalam menghadapi tantangan demikian, kiranya amat penting agar pertumbuhan ekonomi nonmigas di Aceh dapat

ditingkatkan seoptimal mungkin. Untuk ini maka semua sumber pertumbuhan di Aceh perlu ditemukanali dan dikembangkan dan dimanfaatkan. Sesuai pengarahannya GBHN 1988, maka potensi sumber pertumbuhan ini perlulah dicari pada sektor-sektor prioritas yaitu sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; dan sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian baik dari segi nilai tambah maupun dari segi penyerapan tenaga kerja.

Kiranya di Aceh masih terdapat potensi bagi pengembangan pertanian dalam bidang tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan dan peternakan. Kemungkinan di sektor pertanian kiranya perlu dikaitkan dengan pengembangan sektor industri. Semua peluang yang ada dalam bidang ini perlu dimanfaatkan dalam rangka lebih menyeimbangkan struktur ekonomi di Aceh. Dalam hubungan ini industri yang mengolah hasil-hasil pertanian baik untuk ekspor maupun dalam negeri perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Di samping itu perlu juga diperhatikan potensi industri termasuk industri jasa yang dapat memanfaatkan permintaan yang meningkat sebagai akibat dari tumbuhnya industri kimia dan minyak di Aceh.

Yang penting adalah pertumbuhan industri dan pertanian harus dapat mengurangi kesenjangan produktivitas tenaga kerja di kedua sektor. Salah satu syarat penting untuk mencapai hal tersebut adalah mobilitas yang tinggi dari tenaga kerja pertanian. Mobilitas ini pada saat sekarang masih banyak dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi. Di samping itu sudah tentu pasar tenaga kerja (labour market) harus dapat ditingkatkan efisiensinya sehingga daya tarik sektor industri terasa di daerah pertanian.

Sejauh mana sektor pertanian dan industri di Aceh dapat ditingkatkan agar dapat menjadi motor penggerak bagi keseluruhan pembangunan di Aceh kiranya amat tergantung kepada tersedianya modal dan produktivitas pemanfaatan modal tersebut, tersedianya angkatan kerja terdidik serta produktivitas tenaga kerja tersebut, serta kepada produktivitas dan efisiensi masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat

Indonesia umumnya. Dalam kaitan inilah kiranya perlu dikaji berbagai faktor dan cara untuk meningkatkan dan mengarahkan potensi modal serta sumber daya lainnya untuk mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam rangka transformasi struktur ekonomi di Aceh. Salah satu faktor adalah partisipasi masyarakat bukan saja dalam menetapkan sasaran-sasaran pembangunan tetapi juga dalam mencapai sasaran tersebut. Untuk itu perlu dikembangkan motivasi pembangunan.

Kiranya peningkatan motivasi ini amat penting oleh karena pada saat ini lebih dari masa lalu amat diperlukan penggalangan semua kekuatan yang ada bagi peningkatan pembangunan di Aceh. Khusus yang menyangkut tersedianya modal, amatlah penting untuk menggerakkan partisipasi pengusaha baik swasta besar, menengah dan kecil serta koperasi.

Modal dan sumber daya lainnya tentu akan bergerak ke tempat dengan iklim usaha terbaik. Dalam hubungan ini kegiatan deregulasi dan dibirokratisasi di Aceh perlu ditingkatkan. Saya yakin peluang ini cukup besar yang berarti peluang untuk meningkatkan efisiensi juga cukup besar. Tingkat efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan merupakan salah satu daya tarik yang cukup besar bagi pengusaha yang ingin menanamkan modal, di samping tersedianya tenaga yang terampil dan produktif serta tersedianya prasarana fisik yang memadai. Kepada pemerintah daerah saya mengharapkan, usaha yang telah dirintis dalam menciptakan iklim berusaha dengan berbagai tindakan deregulasi, supaya diikuti juga melalui deregulasi berbagai Perda yang bersifat kurang menguntungkan bagi iklim usaha.

Untuk lebih meratakan pembangunan di daerah pedalaman dan pantai barat Aceh, beberapa kegiatan pembangunan yang telah mulai dilaksanakan akan terus dilaksanakan dalam batas-batas kemampuan keuangan negara. Yang akan mendapatkan prioritas utama adalah pembangunan prasarana perhubungan dan prasarana fisik lainnya, yang akan lebih menjamin terbukanya daerah tersebut bagi kegiatan pembangunan.

Modal dan produktivitasnya adalah penting. Demikian juga tenaga kerja. Namun sejauh mana pertumbuhan dapat

didorong dengan sumber-sumber yang terbatas akan tergantung kepada produktivitas masyarakat itu secara keseluruhan.

Produktivitas masyarakat secara keseluruhan ditentukan oleh banyak faktor tetapi pada intinya hal ini berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal dalam masyarakat bersangkutan. Sejarah menunjukkan semakin maju suatu masyarakat maka semakin tergantung masyarakat tersebut kepada produktivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia dan semakin sedikit kepada pertumbuhan modal dan tenaga kerja dalam arti yang tradisional.

Tantangan-tantangan yang dihadapi sudah pasti membutuhkan inovasi kreatifitas dalam usaha meningkatkan produktivitas masyarakat di daerah. Dalam kaitan inilah kiranya penting untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia melalui lembaga-lembaga yang ada. Musyawarah antara masyarakat kampus, Kadin dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan terobosan-terobosan baru pemecahan masalah di daerah merupakan salah satu kemungkinan pemanfaatan lembaga yang ada. Di masa depan interaksi positif di antara ketiga lembaga ini dan lembaga-lembaga lain akan semakin dibutuhkan.

Penggalangan seluruh potensi pembangunan yang ada di Aceh, kiranya menghendaki komunikasi pembangunan yang efektif sebagaimana yang telah saya kemukakan.

Melalui komunikasi pembangunan yang efektif ini masyarakat di daerah Aceh diajak serta bukan saja untuk mengetahui hasil apa yang telah dicapai dan masalah apa yang masih ada, tetapi sekaligus merasakan kaitan hal-hal ini semua dengan usaha untuk menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik. Melalui komunikasi pembangunan perlu diciptakan motivasi bagi peningkatan partisipasi berbagai golongan masyarakat untuk menopang usaha-usaha pembangunan. Dengan partisipasi yang penuh kesadaran, modal dapat dikerahkan dalam jumlah yang meningkat, produktivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan. Dengan partisipasi yang penuh kesadaran dari semua golongan masyarakat maka sumber-sumber pertumbuhan yang berasal dari sumber daya utama pembangunan, yaitu sumber daya manusia, dapat dimanfaatkan secara optimal. Demikian pentingnya peranan komunikasi pembangunan yang efektif bagi keberhasilan pembangunan.

-Prof. Dr. Saleh Afiff (Menteri Negara Ketua Bappenas).

MEMBANGUN MANUSIA INDONESIA YANG UTUH DAN INTEGRALISTIK

O

L

E

H

Brigjen TNI (Purn) H. Sjamaun Gaharu

MEMBANGUN MANUSIA INDONESIA YANG UTUH DAN INTEGRALISTIK

Oleh :

Brigjen TNI (Purn) H Sjamaun Gaharu

Barangkali, dalam periode pertama kepemimpinan Gubernur Ibrahim Hasan (1986-1981) terobosan yang paling terkenal dilakukannya adalah "membedah" wilayah Propinsi Aceh menjadi dua bagian.

Kebijaksanaan ini diambilnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan potensi alam, **man power**, dan perangkat-perangkat pendukung lainnya. Pembedahan ini kini lazim disebut dengan wilayah (zona) industri (ZI) (meliputi Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, Aceh Besar, Kodya Banda Aceh, dan Sabang), serta wilayah (zona) pertanian (meliputi Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah).

Pembedahan ini, sebagaimana yang sering disebutkan Ibrahim Hasan, tiada lain dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di kedua zona tersebut. Dengan kata lain, kemajuan sektor perindustrian dengan hadirnya proyek-proyek industri raksasa di ZI, terutama Aceh Utara, harus juga didukung oleh kemajuan di bidang pertanian. Bila kita menepi ke keadaan dua zona ini secara substansial, maka tidaklah diartikan di kedua wilayah itu akan ditumbuhkan industri dan pertanian berskala besar, tetapi juga industri-industri kecil dan sektor pertanian yang tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai buruh-tani. Artinya, di kedua sektor ini masyarakat tidak lagi berada di bawah konsep "trickle down efek" yang memang hanya terbatas curahannya.

Saya menilai, pembedahan daerah Aceh dengan dua konsep ini ada baiknya. Tetapi yang perlu diperjelas adalah, kedua konsep ini haruslah dilakukan secara proporsional. Artinya, dengan konsep ini kita berkeinginan untuk menghadirkan masyarakat Aceh sebagai masyarakat industri dan masyarakat agraris yang profesional.

Kalau ini memang tujuannya, maka tiada lain usaha yang harus dilakukan adalah memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat kita, agar mereka betul-betul dapat mengejawantahkan diri untuk menyahuti dua konsep pembangunan di daerah Aceh ini.

Kenyataan yang ada sekarang, masyarakat hanya merasakan ia berkiprah dalam perindustrian, misalnya, bila ia telah bergabung dan tertampung di PT Arun, PT PIM, AAF, dan industri-industri lainnya yang ada di Aceh. Di luar itu, semangat industri seperti yang diinginkan dalam membentuk masyarakat industri belum kelihatan. Ini suatu fenomena yang menunjukkan bahwa pengetahuan berindustri bagi masyarakat kita masih relatif kecil.

Harus diakui, bahwa masyarakat kita, khususnya di Aceh, belum memiliki **industrial minded**, seperti masyarakat Jepang, Taiwan, Singapore, Korea, dan beberapa negara lainnya di Asia. Oleh karena itu, usaha persiapan bagi menyahuti daerah (wilayah) industri haruslah dilakukan. Perlu saya tekankan bahwa konsep yang dicanangkan Ibrahim Hasan dalam periode pertamanya menjadi gubernur ini, belum tersahuti secara menyeluruh. Artinya, kita butuh penjabaran-penjabaran yang lebih operasional. Sehingga kehadiran konsep industri ini memang benar-benar dapat dirasakan masyarakat luas.

Saya tetap berfikir, bahwa pembedahan yang dilakukan Ibrahim Hasan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Oleh karenanya, saya menyarankan agar di bidang perindustrian, masyarakat Aceh diberikan pengetahuan/keterampilan industri, terutama industri menengah dan kerajinan rakyat. Saya kira, sumber daya manusia dan alam di daerah Aceh sangat potensial untuk mendukung usaha ini. Tinggal lagi bagaimana mengejawantahkannya.

Begitu juga di sektor pertanian. Meskipun masyarakat kita telah akrab dengan kehidupan tani, tambahan pengetahuan pertanian yang maju sangat dibutuhkan bagi mewujudkan kehidupan pertanian yang maju di daerah ini. Sebagaimana di bidang perindustrian, sektor pertanian yang terkandung di ZP juga bukan semata-mata ditujukan kepada pertanian besar (perkebunan). Diversifikasi tanaman dan mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak bergantung pada tanaman padi perlu

dilakukan. Sehingga daerah Aceh tidak lagi tergantung pada hasil-hasil pertanian dari daerah luar.

Selain itu, bila kita terperangkap dalam pola pikir bahwa zona pertanian adalah membuka usaha pertanian (perkebunan) berskala besar, kita khawatir bahwa konsep ini hanya akan mengantarkan masyarakat kita sebagai buruh-tani. Kalau demikian halnya, apa yang diharapkan untuk meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah tercapai.

Pendidikan dan Sosbud

Saya menilai, selama kepemimpinan Ibrahim Hasan. masalah pendidikan di Aceh telah maju pesat. Hal ini bisa ditandai dengan perkembangan sekolah-sekolah umum, sekolah agama dan pesantren (dayah). Upaya perbaikan pendidikan, merupakan syarat mutlak untuk mempercepat akselerasi pembangunan di Aceh. Artinya, dengan pendidikanlah akan lahir motor penggerak pembangunan.

Saya berfikir, untuk masa-masa mendatang ada baiknya kalau pendidikan diselaraskan dengan potensi yang ada di Aceh. Contohnya, setelah Aceh dibelah menjadi dua wilayah, ZI dan ZP, perangkat pendukung untuk menopang keberadaan dua zona itu harus ada. Misalnya, dengan membangun lebih banyak sekolah-sekolah kejuruan di bidang perindustrian dan pertanian. Sebagaimana yang telah saya gambarkan di atas, industri dan pertanian yang akan dikembangkan di Aceh, tidak semata-mata berskala besar saja. Oleh karenanya, diperlukan manusia-manusia yang dianggap siap pakai untuk menyahuti kebutuhan kedua zona itu.

Dengan membuka lebih banyak sekolah-sekolah kejuruan di Aceh, kita optimis apa yang terkonsepkan dalam kedua zona itu akan terealisasi. Umpamanya dengan membuka sekolah kejuruan di bidang perindustrian menengah/rumah tangga serta sekolah-sekolah pertanian. Dengan sekolah-sekolah kejuruan, diharapkan akan lahir personil-personil terampil yang tidak tergantung di sektor formal (menjadi pegawai negeri), tapi dengan kemampuan yang ada padanya ia bisa berdikari.

Saya menilai Aceh sangat kaya dengan potensi alam, baik itu hutan, pertambangan, energi dan lain-lain. Tapi sayang kekayaan alam ini kurang ditopang oleh **man power**-nya. Jadi, usaha untuk mengangkat manusianya adalah hal yang perlu

dilakukan, kalau tidak, kekayaan yang ada tidak akan tergarap sepenuhnya.

Di bidang pendidikan keagamaan, saya melihat kondisinya sudah maju di Aceh. Keberadaan agama bagi masyarakat Aceh tidak bisa dilepaskan dari kehidupannya. Dari sisi ini, Ibrahim Hasan telah banyak membawa kemajuan. Salah satu contoh yang bisa diketengahkan adalah tentang upayanya mewajibkan lulusan SD di Aceh agar dapat membaca Al-quran. Ini penting untuk tetap menjaga identitas masyarakat Aceh yang sangat lekat dengan nilai-nilai ke-Islaman.

Dalam skala nasional pun, mempertebal nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. Hal ini disadari bahwa untuk mengantarkan bangsa Indonesia yang modern tidak boleh terlepas dari nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam ajaran yang diyakini masyarakatnya.

Di sosio-budaya, Ibrahim Hasan tampaknya menunjukkan menunjukkan interest yang kuat. Hal itu bisa dicontohkan dengan lahirnya Perda tentang adat. Mengangkat kembali nilai-nilai budaya dan adat di Aceh sangat tepat untuk menghadirkan jatidiri masyarakat Aceh. Jatidiri ini dimaksudkan untuk mempertebal kepercayaan diri dan eksistensi orang Aceh. Tapi perlu diingat, jatidiri ini tetap mempunyai **frame** keindonesiaan. Artinya, wawasan kebangsaan tak boleh dilepaskan dalam kerangka mengangkat harkat dan mertabat manusia Indonesia. Hal ini menjadi penting karena sejak dahulu, para pejuang kita sangat berkeinginan kuat untuk mengintegrasikan berbagai suku yang ada di tanah air yang bercirikan keindonesiaan. Jadi penyuburan budaya dan nilai adat yang ada di daerah, tetap mengacu pada pengkayaan khazanah budaya bangsa.

Jatidiri yang berbekal dari nilai-nilai budaya dan adat, hendaknya diarahkan sebagai pegangan hidup masyarakat Aceh dalam konteks keindonesiaan. Artinya, kita tetap berpola untuk menjaga secara berangsur-angsur dienyahkan. Memang ini tugas berat, tetapi bukan berarti tidak dapat diwujudkan. Apalagi saat ini Aceh sangat ditopang oleh kondisi yang kondusif.

Wawasan Kebangsaan

Sudah menjadi isu nasional, bahwa mempertebal wawasan kebangsaan menjadi syarat mutlak suksesnya pembangunan. Sebab, negara kita tidak hanya menginginkan kesuksesan dalam bidang pembangunan fisik, tetapi juga membangun manusia Indonesia yang utuh secara integralistik dan mempunyai wawasan kebangsaan yang tebal.

Dalam konteks kedaerahan Aceh, saya kira perlu menumbuhkembangkan gairah berbangsa dan bernegara ini dimaksudkan untuk mengantisipasi gejolak keamanan yang terjadi di Aceh. Saya berfikir, gejolak keamanan yang terjadi di daerah ini hanya disebabkan oleh faktor keirian dan sakit hati. Dua faktor ini mungkin berakar dari cara pandang yang sempit dan merasa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. Padahal, kalau mau kita runtut kebelakang, semua tokoh-tokoh Aceh yang telah berjuang mengusir penjajahan di tanah air ini, telah menyatakan kesetiannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendirikan negara kesatuan bangsa, tokoh-tokoh bersama masyarakat Aceh telah banyak memberikan hasilnya. Bahkan tatkala republik ini sedang terancam keutuhannya, Aceh tetap menyatakan kesetiaan terhadap republik yang baru lahir ini. Sumbangsih masyarakat Aceh sangat besar. Bisa dicatat dengan upaya masyarakat Aceh yang mengumpulkan dana untuk membeli pesawat terbang, yang digunakan pemerintah pusat untuk mencari dukungan luar negeri. Makanya tak heran, bila ketika itu Aceh diberi gelar dengan daerah modal.

Maka dengan adanya latar belakang historis ini, saya cenderung mengatakan bahwa apa yang terjadi di Aceh dalam dua tahun belakangan ini (oleh pemerintah disebut GPK = Gerakan Pengacau Keamanan Aceh, *red.*) lebih disebabkan oleh keirian dan sakit hati. Orang-orang yang iri dan sakit hati ini berusaha mempengaruhi masyarakat dengan menjelek-jelekkan pemerintah. Oleh karena masyarakat di desa kita masih tergolong awam, agitasi yang dilakukan kelompok sakit hati ini termakan oleh mereka. Sehingga meruaklah kondisi yang tak menguntungkan itu.

Menurut pengamatan saya, gairah berbangsa dan bernegara dapat dilakukan pemerintah dengan jalan melakukan

pendekatan (approach) secara kontinu dan terarah kepada masyarakat.

Pemerintah harus terus berupaya membina komunikasi secara berkesinambungan. Bila ini dilakukan, saya yakin apa yang terjadi saat ini tidak akan terulang kembali.

Sebagai orang yang dibesarkan dalam tradisi kemiliteran, saya tak melihat gerakan yang muncul akhir-akhir ini mempunyai tujuan yang jelas. Berbeda halnya dengan gerakan DI/TII dan Aceh Merdeka dulu. Kalau DI/TII para tokohnya berkeinginan untuk mendirikan negara Islam, dan Aceh Merdeka menginginkan kemerdekaan daerah Aceh dari negara kesatuan RI. Jadi, saya tak melihat adanya tujuan yang jelas dari gerakan yang timbul di dekade 90-an ini.

Tadi saya sebutkan, masyarakat kita mudah termakan oleh agitasi kelompok sakit hati ini. Mengapa? Saya menilai mereka tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan itu, lebih disebabkan belum adanya kesiapan mental masyarakat dalam menyahuti derap pembangunan yang dilaksanakan. Oleh sebab itu, akselerasi kesiapan mental masyarakat harus terus dipacu seiring dengan derasnya pelaksanaan pembangunan. Kesiapan mental itu dapat dilakukan dengan peningkatan pendidikan masyarakat.

Upaya lain untuk mengantisipasi agar masalah ini tak terulang kembali di masa mendatang, adalah dengan mengupayakan pengabdian pemerintah dari tingkat atas sampai ke bawah (desa) harus betul-betul dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus ditanamkan, sehingga mereka tidak mudah tergoda. Kalau ini dilakukan, kita yakin, hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan terjalin kuat. Artinya, masyarakat merasakan dirinya dekat dengan pemerintah.

** Syamaun Gaharu Brigjen (Purn)
Mantan Pangdam -I Iskandar Muda*

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI DAERAH ISTIMEWA ACEH

O

L

E

II

DR. DAYAN DAWOOD, MA

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Oleh :

DR. DAYAN DAWOOD, MA

Ketua Pusat Pengembangan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Syiah Kuala.

I

PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Aceh merupakan sebuah propinsi yang unik dan mempunyai peranan yang cukup penting bagi pembangunan nasional, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan dicapai. Ini beralasan, dan sejarah membuktikannya, berangkat sebagai sebuah daerah yang menjadi modal dalam perjuangan di masa lampau tumbuh menjelma menjadi daerah modal bagi pembangunan pada saat sekarang ini.

Bila kita amati pola produksi dan struktur ekonomi Propinsi Daerah Istimewa Aceh pun relatif hampir tidak begitu jauh berbe da dengan pola produksi dan struktur ekonomi Nasional.

Dilihat dari sudut keluaran ataupun komoditi yang dihasilkan, propinsi ini ternyata memiliki beberapa sektor utama yang memegang peranan relatif besar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto yaitu sektor pertanian, pertambangan dan industri. Dengan kontribusinya terhadap total PDRB dalam periode 1983-1985 bervariasi antara 85-90 % pertahunnya (harga konstan 1983).

Bahkan peranan sektor pertambangan ini cukup berarti dalam pembentukan devisa negara, yaitu dalam 5 tahun terakhir diperkirakan bervariasi antara 12-17 % per tahunnya, terhadap total nilai ekspor Indonesia (US \$ 14,8 miliar ; yang terdiri dari migas US \$ 7,8 miliar dan non migas sebesar \$ 7 miliar, pada tahun 1986). Ekspor di Aceh diperkirakan US \$ 2,6 miliar (1986), yang berarti 17,5 % dari nilai ekspor Nasional.

Sedangkan sektor pertanian juga memainkan peranannya yang relatif besar (di luar migas), karena selain kontribusi yang besar terhadap pembentukan PDRB Aceh, yaitu antara 45-50 % (tanpa migas), tetapi ia juga memberi nafkah kepada sekitar 70

% dari penduduk daerah ini, dalam usahanya menghasilkan barang pertanian baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Dominasi sektor pertanian, pertambangan dan industri dalam struktur ekonomi Aceh ditinjau dari dimensi spasial/regional telah menunjukkan kecenderungan perkembangan dan arah pertumbuhan propinsi ini dalam dua zona yang berbeda, yaitu : (1) Zona industri dengan masyarakat yang "lebih maju", dan (2) Zona pertanian dengan masyarakat yang "masih bersahaja".

Pengamatan memperlihatkan, bahwa perkembangan pembangunan antara kedua zona tersebut relatif tidak berimbang dan memperlihatkan kontras yang relatif menyolok dilihat dari segi ekonomi, teknologi, penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Seiring dengan itu muncul pula berbagai masalah baru yang memberi peluang untuk mencari terobosan, dalam upaya meningkatkan keseimbangan, keterpaduan dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya ke seluruh pelosok wilayah. Sebagai akibat ketidak seimbangan pembangunan, baik ditinjau secara sektoral maupun secara spasial di kedua zona, telah menyebabkan terjadinya perpindahan tenaga produktif dari sektor pertanian ke kawasan tersebut.

Agar pola pembangunan daerah tidak hanya terpusat/terkonsentrasi di daerah zona, maka Pemerintah Daerah berhasrat menyeimbangkan pembangunan di masa-masa mendatang sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan daerah. Dengan perkataan lain, pembangunan zona industri yang sedang giat-giatnya dilaksanakan perlu diimbangi dengan pengembangan zona pertanian karena pembangunan pertanian akan berpengaruh secara langsung dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Bertitik tolak pada gambaran tersebut, dikaitkan dengan kondisi perkembangan dewasa ini, maka dipandang tepat upaya memilih strategi pertanian sebagai pendobrak lingkaran keterbelakangan ekonomi bagi Daerah Istimewa Aceh, disamping strategi industrialisasi yang kini giat berkembang di kawasan Aceh Utara.

Oleh karena itu, maka makalah ini akan cenderung lebih membahas mengenai ketidakseimbangan arah pembangunan di Daerah Istimewa Aceh serta strategi dan usaha penanggulangannya di masa mendatang.

II

GAMBARAN UMUM KEADAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH

Daerah Istimewa Aceh mempunyai luas wilayah sekitar 55.390 km², yang terletak di ujung Barat Laut pulau Sumatera, dan lebih kurang 2,88 % dari luas seluruh Indonesia.

Luas tanah yang secara potensial dapat digunakan untuk pertanian di daerah ini diperkirakan 2.411.194 hektar. Tanah yang telah dimanfaatkan terdiri dari tanaman pangan seluas 233.698 hektar, dan padang rumput/alang-alang seluas 432.000 hektar. Jadi tanah yang telah dimanfaatkan untuk pertanian adalah seluas 989.338 hektar atau baru sekitar 41 % dari tanah pertanian yang telah tersedia.

Pertumbuhan penduduk Daerah Istimewa Aceh tergolong relatif tinggi bila dibanding angka pertumbuhan penduduk Nasional. Sejak Pelita I hingga awal Pelita III (1971-1980) pertumbuhan penduduknya mencapai 2,96 % per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk nasional adalah 2,35 % . Tragisnya pada periode Pelita II sampai dengan akhir Pelita IV (1979-1986) menurut angka registrasi penduduk yang dilakukan oleh Kantor Statistik Propinsi Daerah Istimewa Aceh angka ini meningkat menjadi 3,17 % per tahun.

Pertumbuhan angkatan kerja di daerah ini mencapai sekitar 5,64 % per tahun, kesempatan kerja berkembang hanya 5,58 % per tahun, sedangkan penganggurannya tumbuh dengan 9,13 % per tahun. Merupakan sebuah tantangan bagi pembangunan yang bersifat menyerap tenaga kerja untuk Pelita V yang akan datang.

Dalam PDRB Aceh selama periode 1975-1983 (harga konstan 1975) tercatat laju pertumbuhan ekonomi 8,79 % rata-rata per tahun (non migas). Sedangkan selama periode 1983-1985 pertumbuhan ekonomi (harga konstan 1983) hanya 5,28 % rata-rata per tahun (non migas).

Sektor pertanian memegang peranan cukup penting dan menyumbang sebesar 48,9 % dalam PDRB Aceh (tahun 1984) bila tanpa migas, namun bila dibanding tahun 1975 sumbangannya menurun sebesar 7,9 %. Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan yang meningkat dari 11,8 % (1975) menjadi 15,6 % (1984), sektor pengangkutan dan komunikasi dari 9,4 % (1975) naik menjadi 14,3 % (1984), kecuali sektor pemerintahan turun dari 10,00 % menjadi 7,6 % (1984), sedangkan beberapa sektor lain relatif lebih kecil kontribusinya (lihat lampiran -1)

Walaupun PDRB Aceh memperlihatkan peningkatan yang cukup baik, sekitar 8,6 % rata-rata per tahun (harga konstan 1983) antara tahun 1983-1985, tetapi pertumbuhan sektor pertanian mengalami penurunan rata-rata 2,1 % per tahunnya selama periode tersebut.

Struktur ekonomi Daerah Istimewa Aceh memang telah mengalami perubahan. Bila sampai dengan paruh pertama tahun 1970-an struktur ekonomi didominasi oleh sektor pertanian maka setelah periode tersebut sektor pertambangan (migas) telah menggantikan sektor pertanian sebagai kontributor utama dari PDRB (termasuk minyak bumi). Pada tahun 1975 terlihat bahwa sektor pertanian menyumbang 47,3 % sedangkan sektor pertambangan (migas) baru sekitar 16,7 %. Namun pada tahun 1984 keadaan menjadi sebaliknya, dimana sumbangan sektor pertambangan (migas) melonjak drastis menjadi 68,6 %. Peningkatan di sektor pertambangan ternyata tidak diikuti oleh berbagai sektor lainnya. Misalnya, sektor perdagangan turun dari 9,8 % (1975) menjadi 4,9 % (1984), sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami hal yang serupa dari 7,8 % (1975) menjadi 4,5 % (1984), sektor pemerintahan dari 8,3 % (1975) menjadi 2,4 % (1984). Satu-satunya sektor yang mengalami peningkatan adalah sektor Bank dan Lembaga Keuangan lain, dari 0,1 % (1975) naik menjadi 0,3 % (1984). Lihat lampiran-2.

Sedangkan bila ditinjau perkembangan perekonomian antara ke dua zona pembangunan di Daerah Istimewa Aceh memperlihatkan kondisi yang saling berbeda, kontras dan relatif menyolok.

Zona industri, yang terletak disepanjang pantai Utara sampai Timur dengan luas wilayah 19.170 km² menunjukkan perkembangan yang sangat cepat dibanding zona pertanian.

Penemuan minyak bumi dan gas alam di kawasan tersebut telah menyebabkan pembangunan di daerah ini relatif cukup

menonjol, khususnya di Aceh Utara. Munculnya beberapa industri kimia dasar seperti eksplorasi Kilang LNG Arun, Pabrik Asean Aceh Fertilizer, Pabrik Pupuk Iskandaar Muda, sedang dibangunnya Pabrik Kertas Kraft Aceh, Kilang LPG, dan adanya pengeboran minyak oleh Mobil Oil, telah membawa dampak positif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan tersebut, mempercepat laju pertumbuhan daerah serta meningkatkan peranan sektor industri dalam struktur perekonomian daerah. Proses produksi di sektor pertambangan dan industri terutama yang menyangkut dengan minyak bumi dan gas alam berlangsung dalam suasana teknologi canggih, padat modal, dan relatif kurang padat karya.

Jumlah penduduk di zona ini mencapai 67 % dari jumlah penduduk propinsi ini. Mengalirnya penduduk ke daerah ini mengakibatkan tingkat kepadatannya 104 jiwa/km², dan kemudian daerah ini juga memberikan kesempatan kerja kepada sekitar 77 % dari jumlah pekerja di propinsi ini.

Tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat relatif lebih baik dibanding zona pertanian, tercermin dari tingginya index mutu hidup dan index kesejahteraan daerah ini.

Keadaan prasarana perhubungan dan komunikasi relatif baik. Fasilitas kesehatan berupa dokter tenaga medis dan fasilitas tempat tidur, dari keseluruhan yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Aceh lebih dari 70 % tersedia di zona ini.

Adanya pembangunan industri telah timbul perubahan dalam sistem dan nilai ekonomi. Bentuk-bentuk sumber pendapatan masyarakat dari pertanian, perikanan, peternakan sebagai sumber pokok bagi masyarakat sebelum adanya industri telah mengalami kemunduran baik dari segi jumlah maupun nilainya. Dalam alam industri, muncul sumber-sumber pendapatan baru yang bervariasi, namun mata pencaharian yang dalam bentuk penerimaan imbalan jasa (karyawan industri, karyawan kontraktor, tukang, supir, buruh tidak menentu/mocok-mocok dan sebagainya) merupakan mata pencaharian pokok bagi masyarakat sekarang ini. Berkembangnya kegiatan industrialisasi menumbuhkan dan berkembangnya berbagai jenis perusahaan dengan berbagai bidang usaha. Dari keseluruhan jumlah perusahaan di Daerah Istimewa Aceh yang bergerak dalam bidang industri, konstruksi, perdagangan dan angkutan ternyata lebih dari 70 % berdomisili di zona ini

(perusahaan industri : 74 %, kontruksi : 80 %, perdagangan : 72 %, angkutan : 76 %).

Menurut "Keblen" sebagaimana yang dikutip oleh "Soemardjan", bahwa penemuan-penemuan dan inovasi teknologi akan menimbulkan perubahan masyarakat dalam berfikir dan bertindak, apalagi jika diterapkan dalam skala yang cukup besar.

Keadaan yang kurang menggembirakan terjadi di daerah zona pertanian, yang terletak di sepanjang pantai Barat dan Selatan, pada hal daerah ini memiliki luas wilayah hampir dua kali luas wilayah industri, yaitu 36.220 km².

Laju perkembangannya jauh tertinggal bila dibanding pesatnya perkembangan pembangunan yang terjadi di zona industri. Tingkat kepadatan penduduk relatif cukup jarang dibanding luas wilayahnya yaitu 23 jiwa per km², dengan index mutu hidup dan index kesejahteraan yang masih rendah.

Keadaan prasarana meliputi perhubungan darat, komunikasi masih relatif kurang baik, ditambah fasilitas kesehatan berupa dokter tenaga medis, tempat tidur yang sangat terbatas pula. Proses produksi yang masih bersahaja dengan teknologi padat karya serta diwarnai oleh kehidupan masyarakat relatif tradisional dengan norma-norma dan tradisi-tradisi lama yang sudah menyatu dengan hidupnya.

III

PERKEMBANGAN EKSPOR KOMODITI NON MIGAS DAN PROSPEKNYA DI MASA DATANG

A. Perkembangan Ekspor Non Migas.

Ekspor komoditi Daerah Istimewa Aceh menunjukkan bahwa sampai dengan saat sekarang ini masih didominasi oleh minyak dan gas bumi (migas), sedangkan kemampuan ekspor komoditi di luar migas relatif masih sangat kecil.

Komoditi migas (LNG dan Arun Condensate) menyumbang sekitar 94,32 % (1980 dari total ekspor daerah ini, naik menjadi 97,05 % pada tahun 1986 (dengan rincian LNG 58, 65 % dan Arun Condensate 38, 40 %).

Sedangkan dalam jajaran ekspor non migas, daerah ini memiliki beberapa jenis komoditi kuat antara lain : kopi, karet,

kelapa sawit, kayu (perkebunan) serta udang (perikanan) yang menunjukkan peningkatan akhir-akhir ini. Komoditi-komoditi tersebut di atas telah memainkan peran cukup berarti bagi kegiatan perdagangan daerah selama ini.

Kopi masih memegang peranan penting. Pada tahun 1980 share kopi sebesar 1,44 % dari total ekspor dengan nilai US \$ 27.484.727,73. Sedangkan pada tahun 1986 naik menjadi 2,03 % dengan nilai ekspor US \$ 53.437.011,93.

Karet juga masih mampu memberikan peran berarti. Pada tahun 1980 sharenya adalah 0,02 % dari total ekspor dengan nilai US \$ 401.152,73, kemudian meningkat tajam menjadi 0,22 % (1985) dengan nilai US \$ 5.196.975,91. Namun pada tahun 1986 sharenya turun menjadi 0,02 % dengan nilai ekspor US \$ 548.618,32.

Penurunan dialami oleh komoditi kelapa sawit. Jika tahun 1980 sharenya mencapai 0,76 % dari total ekspor dengan nilai US \$ 14.399.738,75, maka pada akhir Pelita IV (1986) turun menjadi 0,02 % dengan nilai US \$ 518.432,32.

Demikian juga dengan komoditi kayu. Pada tahun 1980 sharenya mencapai 2,29 % dari total ekspor dengan nilai US \$ 43.524.465,49 dan merupakan penyumbang terbesar dari ekspor non migas. Namun pada tahun 1986 sharenya hanya tinggal 0,19 % dengan nilai US \$ 5.123.761,89. Ini mungkin disebabkan oleh kebijaksanaan Pemerintah membatasi ekspor kayu bulat demi diversifikasi ekspor.

Keadaan menggembirakan dialami komoditi udang. Pada tahun 1980 sharenya baru sekitar 0,10 % dari total ekspor dengan nilai US \$ 1.941.399,67, namun pada tahun 1986 naik menjadi 0,11 % dengan nilai US \$ 2.964.448,76. Dan keadaan ini terus menaik sampai dengan saat sekarang ini.

Disamping itu perkembangan beberapa jenis komoditi lain di luar "lima besar" komoditi kuat tersebut juga memperlihatkan keadaan yang menggembirakan pada akhir-akhir ini, walaupun tidak terlepas dari berbagai kemungkinan fluktuasi seperti pala, minyak nilam dan lain sebagainya. (lihat lampiran-3).

B. Prospek Ekspor Komoditi Non Migas.

Berdasarkan gambaran di atas dan menurut hasil realisasi nilai dan share seluruh komoditi ekspor daerah ini, dapat diambil kesimpulan bahwa walaupun sumbangan komoditi non migas masih relatif kecil bagi penerimaan devisa daerah, namun

prospek dan peluang di masa datang cukup baik dan memberi harapan besar bila ditanggapi secara terpadu dan sungguh-sungguh baik oleh pihak pemerintah maupun swasta, mengingat potensi sumber daya yang tersedia relatif cukup besar.

K O P I

Secara nasional, kopi adalah salah satu komoditi ekspor Indonesia yang memegang peranan strategis. Dewasa ini sekitar 10 % devisa ekspor non migas berasal dari ekspor biji kopi, dan penghasil devisa ekspor non migas nomor tiga terbesar setelah kayu (23 %) dan karet (17 %). Tahun 1981, ekspor kopi Indonesia mencapai 345,90 juta US \$, naik menjadi sebesar 427,20 juta US \$ (1983) dan meningkat lagi menjadi 565, 20 juta US \$ pada tahun 1984.

Dalam jajaran ekspor non migas Daerah Istimewa Aceh, kopi merupakan penyumbang devisa terbesar. Pada tahun 1984 sharenya 47,73 % dari total ekspor non migas dengan nilai sebesar 34,3 juta US \$, naik menjadi 53,1 % dengan nilai sekitar 38,4 juta US \$ pada tahun 1985 dan terus meningkat menjadi 68,8 % dengan nilai 53,4 juta US \$ pada tahun 1986.

Untuk tahun-tahun mendatang ekspor kopi diperkirakan masih dapat ditingkatkan mengingat luas areal perkebunan kopi rakyat di daerah ini cukup besar, yaitu 59.760 hektar (tahun 1986).

K A R E T

Walaupun komoditi ini relatif kecil sumbangannya dalam jajaran ekspor non migas Daerah Istimewa Aceh, namun untuk masa yang akan datang prospeknya cukup baik dan diperkirakan masih mampu bertahan sebagai komoditi andalan mengingat kestabilan penerimaan eksportnya relatif baik, kecuali keadaan pada tahun 1986.

Pada tahun 1984 sharenya adalah 6,73 % dengan nilai 4,8 juta US \$, naik menjadi 7,2 % dari total ekspor non migas dengan nilai ekspor 5,2 juta US \$ (1985), dan kemudian turun menjadi 0,7 % pada tahun 1986 dengan nilai 0,5 juta US \$.

Luas areal perkebunan karet terlihat cukup besar untuk menunjang ekspor komoditi ini di masa mendatang, yaitu lebih kurang 38.594 hektar, yang pada umumnya dikelola oleh perkebunan besar.

KELAPA SAWIT

Pada tingkat nasional, komoditi ini pernah mendapat julukan "primadona". Namun dari tahun ke tahun ternyata komoditi ini kerap mengalami fluktuasi. Pada tahun 1981 ekspor kelapa sawit Indonesia mencapai 106,90 juta US \$, turun menjadi 96,20 juta US \$ pada tahun 1982, meningkat lagi pada tahun 1983 menjadi 111,50 juta US \$, akan tetapi pada tahun 1984 turun hingga menjadi 63,30 juta US \$ dan sampai dengan triwulan ke III tahun 1985 mencapai 111,70 juta US \$.

Laju ekspor komoditi kelapa sawit Daerah Istimewa Aceh juga kerap mengalami keadaan yang kurang menggembirakan dalam beberapa tahun belakangan ini. Sampai dengan Pelita III sharenya masih cukup besar yaitu 9,8 % dari total ekspor non migas dengan nilai 29,6 juta US \$, namun memasuki akhir Pelita IV peranannya semakin kecil. Tahun 1984 sharenya adalah 0,13 % dengan nilai 0,1 juta US \$, naik menjadi 2,6 % pada tahun 1985 dengan nilai ekspor 2,0 juta US \$, kemudian turun lagi pada tahun 1986 dengan share 0,7 % dan nilai ekspor 0,5 juta US \$.

Dengan usaha peremajaan kembali perkebunan kelapa sawit dengan luas areal sekitar 38.445 hektar, maka diperhitungkan komoditi ini masih mampu menjadi andalan ekspor non migas daerah ini di masa mendatang.

KAYU

Komoditi kayu sejak Pelita I sampai dengan awal Pelita IV merupakan penyumbang devisa terbesar dari ekspor non migas Daerah Istimewa Aceh. Namun memasuki akhir Pelita IV peranannya secara perlahan-lahan telah digantikan kedudukannya oleh komoditi kopi. Selama Pelita III misalnya, kayu masih mampu menyumbang sekitar 50,1 % dari total ekspor non migas dengan nilai 151,8 juta US \$.

Pada tahun 1984 sharenya hanya 14,21 % dari total ekspor non migas dengan nilai 10,2 juta US \$, turun menjadi 9,8 % dengan nilai 7,0 juta US \$ pada tahun 1985, dan pada tahun 1986 turun lagi menjadi 6,6 % dengan nilai ekspor 5,0 juta US \$.

Diperkirakan dengan usaha peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi ekspor sumbangan komoditi ini akan lebih besar dan masih dapat diperhitungkan dalam ekspor non migas Daerah Istimewa Aceh.

UDANG

Ekspor udang menunjukkan trend yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, dengan demikian prospek komoditi ini cukup baik di masa mendatang. Secara nasional, ekspor komoditi ini mencapai 162,70 juta US \$ pada tahun 1981, naik menjadi 181,40 juta US \$ pada tahun 1982, tahun 1983 sebesar 193,90 juta US \$ dan naik terus hingga mencapai 195,50 juta US \$ pada tahun 1984.

Ekspor udang Daerah Istimewa Aceh juga terus meningkatkan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1980 ekspornya menyumbang 2,18 % dari total ekspor non migas dengan nilai ekspor 1,94 juta US \$, naik menjadi 3,17 % dengan nilai 2,28 juta US \$ pada tahun 1984 dan naik lagi hingga mencapai 3,81 % dengan nilai 2,96 juta US \$ pada tahun 1986.

Prospek beberapa komoditi lemah lainnya disamping komoditi-komoditi kuat tersebut di atas relatif cukup memberikan harapan besar bila ditangani secara baik, seperti pala, minyak atsiri, arang kayu, minyak nilam, dan lain sebagainya, mengingat dari beberapa komoditi tersebut tendensi ekspornya relatif mengalami peningkatan dari tahun tahun ke tahun.

IV

STRATEGI DAN USAHA PENGEMBANGAN

Menghadapi situasi dunia perekonomian dunia yang kurang begitu menggembirakan dewasa ini sudah barang tentu menampilkan tantangan yang berat bagi negara berkembang yang amat berkepentingan dalam memasarkan komoditi ekspornya, yang sebagian besar berupa komoditi primer, Indonesia adalah salah satu daripadanya.

Dalam situasi sulit seperti sekarang ini memerlukan berbagai terobosan seperti strategi pengembangan bagi komoditi secara tepat dan terarah, dan penguasaan pasar serta usaha peningkatan produktivitas sumber daya produksi secara optimal. Peranann pemasaran yang kreatif dan dinamis (di dalam dan luar negeri) merupakan persoalan penting dan harus dikedepankan dalam upaya menghadapi masa sulit ini.

Usaha atau strategi pemasaran yang inovatif sifatnya sangat menentukan dalam menerobos dan menguasai pasar. Kejelian, kemampuan menganalisa pasar dan kemampuan mengadakan prediksi/melihat ke depan merupakan faktor utama yang dituntut dalam usaha ini. Tentunya semua upaya ini harus didukung oleh berbagai fasilitas penunjang baik berupa prasarana dan sarana termasuk lembaga pemasaran dan wahana promosi.

Seiring dengan keadaan perekonomian nasional yang menghadapi beban cukup berat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan, alternatif lain harus diupayakan sebagai konsekwensi penurunan penerimaan negara dari sektor utama minyak dan gas bumi dalam beberapa tahun belakangan ini. Kemerosotan yang tajam dari pada harga sejumlah komoditi ekspor, telah mengakibatkan memburuknya secara pembayaran Indonesia dalam tahun 1986/1987, terutama neraca transaksi berjalan (yaitu selisih lalu lintas devisa antara ekspor dan jasa dengan devisa untuk impor dan jasa serta bunga pinjaman). Berakibat pada penurunan dalam pertumbuhan ekonomi dari 6,1 persen (1984) menjadi 3,2 persen (1986), walaupun tidak menderita pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Usaha meningkatkan gerak laju pembangunan yang berorientasi pada peningkatan perkembangan perekonomian daerah agar kemampuannya meningkat, memperkecil ketimpangan antar daerah, dan pendayagunaan sumber daya (agar penerimaan devisa bertambah) merupakan beberapa langkah penting yang harus mendapatkan perhatian secara bersungguh-sungguh dalam proses membantu dan memperingan "beban berat" perekonomian nasional dewasa ini, bahkan untuk masa yang akan datang.

Dianggap pentingnya peningkatan kemampuan perekonomian daerah adalah dapat dipahami, mengingat potensi ekonomi yang dimiliki/tersedia relatif cukup besar pada masing-masing daerah. Dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada tersebut akan dapat memberikan efek multiplier baik bagi daerah itu sendiri maupun bagi kepentingan nasional, kelanjutannya tentu akan turut membuka kesempatan kerja yang dirasakan kian mendesak dan mengharuskan perhatian yang lebih serius.

Sebenarnya, potensi sumber daya ekonomi di Daerah Istimewa Aceh relatif cukup besar terutama di sektor pertanian,

disamping sektor pertambangan dan industri yang telah dikenal akan kemampuannya.

Namun, infrastruktur yang kurang memadai seperti perhubungan darat, komunikasi serta berbagai fasilitas lainnya mengakibatkan perkembangan perekonomian daerah ini mengalami banyak hambatan dan relatif tertinggal bila dibanding dengan propinsi lain di Indonesia yang telah mulai memacu perkembangan perekonomian melalui pembangunan di berbagai sektor.

Dalam aktivitas perekonomian/perdagangan ketergantungan Daerah Istimewa Aceh terhadap Propinsi Sumatera Utara relatif cukup besar, kebobolan dalam artian "pelarian modal" dan "nilai tambah" dari komoditi sering tidak dapat diperoleh daerah ini (baca Aceh), hampir sebagian besar kebutuhan dalam bentuk bahan phisik bangunan atau proyek, dan bahan material lainnya hingga sampai pada kebutuhan konsumsi umumnya didatangkan dari daerah luar (baca Sumatera Utara).

Bagi keperluan ekspor berbagai komoditi terutama ekspor noon migasnya, hampir sebagian besar menggunakan jasa pelabuhan Belawan (Sumatera Utara) dengan fasilitas sarana ekspornya yang lebih lengkap dibanding yang tersedia di daerah ini.

Implikasinya : nilai tambah" komoditi tersebut tidak dapat dikecap dan dinikmati oleh daerah asal. Dan "ketergantungan" ini lebih terasa lagi oleh daerah di sepanjang pantai utara dan timur Daerah Istimewa Aceh.

Tanpa disadari, dalam kurun waktu begitu lama daerah ini telah menjelma sebagai "hinterland" dari Sumatera Utara.

Berdasarkan faktor potensi ekonomi dan geografis daerah, Daerah Istimewa Aceh dibagi ke dalam 2 (dua) zona pembangunan, yaitu zona industri dan zona pertanian.

Perkembangan selama ini memperlihatkan, munculnya beberapa "large scale industries" di zona industri kurang menciptakan "keterkaitan" dengan berbagai industri kecil lain yang ada di kawasan zona.

Sebagai sebuah daerah yang pada dasarnya merupakan daerah ekonomi pertanian "tradisional" yang bersifat padat karya, rendah moral dan mengandalkan sumber daya alam semata, tidak begitu tersentuh oleh kehadiran "large scale industries". Dalam penggunaan sumber alam "akstraktif" hanya

terbatas disekitar beberapa industri besar BUMN saja, industri-industri kecil (small scale industries) dengan berbagai keterbatasannya relatif kurang mampu menjangkaunya, apalagi menggunakan produksi ekstraktif tersebut untuk orientasi ekspor. Kurangnya "industri terkait" terlihat bahwa dari sekitar 3674 buah industri kecil yang ada di zona industri (Aceh Utara) lebih dari 80 % berbentuk industri kerajinan (2.994 buah), diikuti industri jasa (12,27 %), industri bahan bangunan (4,33 %), dan industri bahan makanan (1,90 %) keadaan pada tahun 1987.

Berkembangnya industrialisasi juga telah menimbulkan kesenjangan-kesenjangan, terutama di kawasan zona industri. Dalam bidang ekonomi, industrialisasi menimbulkan kesenjangan dalam pekerjaan dan pendapatan. Nilai sosial tertinggi bagi pekerjaan masyarakat sekarang ini adalah pekerjaan di dalam industri, walaupun hanya sedikit sekali anggota masyarakat yang dapat memperoleh kesempatan bekerja dalam bidang tersebut, sedangkan pekerjaan yang nilai sosialnya sangat rendah adalah buruh tidak menentu (mocok-mocok), dan di kalangan anggota masyarakat inilah yang terbanyak jumlahnya. Dalam pendapatan, bagi mereka yang bekerja pada industri, disamping pendapatannya tinggi, sifat menentu atau tetapnya penghasilan dinilai tinggi pula, sedangkan bagi buruh tidak menentu (mocok-mocok), petani, dan buruh tani penghasilan yang diperolehnya selalu tidak mencukupi.

Seperti yang disebutkan "Schoorl", bahwa dalam masyarakat modern akan timbul klas-klas sosial sehingga klas rendah seperti petani, penyewa tanah, buruh tani akan mengalami kemunduran yang berarti berkurang jumlah dan nilainya. Sebaliknya klas menengah seperti buruh industri, klas intelek dan manager industri bertambah besar dan penting artinya.

Sedangkan kesenjangan dalam bidang sosial budaya, terbukti pengetahuan masyarakat masih minim. Minimnya pengetahuan tersebut mengakibatkan tidak mudahnya masyarakat menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan yang terus melaju, terbukti bahwa hampir dalam segala sektor yang mandatkan penghasilan sesuai dengan perkembangan industri (karyawan industri sampai dengan penjual di pasar) terdapat lebih banyak pendatang. Rendahnya pengetahuan masyarakat terlihat pula dalam tingkah laku yang belum

sepenuhnya mencerminkan masyarakat yang telah maju, terbukti dari kurangnya pemeliharaan lingkungan kehidupan serta perencanaan hidup dan pemanfaatan waktu mereka dalam kegiatan sehari-hari.

Bertitik tolak atas dasar itu dan seiring dengan laju perkembangan ekonomi yang tumbuh pesat di kawasan zona industri, berbagai usaha penciptaan "iklim keterkaitan" antara industri besar dengan industri-industri kecil terutama dalam penyebaran penggunaan gas alam bagi kepentingan kegiatan industri kecil perlu diupayakan, disamping mendirikan "industri terkait" lainnya, mengingat dampaknya akan dapat memberikan nilai tambah lebih besar bagi perkembangan ekonomi daerah, memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan, dan memperluas kerja di sektor tersebut. Termasuk usaha memperkecil kesenjangan dalam bidang sosial ekonomi dan sosial budaya, agar perkembangan kemajuan di kawasan tersebut tidak timbul dan diwarnai oleh konflik-konflik sosial.

Mengalirnya tenaga kerja produktif di sektor pertanian ke kawasan industri telah mengakibatkan "terlantarnya" sebagian besar lahan pertanian yang sebelumnya merupakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Perlunya usaha mengembalikan "tenaga produktif" tersebut ke sektor pertanian dengan menciptakan kawasan industri sebagai "pasar" bagi produksi pertanian, mengingat zona industri juga memiliki potensi relatif besar di sektor pertanian. Dari keseluruhan luas areal persawahan yang tersedia di Daerah Istimewa Aceh terlihat sekitar 63 % dimiliki zona industri, dengan produksi padi mencapai 70 % dari total produksi propinsi ini (lihat lampiran-4), dan tingkat produktifitas yang lebih tinggi dibanding dibanding zona pertanian.

Bila dibanding zona industri, perkembangan perekonomian daerah zona pertanian relatif tertinggal jauh. Dari sudut potensi ekonomi sebenarnya daerah ini tidaklah kalah dibanding zona industri. Dalam produksi per hektar untuk beberapa komoditi menurut sektor tanaman pangan dan perkebunan menunjukkan bahwa zona pertanian mempunyai hasil per hektar yang lebih tinggi (lihat lampiran-5).

Dari keseluruhan ekspor Daerah Istimewa Aceh untuk beberapa komoditi perkebunan seperti karet, kelapa sawit, dan kopi masing-masing 45,6 %; 43 %; dan 71 % dihasilkan daerah ini.

Namun, keunggulan komperatif dalam artian faktor "endowments" statis yang berjalan selama ini dan perhatian kelompok wira usaha (entrepreneur) dari pihak swasta yang relatif belum tertuju ke daerah ini mengakibatkan zona pertanian masih terpaku dalam keterbelakangannya.

Mengandalkan keunggulan komperatif suatu daerah dari suatu jenis komoditi yang dimiliki hendaknya lebih dinamis sifatnya, tidak pada artian perbedaan faktor endowments yang statis, seperti yang dimaksud "Hollins B. Chenery". Sedangkan dinamika keunggulan komperatif itu sendiri sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain adalah kemampuan produsen meningkatkan nilai tambah komoditi yang dihasilkan, peningkatan produktifitas faktor produksi dan kualitas komoditi melalui penguasaan teknologi canggih dan kecekatan dalam pemasaran hasil. Faktor peningkatan nilai tambah komoditi, terkait dengan penciptaan diversifikasi dan variasi yang luas dari komoditi perdagangan untuk mewujudkan keinginan dan kepuasan dari pihak konsumen.

Oleh karenanya berbagai terobosan baru hendaknya perlu dilakukan sebagai usaha untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah, dengan demikian gerak lamban daerah zona pertanian yang relatif masih bergelut dengan proses produksi yang "bersahaja" akan dapat dipacu untuk lebih berkembang dan terbuka, apalagi mengingat produksi daerah ini berupa komoditi ekspor tradisional/primer pasarnya masih cukup terbuka dan "keunggulan komperatif" pun masih ada.

Peranan pemerintah dan kelompok wira usaha (entrepreneur) dari pihak swasta sangat penting guna merealisasikan terobosan-terobosan baru tersebut. Kedua kelompok ini harus terintegrasi dan berperan secara aktif dalam proses kegiatan ini.

Di pihak aparat pemerintah, sebagaimana ditekankan oleh "Peter F. Drucker", jaangan hanya menjadi cerdas yang dapat menjadi penghambat inovasi melalui regulasi yang tidak perlu. Yang seharusnya adalah memberi nafas dan iklim yang "favorable" terhadap setiap langkah inovasi. Setiap kebijakan deregulasi hendaknya berimplikasi positif sebagai upaya menciptakan iklim yang menguntungkan bagi inovasi. Kebijakan Pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu seperti Kebijaksanaan 6 Mei 1986 (pakem), Kebijaksanaan 24 Desember 1987 (pakdes) serta beberapa kebijaksanaan lainnya

dapat dinilai sebagai hal yang positif dalam upaya menciptakan iklim yang menguntungkan bagi inovasi. Tindakan atau kebijakan lanjutan yang lebih menjamin kelangsungan berkembangnya inovasi ini mungkin masih dibutuhkan.

Sedangkan kelompok wira usaha (entrepreneur) dari pihak swasta merupakan pihak yang senantiasa berperan mencapai sandi-sandi perubahan pasar dan atas dasar itu memprakarsai pengubahan kondisi atau penyesuaian kondisi pasar. Mereka harus mampu melayani dan mengarahkan masyarakat untuk mengenal produk baru, maupun meningkatkan nilai tambah produk secara maksimal sesuai dengan kebutuhan pasar, mampu bekerja secara produktif guna dapat menekan harga sehingga mampu berkompetisi dalam pasar. Pendidikan tenaga kerja, timbunan pengetahuan mereka dan kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development) menjadi semakin penting arti dan peranannya bagi inovasi. Suatu masyarakat entrepreneurial yang bertumpu pada kesinambungan pembaharuan memerlukan ilmuwan, birokrat, dan politia yang entrepreneurial pula, disamping wira usaha itu sendiri. Oleh karenanya peranan pendidikan dalam pengembangan ilmu dan teknologi semakin nyata.

Dalam usaha mendinamisir "keunggulan komperatif" statis maka perlu merangsang minat dan perhatian kelompok wira usaha ke daerah zona pertanian dengan bertindak sebagai innovator, dalam mendayagunakan seluruh potensi ekonomi di daerah tersebut tentunya dengan tanpa mengabaikan pentingnya arti kelestarian lingkungan. Pengembangan wira usaha itu sendiri hendaknya berdasarkan pada prinsip pengembangan insentif dan inovasi, serta pengembangan penerapan ilmu dan teknologi (iptek).

"Schoorl" lebih mempertegas lagi bahwa arti ilmu pengetahuan dan pendidikan sangat dominan dalam menunjang perkembangan ekonomi masyarakat. Karena lambat laun tanpa mengusik akan ketenangan dari pada kehidupan masyarakat perubahan akan terjadi dan berjalan dengan serasi.

Haruslah diakui, bahwa penerapan inovasi pada suatu daerah yang masih terikat dengan norma-norma dan tradisi-tradisi lama bukan lah hal yang mudah. Lamanya masyarakat bergelut dalam berbagai perjuangan dan pergolakan di masa lampau tanpa berhasil ditaklukkan oleh pihak penjajah, telah menciptakan kekokohan dan ketegaran pribadi,

timbul sikap curiga terhadap segala sesuatu pembaharuan yang datang dari luar, serta "kefanatikan religius" yang sudah mengakar dalam segala aspek kehidupan mereka akan turut mempengaruhi berhasil tidaknya suatu inovasi diterima oleh masyarakat.

Sebagaimana menurut "Soemardjan", masyarakat telah lama memiliki norma-norma dan tradisi-tradisi yang diyakini dan menyatu dengan hidupnya, maka dalam hal berintegrasi dengan hal-hal yang baru tidak mudah. Dalam prosesnya masyarakat mungkin akan menerima perubahan-perubahan tersebut atau mungkin menolaknya. Tindakan masyarakat untuk menerima akan terjadi jika ada rangsangan yang kuat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang merintanginya.

Sebaliknya masyarakat akan menolak perubahan-perubahan yang terjadi karena alasan yang antara lain : (1) Mereka tidak memahami, (2) Perubahan itu bertentangan dengan nilai-nilai serta norma-norma yang ada, (3) Para anggota masyarakat yang berkepentingan dengan keadaan yang ada cukup kuat menolak perubahan, (4) Risiko yang terkandung dalam perubahan lebih besar daripada jaminan sosial dan ekonomi yang biasa diusahakan, (5) Atau pelopor perubahan ditolak.

Dalam hal inilah pentingnya peranan Pemerintah Daerah, mencipta kan berbagai kemudahan terutama yang menjadi wewenang daerah seperti pembebasan tanah, dan sebagainya, disamping mengarahkan investasi ke arah yang lebih tepat dan terarah, sehingga potensi ekonomi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal melalui penerapan inovasi di berbagai sektor ekonomi sebagai proses mengejar ketertinggalan selama ini dan merupakan langkah untuk memperkecil ketimpangan antara kedua wilayah zona pembangunan tersebut. Kerjasama secara sungguh-sungguh dan terpadu antara pihak pemerintah dan kelompok wira usaha (entrepreneur) dari pihak swasta merupakan kunci keberhasilan strategi dan usaha pengembangan di masa mendatang.

V

PENUTUP

Daerah Istimewa Aceh memiliki potensi ekonomi yang cukup besar baik di sektor pertanian maupun pertambangan

dan industri, yang terdapat pada dua zona pembangunan yang berbeda, yaitu zona pertanian di sepanjang pantai Barat sampai Selatan, dan zona industri di sepanjang pantai Utara sampai Timur.

Perkembangan selama ini memperlihatkan, bahwa pendayagunaan sumber daya sektor pertambangan (migas) di daerah zona industri telah membawa daerah ini tumbuh pesat dibanding perkembangan yang terjadi di zona pertanian dengan sektor pertanian sebagai andalannya. Ketimpangan pembangunan antara kedua zona tersebut terlihat cukup menyolok dan begitu kontras. Kehidupan sosial ekonomi masyarakatpun relatif jauh berbeda.

Keadaan ini mengharuskan penciptaan arah pembangunan yang lebih seimbang melalui pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya ke seluruh pelosok wilayah, sehingga ketimpangan antar wilayah dapat diperkecil bila mungkin dihilangkan.

Sebagai sebuah daerah yang relatif masih tertinggal, sebenarnya potensi sumber daya ekonomi di zona pertanian bila ditangani secara optimal dalam jangka panjang diperkirakan akan mampu mengangkat daerah ini ke kehidupan yang lebih baik dan akan dapat mengejar ketertinggalannya serta melepas keadaan isolir selama ini. Daerah zona pertanian dengan potensi pertanian (perkebunan) diperhitungkan akan dapat meningkatkan sumbangan komoditi non migas bagi Daerah Istimewa Aceh khususnya komoditi perkebunannya, yang mempunyai prospek cukup cerah di masa mendatang, mengingat selama ini kemampuan komoditi ekspor di luar migas relatif masih sangat kecil.

Terobosan-terobosan baru dengan strategi pengembangan yang tepat dan terarah, mekanisme kerja antara pihak pemerintah dengan kelompok wira usaha (entrepreneur) dari pihak swasta yang sungguh-sungguh dan terpadu sangat penting dalam upaya memperkecil ketimpangan di antara kedua zona, pemerataan pendapatan masyarakat dan peningkatan daerah. Menciptakan "iklim keterkaitan" antara industri skala besar dengan berbagai industri kecil dan memperkecil kesenjangan-kesenjangan dalam bidang ekonomi dan sosial budaya di kawasan zona industri, serta meningkatkan peran kelompok wira usaha dalam pemanfaatan potensi ekonomi di daerah zona pertanian.

DAFTAR BACAAN

1. **Kebijaksanaan Operasional Pengembangan Agribisnis di Daerah Istimewa Aceh**, Diskusi Panel Strategi Pengembangan Zona Industri dan Zona Pertanian Daerah Ist. Aceh, 1987.
2. Dayan Dawood and Sjafrizal, **Aceh : The LNG Boom and Enclave Development**.
3. Dayan Dawood, dkk, **Perubahan Sosial Budaya Dan Kemasyarakatan Akibat Pembangunan Industri-Industri Besar Di Aceh Utara**, PLPIIS Universitas Syiah KUALA, 1986.
4. D.S. Simanjuntak, "Membahas Drucker dalam Konteks Indonesia", Prisma Februari 1987.
5. Peter F. Drucker, **The Frontier of Management**, (Hainemen London 1987).
6. Prof. Dr. Ibrahim Hasan, MBA, **Strategi Pemasaran Menghadapi Era Resesi Ekonomi**, Pidato Dies Natalis UDA Medan, 1987.
7. **Pidato Gubernur Daerah Istimewa Aceh**, Pada Pembukaan Diskusi Panel Strategi Pengembangan Zona Industri dan Zona Pertanian Prop. D.I. Aceh, 1987.
8. **Evaluasi Pelaksanaan Repelita IV Dalam Rangka Persiapan Repelita V Daerah Istimewa Aceh**, Bappeda D.I. Aceh Kerja Sama dengan Fak. Ekonomi Unsyiah Banda Aceh, 1987.
9. **Comprehensive Investment Profiles For Aceh Province**, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) and BKPM, 1984.
10. **Proyek Studi Keterkaitan Industri dan Pengembangan Usaha Usaha Kecil Untuk Daerah Istimewa Aceh (Lhok Seumawe dan Aceh Utara)**, Laporan I, Desember 1986.

TABEL
 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
 DAERAH ISTIMEWA ACEH, TANPA MINYAK BUMI
 TAHUN 1975 DAN 1984

SEKTOR	1975 (%)	1984 (%)
1. Pertanian	56,8	48,9
2. Industri	4,2	5,7
3. Pertambangan (migas)	-	-
4. Air dan Listrik	0,2	0,3
5. Bangunan	2,9	3,5
6. Perdagangan	11,8	15,6
7. Pengangkutan dan Komunikasi	9,4	14,3
8. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	0,1	0,9
9. Sewa Rumah	3,1	1,6
10. Pemerintahan	10,0	7,6
11. Jasa-jasa lainnya	1,6	1,6

Sumber : Lembaga Demografi Fak. Ekonomi Unsyiah B.Aceh.

TABEL

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
DAERAH ISTIMEWA ACEH, TERMASUK MINYAK BUMI
TAHUN 1975 DAN 1984

SEKTOR	1975 (%)	1984 (%)
1. Pertanian	47,3	15,9
2. Industri	3,5	1,8
3. Pertambangan (migas)	16,7	68,6
4. Air dan Listrik	0,2	0,1
5. Bangunan	2,4	1,1
6. Perdagangan	9,8	4,9
7. Pengangkutan dan Komunikasi	7,8	4,5
8. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	0,1	0,3
9. Sewa Rumah	2,6	0,5
10. Pemerintahan	8,3	2,4
11. Jasa-jasa lainnya	1,3	0,3

Sumber : Lembaga Demografi Ekonomi Unsyiah B.Aceh.

TABEL
REALISASI NILAI DAN SHARE SELURUH KOMODITI
EKSPOR
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
UNTUK TAHUN 1980 DAN 1986

JENIS KOMODITI	1980		1986	
	Nilai (US \$)	%	Nilai (US \$)	%
A. Ekspor Gas-Alam (migas)	1.814.345.539	94,32	2.557.138.862	97,05
LNG	1.018.326.050	53,50	1.546.236.700	58,65
Arun Con- densate	796.019.488	41,82	1.011.902.168	38,40
B. Ekspor Non Migas	89.195.855	4,96	77.720.459	2,95
Kopi	27.484.727	1,44	53.437.011	2,03
Karet	401.152	0,02	548.618	0,02
Kelapa Sawit	14.399.738	0,76	518.432	0,02
Kayu	43.524.465	2,29	5.123.761	0,19
Udang	1.941.399	0,10	2.964.448	0,11
Lain-lain	1.444.371	0,08	15.128.185	0,57
J U M L A H	1.903.541.394	100	2.634.859.328	100

Sumber : Kanwil Departemen Perdagangan Propinsi D.I. Aceh.

DATA ZONA INDUSTRI DAN PERTANIAN
DAERAH ISTIMEWA ACEH

Wilayah	Z. INDUSTRI 35 % (19.170 km2)	Z. PERTANIAN 65 % (36.220 km2)
Penduduk	67 %	33 %
Kepadatan Penduduk	104/km2	23/km2
Luas Sawah	63 %	37 %
Produksi Padi	70 %	30 %
Produktifitas	41/km	33/km
Komoditi Ekspor		
Karet	44,4 %	45,6 %
Kelapa Sawit	57 %	43 %
Kopi	29 %	71 %
Kesehatan		
Dokter tenaga medis	74 %	26 %
Tempat tidur	83 %	17 %
Perusahaan		
Industri	74 %	26 %
Konstruksi	80 %	20 %
Perdagangan	72 %	28 %
Angkutan	76 %	24 %
Total Usaha	74 %	26 %
Pekerja	77 %	23 %
Index mutu hidup	Tinggi	Rendah
Index kesejahteraan	Tinggi	Rendah
Teknologi	Padat modal	Tenaga
Prasarana	Relatif baik	Kurang baik

TABEL
PRODUKSI PER HEKTAR KOMODITI
DI ZONA PERTANIAN DAN ZONA INDUSTRI
(DALAM TON)

JENIS KOMODITI	ZONA INDUSTRI	ZONA PERTANIAN
A. Komoditi T.Pangan		
1. Beras	3,75	3,18
2. Kacang tanah	9,79	10,00
3. Kacang hijau	7,95	8,00
4. Kacang kedele	9,51	8,22
5. Jagung	11,42	11,64
6. Ubi kayu	10,08	11,24
7. Ubi rambat	9,08	8,95
B. Komoditi Perkebunan		
1. Kemiri	-	1,2
2. Karet	0,65	0,72
3. Kelapa	0,94	0,73
4. Kopi	0,57	0,40
5. Cengkeh	0,57	0,35
6. Pala	0,06	0,50
7. Nilam	0,11	0,04
8. Tembakau	-	0,55
9. Lada	0,06	0,14
10. Tebu	0,18	4,52
11. Pinang	0,71	0,24
12. Randu	0,17	0,36

Sumber : Aceh Dalam Angka, 1985.

MENUJU PERTANIAN YANG TANGGUH

O

L

E

H

Ir. WARDOYO

MENUJU PERTANIAN YANG TANGGUH

Untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, kita harus berjuang melalui serangkaian pembangunan yang berkesinambungan serta bertahap. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan Pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam menuju pembangunan manusia seutuhnya. Tujuan dari setiap tahap adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan ini tugas yang dibebankan pada sektor pertanian cukup berat, tetapi sangat mulia. Karena sebagian besar penduduk Indonesia sumber nafkahnya bergantung pada kegiatan pertanian baik pada proses produksi maupun pada proses pengolahan hasil dan pemasarannya.

Dalam Pembangunan Nasional sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, dalam berusaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat yang kita cita-citakan. Sasaran yang hendak dicapai adalah struktur ekonomi yang seimbang, dimana Industri yang kuat didukung oleh pertanian yang tangguh.

Marilah kita lihat sekarang apa yang dimaksud dengan pertanian yang tangguh yang perlu kita capai agar dapat mendukung dan memantapkan perindustrian.

Pertama, dasar optimasi pemanfaatan sumber daya secara optimal, baik sumber daya alam seperti lahan dan perairan, maupun sumber daya manusia yang potensinya besar sekali di Indonesia ini untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kedua, dasar fleksibilitas usaha tani. Pertanian harus mampu mengatasi segala hambatan dan tantangan dari lingkungan fisik, dan non-fisik dan yang penting lagi, pertanian harus mampu menyesuaikan diri dalam setiap perubahan yang mendasar dari lingkungan yang mempengaruhi usaha tani. Ketiga, dasar pengaruh penggandaan. Pertanian harus dapat berfungsi sebagai katalisator pembangun baik bagi pembangunan sektoral

secara nasional, maupun pembangunan terpadu pada tingkat Wilayah.

Pembangunan pertanian harus dapat memberikan pengaruh, mendorong dan menggerakkan bidang lain untuk lebih mempercepat proses kemajuannya, dan kemudian secara timbal balik, sektor lain tersebut memberikan dorongan yang sama kepada pertanian.

GBHN telah menunjukkan kepada kita agar kita dapat memanfaatkan segenap kemampuan modal dan potensi kita disertai dengan serangkaian kebijaksanaan dan langkah pelaksanaan guna mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pembangunan adalah milik seluruh bangsa, sehingga harus merupakan keseluruhan dari peran serta segenap lapisan masyarakat Indonesia.

Ketangguhan petani sebagai pelaku atau subjek pembangunan berkaitan erat dengan kemampuannya menjadi petani yang mandiri yang dapat mengambil manfaat dari lingkungan seperti kemajuan teknologi, tersedianya aparat pertanian, tersedianya iklim berusaha yang baik, dan dapat menunjukkan kemampuan mengambil keputusan secara tepat dengan memperhitungkan faktor lingkungan tersebut.

Dalam melaksanakan pembangunan, ketangguhan petani akan tercermin dari meningkatnya peran serta yang aktif dari para petani, yang semakin luas dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaannya ataupun dalam menerima dan menikmati hasil-hasilnya. Untuk itu perlu diciptakan suasana kemasyarakatan yang mendukung cita-cita pembangunan, serta terwujudnya kreatifitas dan otoaktifitas di kalangan petani sendiri.

Pelaksanaan pembangunan pertanian berencana telah berlangsung sejak kita memasuki Repelita. Secara umum dapat dikatakan bahwa produksi hasil-hasil pertanian telah menunjukkan kenaikan yang memberi sumbangan yang nyata dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan produksi itu telah pula membawa perbaikan pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia. Jalan yang kita tempuh dalam menuju tercapainya pembangunan pertanian itu adalah melalui

peningkatan produksi, dengan memanfaatkan kekuatan yang sudah mapan dan terwujud dalam lingkungan petani sendiri. Pembina berusaha menumbuhkan swadaya masyarakat petani dengan menggunakan rekayasa sosial ekonomi yang tepat. Tugas pokok yang dibebankan kepada sektor pertanian adalah :

1. Memantapkan produksi pangan dalam rangka swasembada. Sesudah kita berhasil meraih swasembada, tujuan kita adalah mempertahankan kelestarian tingkat swasembada itu.
2. Meningkatkan hasil-hasil pertanian baik untuk ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri.
3. Meningkatkan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja, dan
4. Mendukung pembangunan wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya.

Dalam rangka tujuan pembangunan pertanian tersebut di atas, ditetapkan prioritas yang tinggi bagi usaha peningkatan produksi pangan, khususnya beras, yang merupakan bahan pangan terpenting bagi rakyat Indonesia. Pemberian prioritas yang tinggi kepada penanganan masalah pangan adalah wajar, karena apabila masalah pangan tidak terselesaikan dapat diantisipasi gejala ekonomi di kemudian hari dan pada gilirannya akan menjadi sebab dari keresahan masyarakat. Lebih-lebih apabila keadaan rawan ini ditunggangi oleh intervensi asing akan terjadi gejolak sosial dan politik yang dapat membahayakan keselamatan dan keutuhan bangsa,

Pada tahap-tahap awal pembangunan kita dapat meningkatkan produksi pertanian secara leluasa karena sumber daya yang diperlukan masih cukup tersedia. Akan tetapi tersedianya sumber daya tersebut lambat laun makin berkurang, sehingga yang dapat dimanfaatkan, misalnya yang berupa lahan pertanian, makin terbatas dibandingkan dengan beban tugas yang kita hadapi. Di dalam penggunaan lahan pertanian keterbatasan tersebut lebih dipertajam lagi dengan makin meluasnya pemakaian lahan untuk keperluan nonpertanian.

Dalam situasi yang dapat berkembang dengan dampak yang berbagai-bagai, seminar ini sangat tepat waktu. Sudah saatnya kita mempersiapkan diri agar dalam Pelita VI pembangunan nasional kita dapat tinggal landas. Di bidang pertanian segala

kegiatan pembangunan pertanian tentunya harus diarahkan untuk mencapai kondisi pertanian yang tangguh, yang mampu mendukung industri yang kuat, dan yang merupakan sasaran jangka panjang yang ingin dicapai dalam pembangunan pertanian. Menelaah masalah pembangunan pertanian adalah juga melihat secara komprehensif dan terpadu keterkaitan pertanian dengan bidang lain dan sektor lain, serta dalam rangka pemantapan Wawasan Nusantara.

Untuk menciptakan iklim pembangunan pertanian dimana kaidah dapat kita pegang demi tercapainya sasaran pembangunan pertanian, diperlukan adanya penjabaran dari inti pemikiran tentang pembangunan pertanian. Tujuan agar terwujudnya kesepakatan antar sub sektor yang menempatkan kepentingan sektor pertanian di atas kepentingan sub sektor, dan keserasian antar sektor yang menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pertanian. Di samping itu perlu kita hayati bahwa pembangunan wilayah adalah merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan pertanian di wilayah perlu diperhatikan keadaan daerah yang serasi dengan kebijaksanaan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dasar-dasar yang perlu diperhatikan di dalam pengembangan wilayah adalah :

- a. Suatu wilayah harus memberikan sumbangan kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- b. Harus ada keseimbangan laju perkembangan yang layak antar wilayah pengembangan, sehingga perbedaan antar wilayah yang sedang berkembang dan wilayah yang relatif telah lebih maju dapat diperkecil.
- c. Harus ada hubungan ekonomi antara wilayah yang saling menguntungkan agar terjalin ekonomi yang kuat dalam satu kerangka kesatuan ekonomi nasional yang kokoh.

Setiap wilayah mempunyai perbedaan kemampuan yang berlainan sesuai dengan agroecologi dan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan. Perbedaan ini membawa perbedaan keuntungan komparatif untuk berbagai komoditi. Perbedaan ini antara lain disebabkan perbedaan dalam hal keadaan, kesuburan lahan, keadaan topografi, keadaan-

an iklim dan keadaan sosial ekonomi serta jumlah penduduk. Dengan memperhatikan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah pengembangan maka kebijaksanaan pengembangan wilayah dan khususnya di bidang pembangunan pertanian wilayah yang akan ditempuh disesuaikan dengan kebijaksanaan nasional yang dapat dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan tersebut di atas. Dengan demikian dalam pengembangannya dapat dicapai efisiensi dan daya saing yang tinggi.

Seperti dikemukakan di atas, pelaksanaan pembangunan wilayah diarahkan supaya setiap wilayah daerah memberikan sumbangan kepada tercapainya tujuan pembangunan nasional sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk daerah atau wilayah yang memiliki potensi lahan pertanian untuk tanaman pangan diarahkan untuk dapat memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap peningkatan produksi bahan makanan dan dengan biaya komparatif terendah. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi tinggi dalam pengusahaan perkebunan atau komoditi ekspor dikembangkan untuk dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dalam menghasilkan devisa bagi negara dan mempunyai daya saing tinggi di pasaran internasional. Demikian pula dengan usaha peningkatan pertanian lainnya di wilayah/daerah diarahkan dengan mempertimbangkan pendekatan seperti di atas.

Sistem pewilayahan pembangunan melalui pendekatan zone agroecologi dilaksanakan dengan memperhatikan potensi sumber daya, prasarana, dan hubungan ekonomi antar wilayah yang saling menguntungkan. Dengan demikian suatu wilayah diharapkan dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki secara lebih efisien.

Kebijaksanaan pengembangan wilayah agroecologi perlu memperhatikan berbagai faktor pembatas antara lain :

- a. Kemampuan sumber daya alam wilayah pembangunan tadi.
- b. Kemampuan jangkauan wilayah yang dikembangkan terhadap pusat-pusat pengembangan ekonomi. Keadaan ini sangat ditentukan oleh keadaan prasarana jalan dan alat transportasi.
- c. Kemampuan pusat pengumpul hasil produksi, penyediaan sarana produksi dan perkreditan dalam bidang pertanian.

- d. Tersedianya hasil-hasil penelitian yang dapat diterapkan untuk wilayah yang akan dikembangkan.
- e. Tingkat dan perkembangan ketrampilan petani dari tiap wilayah agroecologi yang bersangkutan.
- f. Tingkat dan perkembangan kerjasama antara instansi badan dan lembaga antar wilayah.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor pembatas penerapan pengembangan wilayah dilaksanakan dengan berpedoman pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh setiap kelompok wilayah pengembangan.

Setelah setiap wilayah diidentifikasi setiap permasalahannya dan kemampuan potensi agroecologi, selanjutnya dapat disusun kebijaksanaan pengembangan wilayah dengan memperhatikan :

- a. Wilayah dengan budidaya berlain-lainan baik disebabkan oleh keadaan fisik/geografis maupun sosial ekonomi ataupun keduanya.
- b. Wilayah yang dimiliki keadaan dan potensi yang berbeda-beda sehingga arah pengembangan kegiatan pertanian tertentu.

Dengan demikian pengembangan usaha di tiap wilayah akan mengarah kepada adanya wilayah pertanian dengan komoditi pertanian satu jenis komoditi utama dan beragam komoditi sampingan. Daerah demikian dapat diidentifikasi sebagai wilayah berbagai macam komoditi. Di samping itu dapat diidentifikasi pula wilayah potensi untuk suatu komoditi tertentu terutama tanaman tahunan, peternakan dan perikanan.

Dalam rangka pengembangan wilayah produksi dilakukan berdasarkan asas keuntungan komparatif dan alokasi sumber daya secara optimal. Ini akan mendorong konsentrasi pengembangan komoditi tertentu dalam satu wilayah pengembangan sesuai dengan agroecosistem. Penerapan prinsip ini akan memperbesar saling ketergantungan antar sektor ekonomi dan antar wilayah yang akan mendorong pertumbuhan industri dan jasa di Indonesia, memperbesar perdagangan dan kegiatan transportasi antar wilayah sehingga memperlancar roda perekonomian dan mempertebal rasa wawasan nusantara. Dengan demikian usaha diversifikasi diartikan

dalam arti agregat Indonesia, dan tidak perlu dalam arti mikro di tingkat usaha tani.

Dalam pembangunan pertanian yang akan datang, Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dapat digunakan sebagai salah satu alternatif. Pola Perusahaan Inti Rakyat yang merupakan suatu bentuk kerjasama usaha antara perusahaan besar dan perusahaan kecil (petani) dalam rangka;

- a. Meningkatkan efisiensi nasional melalui pemanfaatan teknologi dan manajemen ekonomi.
- b. Meningkatkan pendapatan melalui kesempatan berusaha dan
- c. Memecahkan kelemahan-kelemahan yang ada sistem dualisme ekonomi.

Pola PIR dilakukan dengan kegiatan pendekatan komoditi yang menyelenggarakan pembinaan usaha tani dari pertanaman, panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil serta dengan memanfaatkan efisiensi spesialisasi dan skala ekonomi.

Di dalam tata-reka perusahaan pertanian (sistem agrobisnis) terdapat empat komponen yaitu : Pengadaan sarana produksi (saprodi), usaha tani, pengolahan dan pemasaran. Apabila dikaji hubungan biaya persatuan keluasan dengan skala usaha pada masing-masing komponen kegiatan ternyata terdapat hubungan sebagai berikut :

1. Dalam komponen kegiatan usaha tani, skala usaha kecil sama dengan skala usaha besar, bahkan dalam keadaan tertentu dapat lebih efisien.
2. Dalam komponen kegiatan pengadaan saprodi, pengolahan dan pemasaran skala usaha besar lebih efisien dari pada usaha skala kecil.

Atas keterpaduan yang diterapkan di dalam pola PIR dilihat secara agregat dapat menggambarkan adanya :

1. Keterpaduan wilayah, diartikan sebagai asas konsolidasi lahan pertanian yang didasarkan pada rencana tata-guna lahan jangka panjang.
2. Keterpaduan usahatani, diartikan sebagai keterpaduan antara petani dalam wilayah itu, sehingga spesialisasi usaha tani tidak menjadi penghambat berlakunya asas spesialisasi dari skala ekonomi.
3. Keterpaduan komoditi, berarti kesepakatan semua pihak untuk memberikan skala prioritas pada berbagai komoditi yang akan dikembangkan dalam suatu wilayah.

Hubungan biaya dengan skala usaha di dalam tata-reka perusahaan pertanian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi nasional dan sekaligus mencapai pemerataan pendapatan melalui kesempatan berusaha dengan cara :

1. Komponen kegiatan pengadaan saprodi, pengolahan dan pemasaran, dilakukan dalam skala besar (perusahaan negara, swasta dan koperasi).
2. Komponen kegiatan usaha tani yang memerlukan skala usaha kecil diserahkan kepada perusahaan kecil (petani).

Pengembangan usaha dengan pola PIR tujuannya tidak hanya terbatas pada pembangunan di sektor usaha itu sendiri tetapi lebih luas lagi yaitu membangun masyarakat yang berwiraswasta, sejahtera dan selaras dengan lingkungannya terutama yang dilaksanakan di wilayah bukaan baru. Masyarakat dalam lingkungan PIR yang dibangun dibentuk dari petani peserta yang diarahkan untuk memiliki keterampilan dalam menerapkan inovasi (teknik dan sosial), mampu menarik manfaat dari asas skala ekonomi baik secara perorangan maupun secara kerjasama dalam kelompok, memiliki kekuatan mandiri dalam menghadapi pihak-pihak lain dalam dunia usaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memanfaatkan kemampuan teknis dan management serta fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan besar guna membantu pembangunan petani dengan model proyek yang dapat diterapkan berulang dan dengan rancangan proyek yang memungkinkan pengembalian biaya langsung yang digunakan dalam pembangunan di lapangan.

Dalam pengembangan PIR ada dua komponen pelaksana yaitu petani yang terpilih dan perusahaan besar sebagai intinya. Pola PIR di sub sektor pertanian arahnya adalah pemukiman, menduduki tempat dan peran yang terpenting. Berikutnya pengembangan komoditi sebagai tujuan kedua yang berperan sebagai pendukung dari pemukiman yang sehat dalam mensejahterakan pesertanya.

Berbicara mengenai pembangunan pertanian di daerah Istimewa Aceh, baik dalam Pelita IV maupun Repelita 5 yang akan datang tetap mendapatkan prioritas. Dewasa ini hampir 70% penduduknya sebagian besar mata pencahariannya bergantung pada sektor pertanian. Dalam pelestarian swasembada beras andil yang diberikan oleh daerah ini cukup

besar, tidak saja memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri tetapi dapat membantu daerah sekitarnya dalam mencukupi kebutuhan pangan.

Ditinjau dari luas lahan potensial yang dapat dipergunakan untuk pertanian di Daerah Istimewa Aceh diperkirakan seluas 2.411.194 hektar dan ini baru dimanfaatkan seluas 989.338 hektar atau baru 41% dari tanah yang tersedia. Potensi yang dapat dikembangkan di sektor pertanian, tidak saja untuk sub sektor pertanian tanaman pangan, tetapi juga sub sektor peternakan, perikanan maupun perkebunan.

Dalam pengembangan pertanian di masa mendatang di samping mendasarkan pada potensi lahan, agroklimat setempat, sarana prasarana, perhatian perlu pula ditujukan pada pengembangan industri. Pengembangan industri yang cukup pesat terjadi di wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur. Oleh karenanya bentuk pertanian yang dikembangkan di kedua wilayah tersebut adalah kondisi yang dapat mendorong perkembangan industri baik dalam penyediaan bahan bakunya maupun penyediaan bahan konsumsi. Untuk wilayah bagian Tengah dan Barat merupakan daerah yang potensial dikembangkan untuk pertanian tanaman pangan. Padi dan kedelai merupakan komoditi yang sudah diusahakan secara luas dan mempunyai potensi yang tinggi untuk dikembangkan di masa mendatang. Di samping itu kacang tanah dan bawang putih juga mempunyai keuntungan biofisik dan sosial ekonomi yang perlu diperhatikan.

Pengembangan perikanan tidak terbatas pada hasil tangkapan saja, tetapi masih terbuka peluang pada budidaya tambak, khususnya di pantai Timur Daerah Istimewa Aceh yang merupakan daerah yang cukup potensial untuk tambak udang dan bandeng. Perkembangan budidaya tambak yang pada akhir ini cukup pesat, perlu diperhatikan dan ditingkatkan kualitas pengembangannya.

Di samping itu potensi perikanan yang besar dari perairan ke lautan di sekitar Aceh perlu dimanfaatkan sebesarnya. Di samping dengan mendorong tumbuhnya para investor yang bergerak dalam penangkapan ikan, dapat juga dengan memanfaatkan kapal-kapal asing dalam rangka kerjasama.

Untuk sub sektor peternakan dan perkebunan telah pula menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan.

Diharapkan Daerah Istimewa Aceh ini dapat menjadi daerah penyedia ternak untuk memenuhi kebutuhan daerah di sekitarnya dan komoditi ekspor. Perkebunan Rakyat yang luasnya hampir 80% dari total luas perkebunan di Daerah Istimewa Aceh dan tiap tahun mengalami peningkatan yang cukup besar, sehingga perlu pembinaan secara lebih baik. Potensi yang besar ini perlu didukung dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk di dalamnya warga PWI yang cukup besar peranannya. Fasilitas kredit yang relatif murah bunganya, pola usaha seperti PIR, UPP perlu dikembangkan. Pilihan komoditi perkebunan yang dikembangkan hendaknya betul-betul disesuaikan dengan agroklimat setempat, misalnya karet, sawit, kakao, lada, termasuk juga komoditi yang dikenal secara luas oleh masyarakat seperti kemiri. Dalam pengembangannya, pelaksanaan pembangunan pertanian di masa mendatang agar dapat memanfaatkan secara optimal organisasi-organisasi masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan agama di Daerah Istimewa Aceh yang cukup banyak jumlahnya. Ulama-ulama, para santri dan murid-murid sekolah diajak untuk lebih mengembangkan pertanian. Semua kegiatan ini harus dipadukan dengan kelompok-kelompok tani, koperasi dan para pengusaha.

Ir. Wardoyo (Menteri Pertanian)

PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN INDUSTRI

Suatu Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Aceh

o

l

e

h

IBRAHIM HASAN

I. PENDAHULUAN

Revolusi industri yang pertama ditandai dengan penemuan tenaga uap, mesin dan listrik, sehingga ia telah mampu menggantikan tenaga otot manusia untuk menggerakkan kegiatan produktif yang berbobot tinggi. Perkembangan teknologi berpacu dengan waktu, cepat sekali, sehingga hampir dapat dikatakan tenaga otak manusia telah mulai digeser oleh komputerisasi dalam kegiatan untuk beberapa hal tertentu. Bahkan kini telah bermunculan robotisasi dan otomatisasi. Kemampuan umat manusia untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam sudah semakin tinggi pula, sehingga pertumbuhan produksi dan jasa-jasa bagi mereka yang mampu menguasai teknologi berlangsung dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi lagi.

Akselerasi perubahan berpacu, merasuk, menyusup ke segala aspek kehidupan umat manusia. Negara, ataupun mereka yang tidak mampu beradaptasi dengan akselerasi perubahan, jelas tergilas, jatuh babak belur menerima punch dan jep pukulan resesi, riak gelombang modernisasi yang tak mungkin dibendung dengan sistem kuota, tarif tinggi dan berbagai restriksi lainnya. Riak gelombang tersebut terus mengalir membawa dampak dalam kehidupan ekonomi, sosial politik, dan kebudayaan kita yang hidup di masa kini dan masa mendatang.

Alam dan lingkungan di beberapa negara industri mulai sirna menerima polusi, dampak negatif dari akselerasi perubahan, seperti erosi melanda lembah dan lahan, pengotoran air, udara oleh berbagai limbah, hancurnya lapisan ozon, hilangnya beberapa spesies burung di rimba, binatang di semak belukar, spesies ikan di sawah dan tegalan ikut babak belur menerima pukulan teknologi. Tegasnya kehidupan flora dan fauna terganggu keseimbangan, yang pada gilirannya dapat menghancurkan eksistensi dan hakiki umat manusia.

Dalam situasi yang sedemikian rupa di saat-saat awal tiga dasa warsa yang lalu masalah lingkungan hidup telah menjadi topik pembicaraan para ahli dan pakar. Lambat laun kecemasan tentang lingkungan hidup semakin meluas dan banyak dibicarakan orang, tidak saja di kalangan para ahli, tetapi juga di kalangan para praktisi, politisi, dan masyarakat luas.

Sebahagian dari mereka telah mulai sadar tentang pentingnya masalah lingkungan hidup. Oleh karenanya upaya pelestarian menjadi sangat penting dan mendesak. Untuk maksud tersebut Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur masalah pelestarian lingkungan hidup ini sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, dan kemudian disusul dengan Peraturan-Peraturan Pemerintah dalam berbagai keputusan untuk pelaksanaan Undang-undang tersebut.

Selanjutnya pelestarian lingkungan diupayakan melalui minimisasi atau bila mungkin menghilangkan sama sekali dampak negatif yang timbul dalam kegiatan pembangunan, karena upaya pembangunan harus terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan untuk memacu memenuhi kebutuhan dan harapan manusia Indonesia yang semakin tumbuh dan berkembang.

Berbicara mengenai kebutuhan, berarti kita berhadapan dengan pasar atau perdagangan, karena ia adalah merupakan motor penggerak pertumbuhan dan pembaharuan. Negara yang mampu memperluas/merebut pasar di tengah-tengah kemelut persaingan yang ketat dalam situasi tak menentu (Uncertainty), merekalah yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Perhatikan saja kemampuan Jepang menguasai pasar, mampu memenuhi harapan dan selera (taste) para konsumen yang beraneka ragam, corak kebudayaan, baik di timur maupun di barat. Ia mampu memanfaatkan keunggulan komparatif yang dinamis dari faktor endowment yang ia miliki, akibatnya perekonomian Jepang dapat tumbuh dengan kecepatan yang relatif tinggi, berpacu dengan negara-negara industri lainnya. Beranjak dari konsepsi pemikiran tersebut, maka seluruh produk nasional kita masuk ke dichotomy pasar yaitu ke dalam dan keluar negeri. Potensi pasar dalam negeri relatif lebih besar, dilihat dari segi jumlah penduduk menempati ranking nomor 5 di dunia (kurang lebih 178,8 juta jiwa sekarang ini). Sedangkan untuk masuk ke pasar luar negeri menuntut kearifan dan kemampuan kita dalam meningkatkan produktivitas, tingkat efisiensi yang cukup tinggi disamping pemanfaatan keunggulan komparatif yang dinamis dari faktor endowment yang dimiliki oleh negara dan bangsa kita.

Untuk memenuhi harapan tersebut kita berhadapan dengan masalah lokasi, yaitu mempertimbangkan variable spartial

dalam kehidupan ekonomi yang telah menghasilkan GDP kita. Dalam hal ini perlu dikaji dimana letak kegiatan produksi yang orientasi pasarnya keluar negeri (ekspor). Hal ini adalah sangat penting dalam penentuan keputusan investasi sektor pemerintah dalam pembangunan prasarana dan sarana, untuk menunjang produksi nasional kita yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara, termasuk di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam kaitan inilah kita mencoba melihat di mana letak dan apa pula peran daerah ini dalam kehidupan ekonomi nasional. Atas dasar kenyataan dan pokok-pokok pemikiran inilah kita coba membahas makalah singkat ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua untuk melahirkan kebijakan pembangunan yang didambakan oleh masyarakat daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan termasuk dalam lingkup cakup aspirasi nasional. Oleh karenanya karya tulis ini dalam bagian berikut mencoba membahas masalah kecenderungan pembangunan daerah dan peranannya dalam pembangunan nasional. Kemudian dalam bagian ketiga menjelaskan keterkaitan pembangunan sektor pertanian dan industri, sedangkan dalam bahagian keempat upaya minimisasi dampak negatif dalam pembangunan daerah.

II. KECENDERUNGAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERANANNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Pengalaman di banyak negara yang sedang melaksanakan kegiatan pembangunan, mengalami suatu proses perubahan struktural, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik dan dan sosial budaya, dalam ikhtiar peningkatan pendapatan dan baku mutu kehidupan masyarakat. Dengan demikian perubahan-perubahan tersebut berlangsung melalui suatu proses transformasi dari perekonomian yang lebih dominan sektor produksi primer (pertanian dan pertambangan) menjadi suatu perekonomian yang lebih dominan dalam sektor produksi sekunder dan tersier (industri manufaktur, konstruksi dan jasa-jasa). Atas dasar inilah sebahagian besar para pakar ekonomi beranggapan bahwa pembangunan yang berhasil ditandai oleh dominan sektor industri dan jasa-jasa dalam

struktur ekonomi yang kian berubah. Meningkatnya pertumbuhan industri manufaktur dalam struktur produksi, ditandai oleh komposisi PDB yang sebahagian besar berasal dari sektor industri dan jasa-jasa, begitu pula halnya dalam komposisi ekspor. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, terlihat dalam kehidupan ekonomi daerah ini, ternyata dalam dasa-warsa terakhir ini struktur ekonomi daerah Aceh telah berubah secara drastis, dimana dalam tahun 1972 peranan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Aceh masih relatif besar yaitu 61,6%, sedangkan peranan sektor pertambangan dalam tahun yang sama diperkirakan masih di bawah 10%. Kemudian sejak diketemukan LNG di Aceh Utara telah terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti, yaitu peranan sektor pertanian merosot secara tajam dari 53% pada tahun 1975 turun menjadi 36,1% pada tahun 1978, angka ini terus merosot sehingga mencapai 13,2% dalam tahun 1985 dan 11,58% dalam tahun 1987. Sedangkan dalam periode yang sama peranan sektor pertambangan meningkat dengan kecepatan yang cukup tinggi, yaitu dari 16,7% pada tahun 1975 menjadi 30,1% dalam tahun 1978, produksi terus dipacu sehingga peranan sektor pertambangan semakin membesar mencapai 72,4% terhadap total PDRB Aceh dalam tahun 1985 dan 74,04% pada tahun 1987. Namun demikian perubahan struktural ini terjadi masih dalam sektor produksi primer, hanya peranan sektor pertanian yang begitu besar terhadap PDRB telah bergeser ke sektor pertambangan sejak penemuan gas alam di Aceh Utara. Selanjutnya sektor industri walaupun secara absolut menunjukkan peningkatannya, namun secara relatif peranannya terhadap total PDRB semakin merosot, yaitu dari 3,5% pada tahun 1975 turun menjadi 3,33 % dalam tahun 1985 dan 2,96 % pada tahun 1987.

Perubahan struktur ekonomi seperti tersebut masih belum mampu menggerakkan atau mendorong kehidupan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik, karena nampaknya peranan sektor produksi sekunder terhadap total PDRB masih relatif kecil yaitu 4.05% dalam tahun 1983 turun menjadi 3,69% pada tahun 1987. Disamping itu kehadiran LNG beserta beberapa industri ikutan lainnya yang berskala besar, berteknologi canggih dan padat modal di wilayah industri Lhokseumawe, masih belum dapat membuka kesempatan kerja untuk dapat menampung tenaga kerja, baik bagi mereka yang baru mulai

masuk pasar tenaga kerja, maupun dari disguised unemployment yang terdapat di daerah-daerah rural dalam sektor pertanian.

Kondisi tersebut dapat memperbesar gap tingkat pertumbuhan antara Zona Industri di bahagian Utara dan Timur Aceh dengan Zona Pertanian di bahagian Barat-Selatan-Tengah dan Tenggara propinsi ini, disamping itu pertumbuhan yang sangat cepat dalam sektor pertambangan, yang secara langsung masih belum mampu mendorong pertumbuhan/pembangunan pertanian terutama di Aceh bahagian Barat-Selatan-Tengah dan Tenggara propinsi ini.

Penjelasan di atas ini, bukan berarti kehadiran Zona Industri tidak membawa dampak sama sekali terhadap pertumbuhan daerah, hanya bila ditinjau dari sudut keterkaitan langsung antar sektor ekonomi, lewat hubungan Input-Output, memang masih belum begitu berkembang, karena masih belum tumbuhnya industri menengah yang dapat menarik tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar. Tetapi perlu diketahui bahwa kehadiran Zona Industri di Aceh Utara, secara tidak langsung telah dapat merangsang tumbuhnya perdagangan eceran, jasa-jasa, pengangkutan, sektor informal dan lain-lainnya. Namun jika dibandingkan dengan total output yang dihasilkan oleh Industri Besar, maka masih belum menunjukkan perimbangannya yang cukup berarti dengan pertumbuhan sektor ekonomi lainnya.

Perbedaan tingkat pertumbuhan tersebut tercermin dalam aspek ekonomi, teknologi, penduduk, potensi ekonomi, dan kesejahteraan sosial, dimana semua aspek tersebut didominasi oleh Zona Industri, kecuali wilayahnya yang lebih luas dan lebih subur berada pada Zona Pertanian (65%) dibandingkan dengan wilayah Zona Industri hanya 35%. Sebagai akibat ketidakseimbangan pembangunan dan pertumbuhan, baik ditinjau secara sektoral maupun secara spasial di kedua Zona tersebut, telah menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk (Tenaga Kerja Produktif) dari sektor pertanian ke kawasan industri tersebut, karena net expected earning di kawasan industri relatif lebih tinggi dari pada di sektor pertanian. Kecendrungan tersebut terlihat dalam laju pertumbuhan penduduk di Zona Industri terutama di daerah Aceh Utara meningkat dari 2,38% pada tahun 1983 menjadi 4,93% pada tahun 1984 dan 4,93% tahun 1985.

Masalah perpindahan penduduk ini, tentu tidak dapat dibiarkan berlangsung secara terus menerus. Secara konsepsi kita harus dapat mengupayakan agar harapan penerimaan pendapatan (*net expected earning*) antara kedua Zona tersebut harus sama, disamping penyediaan-penyediaan fasilitas sosial, rekreasi dan pemukiman yang lebih menyenangkan di daerah pedesaan, (Zona Pertanian). Untuk itulah kita perlu mencari terobosan menghilangkan kesenjangan antar sektoral dan antara wilayah melalui pembangunan Zona Pertanian di pantai Barat-Selatan, Tengah dan Tenggara propinsi ini secara lebih terarah, terpadu dan konsepsional. Dengan demikian perkembangan sektor industri dapat didukung oleh pembangunan dan pertumbuhan pertanian yang tangguh dalam rangka peningkatan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan kesejahteraan kepada sebahagian besar penduduk Aceh yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian.

Keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah dapat dilakukan melalui pendekatan sistem komoditi terpadu, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif yang dinamis dalam pemilihan faktor endowment di masing-masing wilayah, baik antara komoditi tertentu dengan komoditi yang lainnya, maupun antara wilayah tertentu dengan wilayah lainnya. Dengan demikian diharapkan proses produksi dapat berlangsung dalam suasana efisiensi yang relatif tinggi. Pembangunan yang lebih seimbang baik antar sektor maupun antar wilayah dimaksudkan tidak hanya untuk peningkatan kehidupan ekonomi, kemandirian harkat dan martabat manusia yang menghuni masing-masing wilayah, ia juga dimaksudkan untuk membangun kehidupan sosial politik dan sosial budaya masyarakat Aceh yang saling ketergantungan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, sehingga pembinaan persatuan dan kesatuan masyarakat yang integral dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita wawasan kebangsaan Indonesia. Justru karena itulah pembangunan di daerah ini, baik yang berada di dalam Zona Industri maupun yang berada dalam Zona Pertanian, haruslah mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, menyangkut dengan kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, agama, budaya dan keagamaan. Konsep ini didasarkan pada anggapan dan

keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercipta sebagai akibat tumbuhnya perubahan yang fundamental bukan saja pada corak kegiatan ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan politik serta sosial budaya masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan hal-hal tersebut maka pembangunan Zona Pertanian di bagian Barat- Selatan, Tengah dan Tenggara propinsi ini dimaksudkan agar dapat tercipta pemerataan pembangunan di seluruh Propinsi Daerah Istimewa Aceh, sesuai dengan Trilogi Pembangunan. Dalam situasi yang sedemikian diharapkan aliran/perpindahan penduduk dari Zona Pertanian ke Zona Industri dapat terhenti, bahkan untuk jangka panjang diharapkan expected earning untuk migrasi akan sama di seluruh Daerah Istimewa Aceh.

Pembangunan daerah yang berupaya memanfaatkan seluruh potensi yang ada, mempunyai hubungan mata rantai dengan kehidupan ekonomi nasional dan internasional. Kehidupan di zaman teknologi dan komunikasi yang semakin canggih, telah membawa dampak kepada aliran/arus dari pada barang, jasa, ide dan kebudayaan yang semakin lebih lancar menjangkau para peminat ke seluruh pelosok. Dalam situasi yang sedemikian para pelaku pembangunan daerah, perlu mengetahui, melihat dan menghayati bagaimana kedudukan daerahnya dalam kehidupan ekonomi nasional.

Bila kita amati tingkat PDRN per-kapita, maka menunjukkan kepada kita bahwa ada 8 (delapan) propinsi di Indonesia yang memiliki PDRN per kapita yang melebihi angka per-kapita nasional (termasuk migas lihat tabel-14). Dari delapan propinsi tersebut 3 di antaranya terdapat di Pulau Sumatera, satu propinsi di Pulau Jawa, 2 propinsi di Pulau Kalimantan, satu di Pulau Bali dan satu lagi di Irian Jaya. Ranking teratas dipegang oleh Kalimantan Timur, kemudian disusul oleh Riau, sedang Aceh menduduki ranking nomor 3 (tiga) akan tetapi bila tidak termasuk minyak bumi dan gas alam, maka PDRN per-kapita Aceh menduduki ranking nomor 5 (lima), dimana tempat teratas diduduki oleh DKI Jakarta, kemudian berturut-turut disusul oleh Kalimantan Timur, Bali dan Kalimantan Tengah (lihat tabel-14 untuk lebih mendetail).

Selanjutnya bila kita amati data PDRB per propinsi, maka memberikan gambaran kepada kita bahwa Pulau Jawa, Bali dan Sumatera merupakan tulang punggung perekonomian

Indonesia, karena dalam tahun 1986 diperkirakan 83,48% dari PDB telah dihasilkan oleh ketiga pulau tersebut, selebihnya 16,52% lagi dari PDB Indonesia tahun 1986 dihasilkan oleh propinsi-propinsi lainnya di luar Sumatera, Jawa dan Bali. Peranan Pulau Jawa dan Bali dalam pembentukan PDB Indonesia 1986 diperkirakan sebesar 54,91%, sedangkan kontribusi Pulau Sumatera terhadap pembentukan PDB Indonesia dalam tahun yang sama diperkirakan sebesar 28,57%. Selanjutnya peranan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam pembentukan PDB nasional dalam tahun tersebut diperkirakan sebesar 6,57% (lihat tabel-12 terlampir). Sedangkan kontribusi nilai ekspor Aceh terhadap total nilai ekspor nasional dalam tahun yang sama diperkirakan sebesar 17,79% (lihat tabel 13).

Selanjutnya bila dilihat dari struktur dan pola produksi, maka memberikan gambaran kepada kita bahwa Pulau Jawa-Bali, out put-nya lebih didominasi pada sektor produksi sekunder yang pemasarannya lebih banyak berorientasi ke dalam negeri, misalnya industri pengolahan bahan pangan, sandang, bahan bangunan dan lain-lainnya. Sedangkan Pulau Sumatera out put-nya lebih didominasi oleh sektor produksi primer dalam hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan ekstraktif-mineral, yang pemasarannya lebih banyak berorientasi ke luar negeri. Misalnya bila kita amati nilai ekspor Indonesia 1987, menunjukkan kepada kita bahwa 53,49% dari total nilai ekspor Indonesia pada tahun tersebut berasal dari Pulau Sumatera dan selebihnya 46,51% lagi berasal dari daerah-daerah lainnya di Indonesia (data BPS, Statistik Indonesia 1987 Ekspor Indonesia = US \$ 17. 273,2 juta; Ekspor Sumatera = US \$ 9.238,7 juta).

Berdasarkan gambaran dan pemikiran tersebut, maka pembangunan di Pulau Sumatera termasuk Propinsi Daerah Istimewa Aceh hendaklah diarahkan pada pembangunan prasarana produksi, prasarana pemasaran yang mendukung sektor produksi primer, dimana kantong-kantong produksi (production centre) jauh berada di desa-desa di daerah pedalaman yang kini sukar dijangkau, sehingga perlu ditunjang dengan fasilitas perhubungan yang memadai agar dapat memperlancar arus input-output. Fasilitas pengangkutan tidak hanya dilihat dari pelabuhan pengeluaran ke luar negeri, tetapi yang lebih penting adalah dari sentra produksi sampai ke

pelabuhan ekspor. Untuk Propinsi Daerah Istimewa Aceh jaringan jalan yang cukup mendesak adalah perhubungan antara pelabuhan di Lhokseumawe dengan Kabupaten Aceh Barat, dengan Kabupaten Aceh Selatan, dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Dengan demikian diharapkan komunikasi antara Zona Industri dengan Zona Pertanian akan lebih saling mendukung. Bila hal ini dapat tercipta, diharapkan para investor swasta dapat lebih tertarik dan terangsang untuk membangun berbagai jenis industri manufaktur yang mengolah produksi primer, termasuk di dalamnya Agricultural processing industries, yang pada gilirannya dapat menimbulkan berbagai variasi dan diversifikasi dalam komoditas ekspor kita. Tentu saja hal ini akan memberikan dampaknya pada peningkatan kesempatan kerja serta value added yang berlipat ganda tidak ikut diekspor ke luar negeri.

III. KETERKAITAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DAN INDUSTRI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Semenjak Repelita I sampai dengan saat sekarang ini, pembangunan sektor pertanian masih tetap merupakan prioritas dan titik berat pembangunan, karena sektor ini selain telah memberikan kesempatan kerja serta nafkah kepada sebahagian besar penduduk, juga sektor pertanian adalah sebagai sumber penyediaan bahan makanan untuk semua orang yang bekerja pada sektor manapun; sektor pertanian juga sebagai sumber tenaga kerja, terutama bagi mereka yang tergolong dalam disquissed unemployment, dan para pemuda yang mulai masuk ke pasar tenaga kerja.

Selain dari pada itu, sektor pertanian juga sebagai perluasan pasar bagi hasil-hasil industri, karena pendapatan (tenaga beli) berada pada penduduk yang sebahagian besar hidup di sektor pertanian. Kemudian yang lebih penting lagi adalah juga sebagai sumber devisa, yang diperoleh dari ekspor hasil pertanian ke luar negeri. Besar/kecilnya penerimaan devisa akan sangat menentukan kemampuan kita untuk mengimpor barang-barang modal dan spareparts yang sangat dibutuhkan

dalam usaha-usaha pembangunan yang sedang dilaksanakan dewasa ini.

Kehadiran industri yang berskala besar di Kabupaten Aceh Utara, telah merubah wajah kota Lhokseumawe dan sekitarnya sebagai suatu pusat pertumbuhan industri di Aceh. Dalam dasawarsa terakhir ini fasilitas perhubungan dan angkutan, listrik dan air minum dalam lingkungan industri berskala besar tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan mereka, bahkan tenaga listrik yang berkelebihan dari PT.AAF dan PT. PIM telah disalurkan kepada masyarakat lingkungan di Kecamatan Dewantara oleh KUD dan dalam waktu yang tidak begitu lama akan diperluas jaringannya hingga mencapai Kecamatan Kutamakmur yang juga berada di sekitar Zona Industri Lhokseumawe ini, dimana sebahagian besar penduduknya adalah merupakan para petani, yaitu dalam Kecamatan Dewantara terdapat 70,9% rumah tangga pertanian dengan luas tanah garapan diperkirakan sekitar 1,64 Ha per rumah tangga pertanian dan telah menghasilkan padi dengan tingkat produktivitasnya 5,3 Ton/Ha, sedangkan di Kecamatan Kutamakmur terdapat 93,9% rumah tangga pertanian dengan luas tanah garapannya relatif lebih kecil yaitu 0,76 Ha/rumah tangga pertanian dengan tingkat produktivitas padi sawah 4,8 Ton/Ha.

Selain dari pada itu, pelabuhan Lhokseumawe telah dibangun dengan kondisi yang relatif lebih baik, sehingga kapal-kapal yang berbobot mati sekitar 20.000 Ton dapat berlabuh rapat ke dermaga dengan tenang dan mudah dapat melakukan kegiatan bongkar muat, walaupun masih ada fasilitas-fasilitas pelabuhan yang perlu ditambah dan dilengkapi untuk memungkinkan kelancaran ekspor hasil-hasil pertanian baik yang berasal di sekitar Zona Industri maupun yang berasal dari Zona Pertanian. Hanya saja fasilitas jalan yang menghubungkan daerah pelabuhan Lhokseumawe ini dengan sentra-sentra produksi di Zona Pertanian Aceh bahagian Barat-Selatan-Tengah dan Tenggara propinsi ini, masih perlu ditingkatkan dan dibangun untuk kelancaran pertumbuhan output sektor pertanian.

Selain dari pada itu industri yang berskala besar yang telah muncul di Zona Industri, diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan Zona Pertanian, melalui pemanfaatan fasilitas

pendidikan dan balai latihan yang telah dilengkapi dengan berbagai peralatan dan work shop untuk mendidik dan melatih tenaga-tenaga yang dibutuhkan oleh Zona Pertanian. Begitu pula dengan fasilitas laboratorium yang telah ada di Zona Industri, dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan mutu/kwalitas komoditi, terutama untuk memenuhi standar ekspor. Disamping perangkat keras, hendaknya perangkat lunak yang berada di Zona Industri diharapkan juga dapat ditransfer ke Zona Pertanian, misalnya Industri-industri Berskala Besar yang telah memiliki jaringan ekspor atau relasi dagang di luar negeri diharapkan juga dapat dimanfaatkan dalam pemasaran komoditas zona pertanian, misalnya informasi pasar, promosi, dan lain-lain sebagainya.

Disamping itu pembangunan Industrial Estate, kawasan berikat dan Export Processing Zone di Zona Industri sekitar Lhokseumawe diperkirakan akan lebih mendorong pembangunan pertanian di propinsi ini, sehingga pada gilirannya dapat mendorong ekspor nonmigas hasil pertanian yang merupakan kebijakan nasional yang harus disukseskan di propinsi ini.

Dengan demikian pembangunan Zona Pertanian adalah merupakan suatu proses perubahan kehidupan sosial ekonomi, kehidupan sosial budaya dan sosial politik masyarakat dari sistem tradisional yang tingkat produktivitas dan tingkat efisiensi yang masih relatif rendah ke arah penggunaan teknologi yang lebih canggih dan lebih mutakhir dengan tingkat produktivitas dan tingkat efisiensi yang lebih tinggi lagi. Bila kita amati dunia pertanian pada dewasa ini kenyataannya menggambarkan kepada kita ada dua type pertanian yang berbeda yaitu: Pertama, pertanian yang tidak efisien dengan produktivitasnya yang masih rendah, banyak dijumpai di negara-negara yang sedang berkembang, dimana dalam banyak hal sektor pertanian tidak dapat menopang para petaninya, sekalipun pada tingkat subsisten yang minimum, padahal penduduknya terus berkembang dengan pesat. Kedua, pertanian dengan tingkat efisiensi yang sudah tinggi, banyak terdapat di negara-negara yang telah maju dimana terdapat kapasitas produksi dan output per tenaga kerja yang relatif lebih tinggi, sehingga dengan jumlah petani yang sedikit dapat memberi makan bagi seluruh rakyat.

Berdasarkan kenyataan yang telah kami kemukakan tersebut, maka proses perubahan dan pertumbuhan sektor pertanian pada umumnya melalui 3 tahap yaitu: (1). Pertanian yang masih sangat primitif, adalah usaha tani subsisten dengan produktifitas yang rendah. (2). Tahap ini kegiatan usaha pertanian sudah "beragam" atau "campuran", dimana sebahagian hasilnya digunakan untuk konsumsi pribadi dan sebahagian lagi untuk dijual ke pasar. (3). Usaha tani "modern" yang secara khusus mengarah kepada pertanian yang berproduktivitas tinggi dan berada dalam bentuk spesialisasi yang hasilnya ditujukan untuk pasar komersial.

Berdasarkan gambaran tersebut dapat dijelaskan bahwa modernisasi pertanian dalam pasar campuran adalah sebagai suatu tahapan transisi yang gradual tetapi berkesinambungan dari proses produksi subsisten menjadi pertanian yang terspesialisasikan. Akan tetapi transisi semacam itu bukan hanya sekedar reorganisasi struktur ekonomi pertanian atau memperkenalkan teknologi pertanian yang baru semata-mata. Kita telah melihat bahwa bagi kebanyakan masyarakat tradisional, pertanian bukan merupakan kegiatan ekonomi semata-mata, tetapi juga cara hidup (way of life). Setiap negara yang mencoba untuk mentransformasikan pertanian tradisional ini harus menyadari bahwa dalam penyesuaian struktur pertanian, sangat perlu untuk memahami perubahan-perubahan yang mempengaruhi seluruh struktur sosial, politik dan kelembagaan masyarakat tani di wilayah pedesaan. Tanpa perubahan-perubahan tersebut, pembangunan pertanian tidak pernah dapat dimulai atau hanya akan memperbesar jurang perbedaan antara para pemilik lahan yang luas dengan para petani penyewa, penggarap, penyakab dan mereka yang tidak memiliki lahan sama sekali, yang miskin dan menderita. Berdasarkan hal-hal tersebut, sebelum melakukan pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan di Zona Pertanian, sangat perlu terlebih dahulu memahami, mengenai proses evolusi untuk mentransformasikan para petani subsisten tradisional menjadi petani spesialisasi yang modern dan komersial.

IV. UPAYA MINIMISASI DAMPAK NEGATIF DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kehadiran Zona Industri Lhokseumawe (ZILS) di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, telah membawa dampak yang cukup berarti dalam pertumbuhan ekonomi Nasional. Ia telah menyumbang dan memperkuat posisi Neraca Perdagangan kita, yang tercermin dalam komposisi nilai ekspor Aceh terhadap nilai ekspor Nasional semenjak tahun 1977 sampai dengan saat sekarang ini, peranannya semakin meningkat, sehingga porsi nilai ekspor Aceh bervariasi antara 11 - 18 % pertahunnya terhadap nilai ekspor nasional dalam periode 5 tahun terakhir ini. Namun demikian di luar minyak bumi dan gas alam peran ekspor Aceh masih relatif kecil yaitu bervariasi antara 1 - 2 % pertahunnya dalam priode yang sama. Akan tetapi dalam tahun-tahun terakhir ini ekspor non migas dari Aceh telah meningkat dengan kecepatan yang cukup tinggi (lihat index nilai ekspor non migas dalam lampiran). Atas dasar itulah, maka pihak pemerintah telah menaruh perhatiannya yang cukup besar terhadap kawasan ZILS ini. Berbagai studi dan usaha telah dilakukan untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari pada kehadiran ZILS di Propinsi Daerah Istimewa Aceh ini. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah sungguhpun ZILS telah mampu memberikan sumbangannya yang besar terhadap pemupukan devisa dan penerimaan negara, namun yang ingin diketahui, sampai berapa jauh ZILS dapat memberikan dampak/sumbangannya terhadap perluasan kesempatan kerja, pemerataan dan peningkatan pendapatan serta baku mutu kehidupan dari pada masyarakat Indonesia yang mendiami kawasan ZILS dan sekitarnya, disamping itu dampak negatif apakah yang telah ditimbulkan oleh ZILS ini? Dalam kaitan inilah, kami berupaya menelusuri masalah yang telah berlangsung di ZILS, sehingga dapat melahirkan beberapa pemikiran untuk pemecahannya dalam pelaksana pembangunan di tahun-tahun mendatang, disamping berupaya memanfaatkan potensi alam yang merupakan rahmat dari Ilahi untuk diproses, dirobah, diupayakan menjadi nikmat bagi hambaNya yang hidup di masa kini dan masa mendatang.

Sebagaimana telah kami jelaskan terdahulu, bahwa masuknya kegiatan ekonomi yang berteknologi tinggi melalui

sektor pertambangan dan industri di wilayah ini, yang kegiatan masyarakatnya masih berorientasi pada penggunaan teknologi tradisional telah menyebabkan timbulnya perbedaan dan ketimpangan nyata dalam kehidupan mereka yang tercermin pada pola dan tatanan kehidupan masyarakat dalam wilayah, seperti di Kabupaten Aceh Utara ini. Hal tersebut telah menyebabkan perbedaan dalam tingkat produktivitas, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kehidupan serta organisasi kegiatan ekonomi masyarakat, sungguh sangat berbeda antara sektor-sektor yang telah maju dengan sektor tradisional. Sebab musabab timbulnya gejala tersebut telah diungkapkan dalam bahagian terdahulu, Perbedaan tersebut dapat digolongkan dalam beberapa jenis dualisme antara lain adalah dualisme sosial; dualisme teknologi; dualisme finansial; dan dualisme regional.

Pemerintah Orde Baru bersama masyarakat telah berbulat tekad melaksanakan pembangunan, tantangan demi tantangan akan dihadapi dan dilalui untuk mencapai tujuan baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat regional. Dengan demikian masuknya teknologi maju adalah sesuatu yang tak dapat dihindari, hanya masalah dimensi waktu saja yang menentukannya, sehingga munculnya dualisme seperti yang terjadi di banyak negara/daerah yang membangun melalui penggunaan teknologi canggih, memang sesuatu hal yang diperkirakan akan terjadi. Dan hal ini dialami tidak hanya oleh negara kita, tetapi juga telah dialami oleh banyak negara yang melaksanakan pembangunan, hanya intensitas dalam dualisme tersebut berbeda antara satu negara dengan yang lainnya, tergantung pada kondisi wilayah di saat masuknya teknologi canggih tersebut. Oleh karenanya masalah ini merupakan bahagian dari kegiatan pembangunan dalam priode berikutnya. Jadi berdasarkan uraian tersebut, upaya memperkecil gap/ketimpangan serta upaya memperkecil intensitas dualisme tersebut perlu segera dilaksanakan melalui program pembangunan yang lebih terarah dan terpadu dari seluruh sektor dan aspek kehidupan yang berada pada tingkat desa, direncanakan secara wajar dan rasional dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Pengamatan kami yang masih sangat terbatas, karena kendala waktu, telah memberikan gambaran bahwa desa-desa

yang berada dalam lingkungan kawasan industri ini, menunjukkan bahwa kegiatan masyarakat pada umumnya berada dalam sub-sektor pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, usaha kerajinan rumah tangga seperti sulam-sulaman, anyam-anyaman dan jasa-jasa. Pada umumnya organisasi produksi, baik dalam usaha pertanian maupun dalam kegiatan usaha industri kecil/rumah tangga, masih sangat lemah sehingga usahanya relatif kurang efisien, yang semakin dipertajam dengan penggunaan peralatan yang masih sederhana. Hal tersebut telah menyebabkan tingkat produktivitas dan kualitas dari komoditi yang dihasilkan masih relatif rendah. Kondisi kegiatan usaha masyarakat yang sedemikian itu pada gilirannya akan memberikan dampak pada pemasaran. Dalam hubungan ini pembinaan organisasi produksi dan pemasaran hasil yang lebih sesuai dengan pola tingkah laku konsumen menjadi sangat penting, sehingga komoditi yang dihasilkan benar-benar dapat terserap baik oleh pasar dalam negeri maupun untuk pasar luar negeri. Tentu saja, jenis komoditi yang perlu dianjurkan, selain didukung oleh potensi lingkungan, juga harus memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor.

Disamping hal-hal tersebut, pada tingkat pedesaan, sarana produksi masih sangat kurang, bimbingan dan penyuluhan masih sangat perlu peningkatannya sesuai dengan komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat pedesaan tersebut.

Selanjutnya masalah "Cara bagi hasil" dan pemilikan lahan oleh rumah tangga pertanian juga akan berpengaruh pada tingkat produktivitas usaha tani: misalnya di Zona Industri jumlah rumah tangga pertanian yang menguasai lahan antara 0-0,25 Ha diperkirakan bervariasi antara 10-22 % dan rumah tangga pertanian yang hanya menguasai lahan milik sendiri bervariasi antara 40-62 % terhadap total rumah tangga pertanian yang berada di Zona Industri, sedangkan di Zona Pertanian rumah tangga yang menguasai lahan milik sendiri relatif lebih banyak yaitu bervariasi antara 70-85% terhadap total rumah tangga pertanian di zona pertanian. Prasarana perhubungan, irigasi, drainage di daerah-daerah pertanian masih merupakan hambatan dalam upaya peningkatan produksi sektor tersebut. Untuk mengatasi kesukaran tersebut memerlukan

penanganan masalah secara lebih terpadu di antara instansi-instansi/Dinas-dinas yang terkait serta direncanakan secara lebih tepat sesuai dengan kondisi lapangan pada tingkat pedesaan. Selanjutnya masalah kesempatan kerja pada dewasa ini, bukan hanya merupakan masalah regional, tetapi juga menjadi masalah nasional, bahkan internasional. Disamping upaya peningkatan produksi sektor pertanian dan subsektor industri kecil di sekitar ZILS, juga upaya pembangunan industri menengah yang terkait input outputnya dengan industri-industri yang berada di ZILS, diperkirakan akan sangat membantu upaya perluasan kesempatan kerja bagi tenaga-tenaga yang mulai memasuki pasaran tenaga kerja yang berada di daerah ini. Upaya pembangunan kawasan industri (industrial estate) yang penelitiannya telah pernah dilakukan oleh lembaga Penelitian Ekonomi dan masyarakat, Universitas Indonesia, perlu direalisasikan dalam waktu yang tidak begitu lama agar masalah kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat dapat terbantu melalui program tersebut.

Munculnya dualisme finansial juga sangat berpengaruh pada peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi yang masih belum berkembang serta kegiatan usahanya berada dalam skala kecil dengan pemakaian tenaga kerja rata-rata 1-2 orang per-unit usaha. Kalau sektor modern, masalah aliran uang dan modal disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan yang organisasinya sudah cukup canggih, dengan tingkat cost of money yang relatif lebih rendah, tentu akan mendorong dan merangsang produksi kearah yang lebih tinggi. Sedangkan dalam sektor tradisional yaitu usaha kegiatan pertanian rakyat dan usaha industri rumah tangga yang berskala kecil, masalah arus uang dan modal tersalur lewat Unorganised money market dengan cost of money yang relatif lebih tinggi, hal tersebut dapat mematahkan animo dan semangat berproduksi dalam masyarakat pedesaan. Bayangkan bila peng-ijon, tengkulak dan tuan tanah yang meminjamkan uang atau modal kepada unit-unit usaha kecil yang berada diseluruh pelosok pedesaan. Upaya pemecahan masalah Unorganised money market dapat ditempuh melalui pembangunan lembaga-lembaga kredit non Bank pada tingkat Kecamatan sebagaimana yang telah terbangun dalam 19 Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Aceh Tenggara, lembaga-lembaga tersebut dalam

waktu lebih kurang 1 (satu) tahun sudah berjalan dan berkembang, sehingga telah membantu lebih dari 2.500 nasabah.

V. PENUTUP

Keberhasilan upaya pembangunan di daerah, disamping adanya suatu KONSEPSI yang konsisten dengan KONSTELASI kehidupan ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat setempat, dilengkapi dengan kebijakan (policy) yang tercakup dalam perencanaan yang matang, mantap, selaras dan serasi, juga sangat diperlukan wiraswasta (entrepreneurships) tidak saja sebagai aparat swasta, tetapi juga sebagai aparat Pemerintah, sehingga ia mampu melihat dan mencari peluang agar setiap terobosan yang dilakukan mampu menjangkau sasaran yang telah direncanakan.

Disamping itu, partisipasi, dedikasi, kesungguhan, dan keuletan dari semua pihak terutama Pemerintah, Swasta dan masyarakat luas sejak dari pusat sampai ke daerah pada tingkat pedesaan dimana sumber daya alam itu dianugerahi oleh Ilahi, akan sangat menentukan kemampuan untuk menjangkau target yang telah ditetapkan.

Dunia ini telah diamanahkan kepada manusia oleh Ilahi, karena manusia adalah makhluk yang oleh KHALIK diberikan akhlak dan khuluk, oleh karenanya pembangunan yang merupakan suatu proses untuk merubah RAKHMAT menjadi NIKMAT, dapatlah diupayakan agar tidak mendatangkan MUDHARAT dan LAKNAT bagi umat manusia dan makhluk dimasa mendatang.

Demikianlah, beberapa masalah, informasi, konsepsi, dan pemikiran yang dapat kami sampaikan semoga dapat dijadikan bahan diskusi, untuk melahirkan pemikiran yang lebih tajam dan interdisipliner dalam mewujudkan kebijakan pembangunan daerah yang didambakan oleh bangsa dan negara kita dimasa kini dan masa mendatang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- 1) Maynard M. Hufschmidt, et. al., **Environmental, Natural Systems and Development**, An Economic valuation Guide, The Johns Hopkins, University Press, 1983.
- 2) Martin Cave & P.Hare, **Alternative Approaches to Economic Planning**, The Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke, 1981.
- 3) Todoru, Michael P., **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**.
- 4) **Internal migration in developing Countries**, A review of theory, Evidence, methodology, and research Priorities, Geneva International Labor Office, 1976.
- 5) Sutcliffe, R.B., **Industry and underdevelopment** Addison - Wesley Publishing Company, London, 1971.
- 6) BPS, **Statistik Indonesia 1987 dan Pendapatan Regional Propinsi, 1983 - 1986**.

**/ Guru besar Ekonomi UNSYIAH, dan kini juga sebagai Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh.*

**TABEL 1. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAERAH
ISTIMEWA ACEH MENURUT SEKTOR PADA HARGA KONSTAN 1983 (NON
MIGAS) TAHUN 1978-1987.**

(dalam %)

SEKTOR	1978-1983	1978-1987	1983-1987	1984-1987
1. Pertanian	8,62	5,34	1,38	2,92
2. Pertambangan dan Penggalian	8,76	-3,29	-16,49	-16,75
3. Industri Pengolahan	29,70	20,73	10,39	9,49
4. Listrik dan Air Minum	29,62	21,79	12,66	12,89
5. Bangunan/Konstruksi	16,61	-0,64	-18,65	-19,73
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	12,88	8,55	3,37	4,22
7. Pengangkutan dan Komunikasi	22,56	15,26	6,75	6,90
8. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	30,26	22,34	13,13	16,66
9. Sewa Rumah	2,53	2,52	2,51	2,44
10. Pemerintahan dan Pertahanan	11,39	10,04	8,38	7,65
11. Jasa-jasa	22,62	11,85	10,41	12,41

SUMBER : BAPPEDA ACEH, 1988.

TABEL 2. KOMPOSISI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (NON MINYAK DAN GAS)
 PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH MENURUT SUMBANGAN SEKTOR USA-
 HA (RATA-RATA SETAIHUN DALAM %). ----

LAPANGAN USAHA	1972	1983	1984	1985	1986	1987
1. SEKTOR PRODUKSI PRIMER	61,6	50,38	48,47	45,29	45,49	44,74
1.1. Pertanian	61,6	50,05	48,19	45,09	45,25	44,49
1.2. Pertambangan	-	0,33	0,28	0,20	0,24	0,25
2. SEKTOR PRODUKSI SEKUNDER	11,6	12,51	12,97	14,47	13,85	14,18
2.1. Industri	8,8	8,67	9,74	11,44	11,20	11,39
2.2. Bangunan/Konstruksi	2,8	3,84	3,23	3,03	2,65	2,79
3. SEKTOR PRODUKSI TERTIER	26,8	37,11	38,56	40,24	40,66	41,08
3.1. Pemerintahan, Perdagangan, Perbankan, Perhubungan dsb.	26,8	37,11	38,56	40,24	40,66	41,08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100

SUMBER : PENDAPATAN REGIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH (Diolah Kembali).

**TABEL 3. KOMPOSISI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH MENURUT SUMBANGAN SEKTOR USAHA (RATA-RATA
SETAHUN DALAM %).**

LAPANGAN USAHA	1972	1983	1984	1985	1986	1987
1. SEKTOR PRODUKSI PRIMER	61,6	83,93	85,86	84,09	85,7	85,62
1.1. Pertanian	61,6	16,21	13,22	13,12	11,87	11,58
1.2. Pertambangan	-	67,72	72,64	70,97	73,83	74,04
2. SEKTOR PRODUKSI SEKUNDER	10,16	4,05	3,56	4,21	3,64	3,69
2.1. Industri	8,8	2,81	2,67	3,33	2,94	2,96
2.2. Bangunan/Konstruksi	2,8	1,24	0,89	0,88	0,70	0,73
3. SEKTOR PRODUKSI TERTIER	28,24	12,02	10,58	11,7	10,66	10,69
3.1. Pemerintahan, Perdagangan, Perbankan, Perhubungan dsb.	28,24	12,02	10,58	11,7	10,66	10,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

SUMBER : PENDAPATAN REGIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH (Diolah Kembali).

TABEL 4. DISTRIBUSI PROSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HAR- GA KONSTAN, 1983, TAHUN 1983-1987.

LAPANGAN USAHA	1972	1983	1984	1985	1986	1987
1. Pertanian	61,6	16,21	13,22	13,12	11,87	11,58
2. Pertambangan dan Penggalian	-	67,72	72,64	70,97	73,83	74,04
3. Industri Pengolahan	8,8	2,81	2,67	3,33	2,94	2,96
4. Listrik dan Air Minum	0,2	0,08	0,08	0,09	0,08	0,09
5. Bangunan/Konstruksi	2,8	1,24	0,89	0,88	0,70	0,73
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	13,1	5,00	4,24	4,50	4,01	3,98
7. Pengangkutan dan Komunikasi	2,6	3,72	3,33	3,88	3,46	3,44
8. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	0,7	0,22	0,19	0,23	0,25	0,29
9. Pemerintahan dan Pertahanan	4,4	2,16	2,01	2,14	2,07	2,12
10. Sewa Rumah	5,6	0,41	0,36	0,37	0,33	0,32
11. Jasa-jasa	0,2	0,43	0,38	0,49	0,47	0,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

SUMBER : ACEH DALAM ANGKA, 1988.

TABEL 5. DISTRIBUSI PROSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (NON MINYAK DAN GAS) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH MENURUT LAPANG-AN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN, 1983 TAHUN 1983-1987.

LAPANGAN USAHA	1983	1984	1985	1986	1987
1. Pertanian	50,05	48,19	45,09	45,25	44,49
2. Pertambangan dan Penggalian	0,33	0,28	0,20	0,24	0,25
3. Industri Pengolahan	8,67	9,74	11,44	11,20	11,39
4. Listrik dan Air Minum	0,25	0,28	0,29	0,31	0,36
5. Bangunan/Konstruksi	3,84	3,23	3,03	2,65	2,79
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,42	15,45	15,48	15,28	15,28
7. Pengangkutan dan Komunikasi	11,48	12,13	13,35	13,18	13,20
8. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	0,69	0,71	0,80	0,94	1,11
9. Sewa Rumah	1,27	1,30	1,29	1,26	1,25
10. Pemerintahan dan Pertahanan	6,66	7,32	7,35	7,91	8,14
11. Jasa-jasa	1,33	1,38	1,67	1,79	1,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

SUMBER : ACEH DALAM ANGKA, 1988.

**TABEL 6. DISTRIBUSI PERSENTASE PENGGUNAAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN, 1983-1987 (%).**

PERINCIAN	1983	1984	1985	1986	1987
1. Konsumsi Rumah Tangga	17,22	15,17	15,30	15,58	15,41
2. Konsumsi Lembaga Swasta yang tidak Mencari Untung	0,21	0,17	0,16	0,16	0,13
3. Konsumsi Pemerintah	3,14	2,45	2,37	2,57	2,45
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,51	3,17	4,51	3,13	3,92
5. Perubahan Stock	3,49	4,76	4,37	5,59	4,39
6. Ekspor	79,43	81,23	80,67	79,15	86,43
7. Impor	13,00	6,95	7,38	6,18	12,73
TOTAL PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

SUMBER : KANTOR STATISTIK DAERAH ISTIMEWA ACEH.

**TABEL 7. PERBANDINGAN EKSPOR MIGAS DAN NON MIGAS DI PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH 1982-1988.**

KOMODITI	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
1. MIGAS	98,54	97,69	97,19	96,9	97,05	94,24	92,77
2. NON MIGAS	1,46	2,31	2,81	3,10	2,95	5,76	7,23
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100

SUMBER : PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA ACEH, BAPPEDA (diolah).

**TABEL 8. INDEKS PERKEMBANGAN EKSPOR MIGAS DAN NON MIGAS PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH PERIODE 1983-1988 (1983 = 100).**

TAHUN	MIGAS	NON MIGAS	TOTAL
1983	100	100	
1984	118,11	144,37	262,48
1985	107,29	145,34	252,63
1986	121,57	156,21	277,78
1987	103,47	267,60	371,07
1988	99,42	327,54	426,96

SUMBER : PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA ACEH, BAPPEDA (Diolah).

**TABEL 9. NILAI EKSPOR MIGAS DAN NON MIGAS PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
PERIODE 1983-1988.**

(000 US \$)

TAHUN	MIGAS	NON MIGAS	TOTAL
1983	2.103.598	49.752	2.153.350
1984	2.484.542	71.824	2.556.366
1985	2.256.916	72.314	2.329.230
9186	2.557.139	77.720	2.634.859
1987	2.176.534	133.136	2.309.670
1988	2.091.471	162.959	2.254.430

SUMBER : PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA ACEH, BAPPEDA (Diolah).

TABEL 10. KOMPOSISI EKSPOR DAERAH ISTIMEWA ACEH PERIODE 1960- 1988.

TAHUN	KARET	Kopi	KELAPA SAWIT	KOPRA	KAYU & PLYWOOD	UDANG	SEMEN	PUPUK	LAIN-LAIN	TOTAL
1960	62,1	6,2	8,3	16,7	-	-	-	-	6,7	100
1961	49,4	9,5	14,8	16,7	-	-	-	-	6,9	100
1962	55	8,8	12,4	7,6	0,4	-	-	-	15,8	100
1963	44,7	8	14,7	24,3	0,7	-	-	-	7,6	100
1964	44	10,4	10,5	17,5	1	-	-	-	18,-	100
1965	39,1	10,7	33,4	12,2	0,5	-	-	-	4,1	100
1966	38,8	18,4	19,6	20,8	0,4	-	-	8	4	100
1967	20,8	26,1	21,5	22,1	3,6	-	-	-	5,9	100
1968	20,7	27,2	21,1	25,5	2,5	-	-	-	4	100
1969	32,8	39,3	15,5	8,1	2,1	-	-	-	2,2	100
1970	18,1	35,5	27,3	7,8	8,2	-	-	-	3,1	100
1971	12	29,9	26	2,7	23	-	-	-	6,4	100
1972	7,6	29,8	23,1	0,1	32,9	-	-	-	6,6	100
1973	6,6	20,6	13,5	0,1	52,4	-	-	-	6,8	100
1974	6,5	16,4	10,4	-	56,5	-	-	-	10,2	100
1975	6	17,5	23,9	-	44,6	-	-	-	8,1	100
1976	5,6	16,9	23,9	-	46,3	-	-	-	7,7	100
1977	6,9	25,8	6,9	-	54,7	-	-	-	5,7	100
1978	3,6	8,9	26,5	-	46,1	-	-	-	4,6	100
1979	0,6	25,8	14,6	-	51,1	9,3	-	-	3,8	100
1980	0,4	30,1	15,8	-	45,7	4,1	-	-	5,9	100
1981	3,5	28,1	7,4	-	54,5	1,7	-	-	4,8	100
1982	1,8	49,7	6,4	-	31,5	5,9	-	-	4,7	100
1983	5,8	58,5	6,4	-	16,1	4,3	-	-	3,5	100
1984	6,7	47,7	0,1	-	13,2	3,2	-	24	2,5	100
1985	7,2	53,1	2,6	-	12,8	3,9	-	14,5	3	100
1986	0,7	68,6	0,7	-	14,9	3,8	-	2,7	3,9	100
1987	3,9	13,5	2,09	-	14,8	6,9	-	49,6	4,8	100
1988	0,14	13,7	4,4	-	23,8	5,05	-	47,3	1,9	100

SUMBER : KANWIL DEPARTEMEN PERDAGANGAN ADEH (Diolah).

TABEL 11. REALISASI VOLUME DAN NILAI EKSPOR MENURUT JENIS DAN KOMODITI DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, TAHUN 1988.

KOMODITI	SATUAN	VOLUME	NILAI (US \$)
1. Kopi Robusta	Kg	7.626.970,00	12.197.045,21
2. Kopi Arabika	Kg	3.464.865,00	10.186.679,91
3. Udang Segar	Kg	499.335,20	8.239.251,82
4. Ikan Hias	Kg	19.668,00	19.668,00
5. Minyak Ikan Hiu	Kg	69.360,00	329.065,00
6. Lolak	Kg	2.450,00	9.800,00
7. Biji Pinang Bulat	Kg	576.810,00	226.747,07
8. Jahe Segar	Kg	663.243,00	126.710,35
9. Damar	Kg	12.000,00	1.827,37
10. Hati Rotan	Kg	2.881,00	5.104,93
11. Tapioka Chiss	Kg	891.163,00	108.721,89
12. Bulkurea Fertilizer	Kg	577.479.834,00	77.097.773,91
13. Portland Cement	Kg	246.055.750,00	6.112.716,50
14. Kayu Gergajian	Kg	87.626,83	13.504.247,11
15. Plywood	Kg	71.307,64	24.897.708,29
16. Kayu Bakau (Pulp Wood/Chipwood)	M3	22.312,80	492.878,80
17. Black Board	M3	649,41	158.833,34
18. Karet RSS-I	Kg	222.045,00	238.215,24
19. Minyak Kelapa Sawit	Kg	18.992.838,00	7.206.330,49
20. Minyak Kelapa	Kg	350.000,00	175.000,00
21. Minyak Nilam	Kg	24.500,00	435.000,00
22. Minyak Pala	Kg	1.800,00	41.443,00
23. Minyak Bunga Pala	Kg	13.112,60	373.896,07
24. Minyak Sere	Kg	5.250,00	33.300,75
25. Eogenol	Kg	3.000,00	7.791,00
26. Arang Kayu	Kg	5.482.800,00	655.107,92
27. Arang Tempurung	Kg	104.000,00	10.320,80
28. Rotan Semambu	Kg	49.600,00	78.163,21
A. Jumlah Non Gas Alam			162.959.347,85
29. L.N.G.		9.556.177.261,00	1.333.574.530,88
30. Condensate		4.714.985.705,00	714.232.285,55
31. L.P.G.		652.200.375,00	43.664.497,69
B. Jumlah Gas Alam			2.091.471.314,12
JUMLAH A + B			2.254.430.661,97

SUMBER : KANWIL DEPARTEMEN PERDAGANGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

**TABEL 12. PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA
KONSTAN 1983 MENURUT PROPINSI, 1983-
1986**

PROPINSI/KEPULAUAN	1983	1984	1985	1986
1. Daerah Istimewa Aceh	5,74	6,28	6,07	6,57
2. Sumatera Utara	4,73	4,68	4,69	4,65
3. Sumatera Barat	1,75	1,68	1,71	1,67
4. Riau	10,68	8,89	7,66	8,26
5. Jambi	0,75	0,73	0,76	0,74
6. Sumatera Selatan	4,39	4,47	4,61	4,71
7. Bengkulu	0,34	0,35	0,35	0,36
8. Lampung	1,47	1,50	1,55	1,58
SUMATERA	29,88	28,60	27,42	28,57
JAWA DAN BALI	53,26	54,19	55,52	54,91
PROPINSI-PROPINSI LAIN	16,86	17,21	17,06	16,52
INDONESIA	100	100	100	100

SUMBER : PENDAPATAN REGIONAL PROPINSI-PROPINSI DI
INDONESIA, BPS, JAKARTA (Diolah Kembali).

TABEL 13. KONTRIBUSI NILAI EKSPOR ACEH TERHADAP EKSPOR INDONESIA.

	ACEH		INDONESIA	
	RIBUAN US \$	(%)	JUTAAN US \$	(%)
1986	2.634.859	17,79	14.805,0	100
1987	2.309.670	13,37	17.273,2	100

SUMBER : Pendapatan Nasional dan Aceh dalam Angka (Diolah Kembali).

TABEL 14. INDEKS PDRN PER KAPITA ATAS DASAR BIAYA FAKTOR PRODUKSI MENURUT HARGA BERLAKU 1986 (Indonesia = 100).

PROVINSI	TERMASUK MIGAS	TANPA MIGAS
1. Daerah Istimewa Aceh	325,3	122,8
2. Sumatera Utara	91,3	103,6
3. Sumatera Barat	87,2	103,3
4. Riau	391,8	113,6
5. Jambi	78,2	86,2
6. Sumatera Selatan	137,4	111,7
7. Bengkulu	75,3	89,2
8. Lampung	48,3	57,2
9. DKI Jakarta	259,2	307,0
10. Jawa Barat	88,4	99,7
11. Jawa Tengah	66,2	78,4
12. DI Yogyakarta	70,5	83,5
13. Jawa Timur	90,0	106,6
14. Kalimantan Barat	78,7	93,2
15. Kalimantan Tengah	109,9	130,2
16. Kalimantan Selatan	88,4	104,7
17. Kalimantan Timur	713,1	163,3
18. Sulawesi Utara	65,4	77,5
19. Sulawesi Tengah	64,3	76,2
20. Sulawesi Selatan	67,9	80,4
21. Sulawesi Tenggara	65,2	77,3
22. Bali	110,2	130,5
23. Nusa Tenggara Barat	45,9	54,3
24. Nusa Tenggara Timur	44,1	52,2
25. Maluku	81,5	96,6
26. Irian Jaya	143,0	96,3
27. Timor Timur	38,4	45,5
INDONESIA	100	100

SUMBER : PENDAPATAN REGIONAL PROPINSI-PROPINSI DI INDONESIA, BPS, JAKARTA (diolah).

TABEL 15. PDRN PER KAPITA ATAS DASAR BIAYA FAKTOR PRODUKSI MENURUT HARGA BERLAKU, 1986.

(Rp)

PROVINSI	TERMASUK MIGAS	TANPA MIGAS
1. Daerah Istimewa Aceh	1.678.916	535.191
2. Sumatera Utara	471.299	451.774
3. Sumatera Barat	450.421	450.421
4. Riau	2.022.140	495.086
5. Jambi	404.009	375.984
6. Sumatera Selatan	709.569	487.000
7. Bengkulu	388.797	388.797
8. Lampung	249.337	249.337
9. DKI Jakarta	1.338.030	1.338.030
10. Jawa Barat	456.640	434.776
11. Jawa Tengah	341.643	341.643
12. DI Yogyakarta	363.849	363.849
13. Jawa Timur	464.589	464.849
14. Kalimantan Barat	406.450	406.450
15. Kalimantan Tengah	567.600	567.600
16. Kalimantan Selatan	456.416	456.416
17. Kalimantan Timur	3.680.351	711.938
18. Sulawesi Utara	337.941	337.941
19. Sulawesi Tengah	332.306	332.306
20. Sulawesi Selatan	350.516	350.516
21. Sulawesi Tenggara	336.944	336.944
22. Bali	568.983	568.983
23. Nusa Tenggara Barat	236.929	236.929
24. Nusa Tenggara Timur	227.890	227.890
25. Maluku	420.957	420.957
26. Irian Jaya	738.156	419.947
27. Timor Timur	198.298	198.298
INDONESIA	516.051	435.742

SUMBER PENDAPATAN REGIONAL PROPINSI-PROPINSI DI
INDONESIA, BPS, JAKARTA.

**TABEL 16. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA ATAS
 DASAR HARGA KONSTAN 1983 MENURUT PENGGUNAANNYA (%).**

JENIS PENGGUNAAN	1984	1985	1986 *	1987 **
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,01	59,96	59,58	60,39
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerin- tah	10,69	11,22	11,09	10,69
3. Pembentukan Modal Tetap Do- mestik Bruto	22,84	20,93	20,80	20,97
4. Perubahan Stock ***	1,32	5,49	5,12	3,97
5. Ekspor Barang-barang dan Jasa- jasa	26,31	23,61	25,97	26,59
6. Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa	21,17	21,12	22,56	22,61
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00

SUMBER : PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA 1984-1987, BPS JAKARTA.

* Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

*** S i s a

TABEL 17. REKAPITULASI PERKEMBANGAN LUAS AREAL PERKEBUNAN RAKYAT DAN PERKEBUNAN BESAR DI DAERAH ISTIMEWA ACEH SELAMA PELITA IV....

JENIS KOMODITI	1984/1985	1985/1986	1986/1987	1987/1988	1988/1989	LAJU PER- TUMBUHAN
1. K A R E T	50,0	61,0	63,2	77,0	78,8	12,04
2. K E L A P A S A W I T	32,7	38,4	39,9	55,9	59,4	16,09
3. K E L A P A	95,7	95,4	95,6	99,7	100,5	1,23
4. K O P I	59,4	59,9	57,2	57,7	69,4	3,59
5. C E N G K E H	35,0	31,8	32,8	44,1	45,1	6,54
6. P A L A	5,0	5,1	4,9	5,3	5,9	4,22
7. P I N A N G	13,8	13,4	13,6	14,0	14,4	1,10
8. K A P U K / R A N D U	1,8	1,1	2,3	2,3	2,5	8,56
9. J A M B U M E T E	3,0	1,9	2,0	1,5	1,5	-15,91
10. C O K L A T	0,7	0,8	1,0	2,0	2,85	42,04
11. K E M I R I	5,6	5,8	6,5	6,53	8,48	10,93
12. T E M B A K A U	2,9	8,8	8,8	8,79	5,43	19,27
13. T E B U	6,6	5,3	5,4	2,25	2,42	-22,18
14. N I L A M	3,1	2,9	4,7	6,35	7,54	24,88

**TABEL 18. PERKEMBANGAN LUAS AREAL KOMODITAS PERKEBUNAN RAKYAT DI
DAERAH ISTIMEWA ACEH SELAMA PELITA**

NO.	JENIS TANAMAN	PRA PELITA (1968/1969)	AKHIR PELITA			
			I (1973/1974)	II (1978/1979)	III (1983/1984)	IV (1988/1989)
1.	Karet	30.627	25.912	22.237	31.817	41.741
2.	Kelapa	58.992	76.838	85.019	91.923	100.462
3.	Kopi	32.788	31.301	32.997	58.368	68.357
4.	Cengkeh	3.101	9.560	16.001	32.845	45.095
5.	Tebu	-	1.202	1.419	2.420	2.421
6.	Pala	2.709	3.840	4.705	4.917	5.891
7.	Lada	584	393	166	266	412
8.	Pinang	32.526	25.995	11.233	14.738	14.359
9.	Kapuk	930	920	1.190	1.689	2.533
10.	Nilam	873	1.377	190	3.474	7.539
11.	Coklat	-	-	-	449	1.334
12.	Tembakau	3.007	4.647	3.010	2.414	5.825
13.	Kemiri	-	-	-	5.635	8.483
14.	Jambu Mete	-	-	465	3.707	1.546

CATATAN : *) ANGKA SEMENTARA

SUMBER : INFORMASI PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA ACEH SELAMA PELITA,
BAPEDA. 1988, HAL. 53.

**TABEL 19 REKAPITULASI PERKEMBANGAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN RAK-
YAT DAN PERKEBUNAN BESAR DI DAERAH ISTIMEWA ACEH SELAMA PELITA IV.**

JENIS KOMODITI	1984/1985	1985/1986	1986/1987	1987/1988	1988/1989	LATU PERTUM- BUHAN (%)
1. KARET	17,7	17,1	17,3	20,8	23,7	7,57
2. KELAPASAWIT	87,9	90,8	92,4	96,8	110,0	5,77
3. KELAPA	67,2	63,9	46,2	49,9	67,1	-0,03
4. KOPI	22,6	24,1	47,5	40,7	32,1	9,17
5. CENGKEH	5,1	4,0	7,0	5,2	6,2	5,00
6. PALA	2,1	2,0	2,1	2,3	2,8	7,46
7. PINANG	9,5	9,4	7,0	6,1	6,1	-10,48
8. KAPUK/RANDU	0,9	0,3	1,2	1,2	1,4	11,68
9. JAMBU METE	0,05	0,01	0,05	0,13	0,13	26,98
10. COKLAT	0,01	0,01	0,05	0,12	0,15	97,00
11. KEMIRI	34,2	33,9	5,2	5,57	5,57	-36,47
12. TEMBAKAU	1,7	3,3	3,6	3,86	2,88	14,09
13. TEBU	21,9	16,1	18,3	0,15	1,35	-50,17
14. NILAM	0,23	0,25	0,3	0,37	0,28	5,04

SUMBER : BAPPEDA ACEH, 1988

TABEL 20. PERKEMBANGAN LUAS AREAL KOMODITI PERKEBUNAN RAKYAT DI DAERAH ISTIMEWA ACEH SELAMA PELITA IV.-

NO.	JENIS TANAMAN	PELITA IV					LAJU PERTUMBUHAN (%)
		1984/1985	1985/1986	1986/1987	1987/1988	1988/1989 *)	
1.	Karet	31.707	35.520	38.995	39.155	41.741	7,11
2.	Kelapa	95.357	95.477	95.639	99.685	100.462	1,31
3.	Kopi	59.429	59.815	57.202	57.739	68.357	3,56
4.	Cengkeh	34.957	31.823	32.719	44.075	45.095	6,57
5.	Tebu	2.277	2.090	2.160	2.251	2.421	6,32
6.	Pala	5.036	5.058	4.893	5.297	5.891	4,00
7.	Lada	266	160	240	362	412	11,56
8.	Pinang	13.727	13.439	13.583	14.032	14.359	1,02
9.	Kapuk	1.836	1.123	2.313	2.335	2.533	8,38
10.	Nilam	3.109	2.855	4.739	6.353	7.539	24,79
11.	Coklat	539	562	802	1.155	1.334	25,43
12.	Tembaku	2.948	9.801	8.783	8.789	5.825	18,56
13.	Kemiri	5.643	5.765	6.530	6.530	8.483	10,72
14.	Jambu Mete	2.959	1.867	2.048	1.491	1.546	-14,98

CATATAN : *) ANGKA SEMENTARA
 SUMBER : INFORMASI PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA ACEH SELAMA PELITA, BAPPEDA. 1988, HAL. 54.

TABEL 21. PERKEMBANGAN PRODUKSI KOMODITI PERKEBUNAN RAKYAT DI DAERAH
ISTIMEWA ACEH SELAMA PELITA IV.-

NO.	JENIS TANAMAN	P E L I T A I V					LAJU PERTUM- BUHAN (%)
		1984/1985	1985/1986	1986/1987	1987/1988	1988/1989 *)	
1.	K a r e l	12.405	12.374	12.808	14.442	15.232	5,27
2.	Kelapa	67.229	63.854	46.247	49.933	67.060	-0,05
3.	K o p i	22 586	24.062	47.473	40.681	32.056	9,15
4.	Cengkeh	5.127	3.996	6.984	5.229	6.219	4,94
5.	Tebu	11.020	8.824	10.474	151	1.351	-40,82
6.	P a l a	2.147	2.026	2.026	2.618	2.809	6,95
7.	Lada	14	11	12	33	33	23,91
8.	Pinang	9.532	9.408	0,917	6.114	6.114	-10,51
9.	Kapuk	903	340	1.190	1.236	1.300	11,35
10.	Nilam	228	249	274	372	282	5,46
11.	C o k l a t	-	-	29	89	118	-
12.	Tembakau	1.665	3.305	3.597	3.860	2.883	14,71
13.	Kemiri	24.235	33.854	5.272	5.573	5.573	-30,75
14.	Jambu Mete	51	12	45	125	125	25,12

CATATAN : *) ANGKA SEMENTARA
SUMBER : INFORMASI PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA ACEH SELAMA PELITA,
BAPEDA. 1988, HAL. 54.

TABEL 22. PERKEMBANGAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN RAKYAT DI DAERAH ISTIMEWA ACEH SELAMA PELITA.

(Ton)

NO.	JENIS TANAMAN	PRA PELITA (1968/1969)	AKHIR PELITA			
			I (1973/1974)	II (1978/1979)	III (1983/1984)	IV (1988/1989*)
1.	Karet	9.621	8.395	9.467	10.658	15.232
2.	Kelapa	55.487	38.603	64.588	67.753	67.060
3.	Kopi	9.702	10.851	15.838	36.541	32.056
4.	Cengkeh	791	1.240	1.703	7.182	6.219
5.	Tebu	-	5.963	8.330	11.402	1.351
6.	Pala	630	685	1.606	2.164	2.909
7.	Lada	121	143	48	8	33
8.	Pinang	9.201	10.242	8.755	10.039	6.114
9.	Kapuk	155	189	466	800	1.388
10.	Nilam	16	121	17	350	282
11.	Coklat	-	-	-	-	118
12.	Tembakau	3.016	3.023	2.192	1.372	2.883
13.	Kemiri	-	-	-	33.348	5.573
14.	Jambu Mete	-	-	11	47	125

CATATAN : *) ANGKA SEMENTARA

SUMBER : INFORMASI PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA ACEH SELAMA PELITA, BAPPEDA. 1988, HAL. 53.

**TABEL 23. INDIKATOR EKONOMI DAN SOSIAL DIPERINCI MENURUT KABUPATEN DI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

1	2	3	4	5	6	7	8
Nomor Kode	Kolamadya/ Kabupaten	Pendapatan Perkapita Dirjen Agraria 1987	Persentase Desa Swadaya dari jumlah de- sa BANGDES 1986	Persentase Rumah Tangga Pertanian POIDES 1986	Persentase Pekerja Di Lu- ar Pertanian dari Penduduk Dewasa Sensus Ekonomi 1986	Luas Tanah Pertanian yang digarap per ru- mah tangga pertanian 1987	Persentase Rumah Tangga Pertanian yang menguasai La- han 0,00 - 0,24 Ha Sensus Per- tanian 1983
Kb 1	Sabang		11,1 %	47,3 %	16,3 %	3,17	1,9 %
Kb 2	Banda Aceh		0,0 %	4,9 %	19,8 %	-	10,2 %
Kb 3	Aceh Besar	278294	7,6 %	73,1 %	10,9 %	1,34	11,7 %
Kb 4	Pidie	268377	18,6 %	82,4 %	14,6 %	0,89	17,2 %
Kb 5	Aceh Utara	310303	52,9 %	73,4 %	13,1 %	1,82	21,6 %
Kb 6	Aceh Tengah	291321	0,6 %	81,1 %	10,1 %	1,85	1,7 %
Kb 7	Aceh Timur	238566	6,6 %	62,8 %	10,1 %	1,61	15,1 %
Kb 8	Aceh Tenggara	266978	7,4 %	86,7 %	6,7 %	2,23	5,0 %
Kb 9	Aceh Barat	269625	19,9 %	75,3 %	8,4 %	1,87	8,3 %
Kb 10	Aceh Selatan	279529	3,4 %	82,8 %	9,4 %	1,57	15,4 %

SUMBER : BAPPEDA TK I ACEH LTA 77-c, "KONDISI SOSOK MASYARAKAT ACEH MENURUT KABUPATEN DAN
KECAMATAN", NOMOR : 129/BAPPEDA/1989.-

Nomor Kode		9	10	11	12	13	14
	Kotamadya/ Kabupaten	Persentase rumah tangga yang hanya menguasai tanah milik sendiri Sensus Pertanian 1983	Produktivitas padi sawah Ton/Ha Distrik 1987	Jumlah ternak besar per jum- lah rumah per- tanian DIS- NAK 1987	Jumlah rumah tangga pertani- an per PPL DISTAN 1987	Jumlah rumah tangga per- tanian per kios Saprodi POT- DES 1986	Presentase desa yang ja- raknya lebih dari 10 km dari ibu kota keca- matan POTDES 1986
Kb 1	Sabang	97,3 %	3,7	2,5	343	1320	27,8 %
Kb 2	Banda Aceh	90,8 %	-	2,8	-	110	5,7 %
Kb 3	Aceh Besar	54,0 %	2,4	3,1	588	173	12,4 %
Kb 4	Pidie	44,0 %	6,5	2,7	2343	164	2,4 %
Kb 5	Aceh Utara	61,9 %	3,6	1,7	1496	261	16,2 %
Kb 6	Aceh Tengah	82,9 %	2,9	1,4	1252	589	26,5 %
Kb 7	Aceh Timur	71,6 %	4,6	2,5	948	830	33,4 %
Kb 8	Aceh Tenggara	71,8 %	2,6	1,4	1004	546	17,0 %
Kb 9	Aceh Barat	78,9 %	2,2	2,5	502	1126	44,5 %
Kb 10	Aceh Selatan	73,9 %	3,7	0,4	1519	1143	31,0 %

Nomor Kode		15	16	17	18	19	20
	Kotamadya/ Kabupaten	Persentase desa yang ti- dak dapat di- lewati kende- raan roda 4 - POTDES 986	Perubahan Per- sentase Per- desa yang tidak dapat dilewati kendaraan roda 4 1980- 1986	Jumlah penduk per dokter DEPKES 1987	Jumlah penduk per pa- ramedis DEP- KES 1987,	Jumlah penduk per Pus- kesmas/Kelili- ng DEPKES 1987	Persentase Desa yang ti- dak mengu- nakan jamban/ kakus POT- DES 1986
Kb 1	Sabang	0,0 %	-	13623	1297	13630	44,4 %
Kb 2	Banda Aceh	1,1 %	-	23530	2496	32956	6,8 %
Kb 3	Aceh Besar	16,5 %	*6,8 %	18019	1303	16687	37,3 %
Kb 4	Pidie	16,4 %	-36,4 %	17196	1563	17271	36,7 %
Kb 5	Aceh Utara	28,7 %	-11,4 %	29191	2245	28186	11,9 %
Kb 6	Aceh Tengah	18,1 %	-20,0 %	20296	1864	20357	1,8 %
Kb 7	Aceh Timur	36,4 %	-17,6 %	28688	2698	28964	8,8 %
Kb 8	Aceh Tenggara	31,9 %	-22,5 %	18437	2711	18478	16,6 %
Kb 9	Aceh Barat	40,9 %	-38,2 %	18421	1598	18512	68,4 %
Kb 10	Aceh Selatan	9,3 %	-59,6 %	18018	2252	18100	73,4 %

*PERUBAHAN BATAS KABUPATEN ACEH BESAR DAN KOTAMADYA BANDA ACEH TAHUN 1983.

		21	22	23	24	25	26
Nomor Kode	Kotamadya/ Kabupaten	Persentase de- sa yang meng- gunakan air su- ngai/danau sebagai sumber air minum/ masak POTDES 1986	Perubahan per- sentase desa yang menggu- nakan air su- ngai sebagai sumber air mi- num/masak 1980-1986	Persentase buta huruf dari orang dewasa KANDEP P&K 1987	Persentase penduduk 7-12 tahun yang masih sekolah POTDES 1986	Murid SD/MIN/MIN per guru P&K 1987	Murid SD/MIN/MIS per kelas P&K 1987
Kb 1	Sabang	0,0 %	-11,8 %	2,8 %	97,4 %	28	23
Kb 2	Banda Aceh	1,1 %	* 2,6 %	0,8 %	95,4 %	20	33
Kb 3	Aceh Besar	3,4 %	* 2,6 %	5,3 %	90,6 %	19	26
Kb 4	Pidie	3,1 %	-0,4 %	21,5 %	94,6 %	24	29
Kb 5	Aceh Utara	3,7 %	-3,0 %	15,0 %	95,0 %	28	35
Kb 6	Aceh Tengah	19,9 %	-5,5 %	12,3 %	95,2 %	23	27
Kb 7	Aceh Timur	12,3 %	3,4 %	9,7 %	92,3 %	32	38
Kb 8	Aceh Tenggara	20,5 %	-6,0 %	8,1 %	93,9 %	23	25
Kb 9	Aceh Barat	17,1 %	-3,0 %	6,6 %	92,1 %	25	27
Kb 10	Aceh Selatan	24,9 %	0,6 %	5,7 %	89,7 %	26	28

*PERUBAHAN BATAS KABUPATEN ACEH BESAR DAN KOTAMADYA BANDA ACEH TAHUN 1983.

Nomor Kode	Kota/madya /Kabupaten	27	28	29	30	31	32	33
		Rasio Murid SD/MTN/ MIS dengan murid SLTP /MTSM/MTS di kecamatan	Murid SMP/MTSn/MTs kelas	Jumlah penduduk per mesjid menurut POTDES 1986	Rasio jumlah mesjid dengan jumlah desa POTDES 1986	Persentase penambahan jumlah mesjid 1980-1986	Persentase rumah yang langg- ganan listrik	Jumlah pekerjaan perusahaan di sektor non-pertanian SENSUS EKONOMI 1986
Kb 1	Sabang	3,4	40	1781	0,83	7 %	45,8 %	1,6
Kb 2	Banda Aceh	1,7	44	2647	0,69	*49 %	81,0 %	2,5
Kb 3	Aceh Besar	3,8	38	1503	0,24	*49 %	20,4 %	1,9
Kb 4	Pidie	3,4	41	1958	0,21	14 %	10,3 %	1,6
Kb 5	Aceh Utara	4,3	41	2255	0,23	11 %	16,4 %	2,2
Kb 6	Aceh Tengah	3,8	36	1047	1,03	37 %	21,6 %	2,1
Kb 7	Aceh Timur	4,1	44	1527	0,47	44 %	16,6 %	1,9
Kb 8	Aceh Tgr.	3,5	40	1021	0,77	32 %	14,3 %	1,8
Kb 9	Aceh Barat	4,2	40	675	0,67	28 %	8,8 %	1,7
Kb 10	Aceh Selatan	4,3	39	763	0,84	23 %	11,1 %	1,6

*PEROBAHAN BATAS KABUPATEN ACEH BESAR DAN KOTAMADYA BANDA ACEH TAHUN 1983.

KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA ACEH

ISTIMEWA ACEH

Dr. Ir. H.M. Amin Aziz

KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Oleh : Dr. Ir. H.M. Amin Aziz

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan pembangunan nasional dan memperhatikan gambaran umum masyarakat Aceh dewasa ini dan masyarakat Aceh di masa depan, maka tujuan pembangunan jangka panjang Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah membangun masyarakat seutuhnya, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan keamanan.

Pembangunan di daerah Aceh selama Pelita III telah membawa daerah ini ke suatu posisi yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan nasional karena merupakan salah satu penghasil devisa. Berbagai kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan seperti prasarana perhubungan, irigasi dan berbagai sarana sosial telah memungkinkan kegiatan ekonomi dan nasional masyarakat berjalan secara lancar. Meskipun pembangunan di berbagai bidang telah dilaksanakan, namun masih ada permasalahan yang masih belum terpecahkan, disamping itu adanya pembangunan juga menimbulkan permasalahan baru.

Sesuai dengan potensi yang ada, Daerah Istimewa Aceh terbagi menjadi dua zona pembangunan yaitu zona industri dan zona pertanian. Dengan memperhatikan struktur ekonomi daerah Aceh sampai dengan tahun 1975/1977 nampak masih didominasi sektor pertanian, dimana sumbangannya terhadap PDRB 57,79 persen akan tetapi setelah dimulainya pembangunan indutri gas alam tahun 1975 maka sejak tahun 1979 sektor pertambangan menggeser dan menjadi dominan, dengan menyumbang 83,93 persen dari total PDRB.

Perkembangan industri yang pesat ini disamping menggeser peranan sektor pertanian dalam perekonomian daerah, juga mempengaruhi kegiatan pertanian di kedua zona pembangunan tersebut.

Dalam zona industri, hal tersebut menimbulkan berbagai perubahan, seperti terjadi ledakan penduduk, perubahan mata

pencaharian sebahagian besar penduduk semula yang menjadi petani menjadi buruh di sektor industri dan jasa, dan selain itu dengan meningkatnya kegiatan industri akan memerlukan lahan yang cukup luas sehingga areal pertanian yang masih produktif akan berubah penggunaannya, dan pada gilirannya kegiatan pertanian akan beralih ke areal yang kurang produktif.

Dalam skala yang lebih luas pembangunan yang lebih berkonsentrasi di sektor industri akan menyebabkan sektor pertanian, terutama yang berada di zona pertanian akan jauh tertinggal. Zona industri yang lebih maju setidaknya akan menjadi daya tarik bagi penduduk untuk mendapatkan income yang lebih baik ketimbang dari sektor pertanian.

Masalah yang cukup mendasar adalah, apakah sektor industri mampu untuk menyerap tenaga kerja yang beralih dari sektor pertanian, sedangkan pertumbuhan angkatan kerja di daerah Aceh periode 1980-1985 meningkat sebesar 2,26 persen per tahun.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Daerah Istimewa Aceh, maka persentase tertinggi (76,72%) adalah penduduk dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD), tidak tamat SD dan penduduk yang tidak/belum pernah sekolah (Tabel 1).

Mengingat 70% penduduk bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar penduduk (90%) bertempat tinggal di pedesaan, maka usaha untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas dapat dilakukan melalui pembangunan pertanian/pedesaan baik di zona industri maupun zona pertanian. Untuk itu perlu kajian-kajian dan kebijaksanaan operasional pembangunan pertanian, dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan yang lebih merata, seimbang tidak hanya antar sektor di daerah Aceh tetapi antar wilayah di seluruh propinsi.

II. POTENSI DAERAH DAN PERMASALAHANNYA

2.1. Potensi Daerah

Perkembangan pembangunan pada zona industri yang begitu cepat khususnya di Aceh Utara, yaitu dengan beroperasinya eksploitasi LNG PT. Arun, Pabrik Pupuk Iskandar Muda, AAF dan Pabrik Kertas KKA serta

perusahaan-perusahaan pengeboran minyak, tidak disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang seimbang oleh karena perusahaan industri lebih menerapkan prinsip pengelolaan padat modal dari pada padat karya.

Pembangunan yang memberikan dampak positif adalah dalam penyerapan tenaga kerja cukup seimbang dengan pendapatan daerah adalah sektor pertanian atau agribisnis. Pembangunan sektor pertanian ini akan berpengaruh langsung dalam peningkatan pendapatan masyarakat, karena sebagian besar penduduk hidup dari sektor pertanian.

Bila dilihat dari jumlah penduduknya maka daerah zone industri lebih banyak penduduknya dibanding zone pertanian. Jumlah penduduk di zone industri 2.003.125 jiwa (66.94 persen), sedang penduduk di zone pertanian 989.076 jiwa (33.06 persen). Kepadatan penduduk di zone industri 104.5 jiwa/km^2 , di zone pertanian 27.3 jiwa/km^2 (tahun 1985).

Kegiatan ekonomi terpenting adalah pertanian dan produksi terpenting adalah bahan pangan terutama beras. Potensi komoditi pertanian di daerah ini menurut sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan adalah :

Tanaman Pangan

Beberapa komoditi pertanian tanaman pangan yang ditanam di daerah zone pertanian mempunyai hasil per hektar lebih tinggi dibanding daerah zone industri, seperti komoditi kacang hijau, jagung, ubi kayu. Perbedaan produktivitas tanaman pangan di zone industri dan zone pertanian ditunjukkan pada lampiran Tabel:6.

Tanaman Perkebunan

Komoditi perkebunan terpenting adalah karet, kelapa sawit, kelapa dan tebu. Selain komoditi tersebut kopi arabika tumbuh baik di daerah Aceh Tengah dan Aceh Tenggara, kabupaten lain menghasilkan kopi robusta. Jenis tanaman perkebunan lain yang dapat dikembangkan di daerah ini adalah cengkeh, coklat, jambu mete, kemiri, tembakau, pala, nilam, pinang dan randu.

Perikanan

Rawa-rawa di Aceh Timur dan Aceh Selatan merupakan hutan bakau dan dapat dimanfaatkan untuk usaha pertambakan. Dari areal yang sudah dibudidayakan terbanyak diusahakan untuk tambak selebihnya untuk kolam. Daerah yang telah mengusahakan tambak udang yaitu di Aceh Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur, sedang kolam ikan terbanyak diusahakan di Aceh Tenggara. Luas areal pertambakan di daerah zone industri lebih luas dari pada zone pertanian, akan tetapi areal kolam di zone pertanian lebih luas dari pada di zone industri. Produksi tambak udang yang sudah ada antara 200 - 800 kg/ha/tahun. Untuk perikanan laut potensi yang besar ialah di Pantai Barat dan Selatan Aceh dengan pusatnya di Pulau Seumeuleu atau Teluk Sibigo dengan produksi sekitar 59.915 ton per tahun (1983). Cold Storage yang ada saat ini di Lhok Seumawe dengan kapasitas 390 ton dan di Sabang dengan kapasitas 900 ton.

Peternakan

Keadaan populasi dan jenis ternak yang ada di Aceh cukup besar, baik di zone pertanian maupun di zone industri. Di antara jenis ternak di daerah ini yang potensial untuk dikembangkan adalah kambing, ayam sayur, dan ayam ras dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya 9.59 persen, 8.72 persen, 6.14 persen (1985).

2.2. Permasalahan

Sebagaimana telah dibahas bab sebelumnya, bahwa struktur ekonomi di Daerah Istimewa Aceh pada mulanya didominasi oleh sektor pertanian, tetapi setelah proyek vital yang berdasarkan pada gas base, ekonomi daerah didominasi oleh sektor pertambangan dan energi (migas). Hal ini menyebabkan ketimpangan tidak saja secara struktural, tetapi juga secara spatial dimana konsentrasi lebih menonjol di zona industri. Apabila pembangunan sektor pertanian tidak ditingkatkan terutama dalam penggunaan teknologi baru, dikhawatirkan akan menjadi ketimpangan yang lebih menyolok antara sektor pertanian dan sektor industri.

Akan tetapi pengembangan sektor pertanian, terlebih lebih di zona pertanian mengalami berbagai permasalahan antara lain :

1. Prasarana angkutan darat, masih dalam kondisi yang kurang memuaskan dimana wilayah-wilayah dalam zona pertanian relatif terisolasi, sehingga menghambat usaha-usaha pemasaran hasil pertanian. Prasarana angkutan yang tersedia hanyalah pelabuhan untuk kapal kecil yang terdapat di Meulaboh.
2. Prasarana irigasi, yang dapat menunjang pembangunan pertanian tanaman pangan di zona pertanian masih kurang memadai. Dari data statistik terlihat bahwa kurang lebih 66 persen (140.354 ha) jaringan irigasi terdapat di zona industri.

3. Pembentukan modal relatif kecil, karena modal tersebut biasanya bersumber dari masyarakat itu sendiri. Terbatasnya pembentukan modal pada pertanian tradisional akan mengakibatkan produktifitas lahan dan tenaga kerja rendah. Kecilnya permodalan di zona pertanian ini dapat pula dilihat dari jumlah dana dan perkembangan kredit perbankan sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Dana dan Perkembangan Kredit Perbankan 1985-1986

Uraian	Zona Pertanian		Zona Industri	
	1985	1986	1985	1986
1. Dana Perbankan	10.091.767 (10.6)	12.811.258 (11.2)	85.117.315 (89.4)	101.943.053 (88.8)
2. Kredit Perbankan	24.532.289 (15.3)	26.622.951 (14.1)	136.136.166 (84.7)	162.657.785 (84.9)

Sumber : Aceh Dalam Angka, 1987

Angka dalam kurung menunjukkan persen

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah dana dan kredit yang di zona pertanian kecil sekali dibandingkan dengan di zona industri.

Untuk zona pertanian jumlah dana yang berasal dari perbankan pada tahun 1985 hanya berkisar 10,6 persen dari total keseluruhan. Bahkan untuk tahun 1986 kenaikannyapun secara relatif kecil sekali (kurang lebih 0,6%). Adapun jumlah kredit perbankan dalam bentuk kredit investasi kecil dan modal kerja hanya untuk zona pertanian pada tahun 1985 hanya 15,3 persen dari total kredit yang pada tahun 1986 secara relatif menurun menjadi 14,1 persen.

4. Hambatan lainnya adalah belum berkembangnya kelembagaan di zona pertanian baik kelembagaan ekonomi seperti KUD, Bank serta lembaga-lembaga sosial disamping itu perusahaan industri terutama yang menunjang agro-industri masih belum berkembang. Hal ini tidak saja karena prasarana perhubungan yang kurang memadai juga masih kurangnya investasi di bidang agro-industri dapat disebabkan karena penyebaran penduduk dan kualitas kerja/ketrampilan yang tidak merata antara kedua zona.

III. ARAH PEMBANGUNAN

Pembangunan pertanian /pedesaan di zona industri dan zona pertanian dapat dilakukan sesuai dengan potensi yang ada di kedua zona tersebut. Potensi pembangunan di kedua zona dapat diidentifikasi setidaknya-setidaknya melalui pasar, teknologi, manajemen, modal dan kewiraswastaan.

1. PASAR

Kegiatan ekonomi terpenting di daerah ini adalah pertanian. Produksi pertanian terpenting adalah bahan pangan, terutama beras. Daerah Istimewa Aceh termasuk daerah surplus beras dan kelebihan beras di daerah ini dijual ke Sumatera Utara.

Komoditi ekspor lain yang dihasilkan dari daerah ini adalah kayu, kelapa sawit, dan kopi. Kayu dan kelapa sawit berasal dari Aceh Timur dan Aceh Selatan, sedang kopi dari Aceh Tengah. Beberapa komoditi perkebunan yang masih potensial untuk

dikembangkan di zona pertanian di antaranya adalah : karet rakyat, kelapa, kopi, cengkeh dan pala. Nilai ekspor komoditi pertanian tahun 1985 dan 1986 disajikan pada lampiran Tabel.

Hasil produksi perikanan laut dan darat yang memiliki nilai ekspor cukup tinggi adalah udang segar. Tahun 1985 nilai ekspor udang dari Aceh sebesar US \$ 2.813.544,81 dan tahun 1986 sedikit meningkat menjadi US \$ 2.964.448,76 (5,37%) daerah yang memproduksi udang terbesar adalah dari Kabupaten Aceh Utara.

Mengingat banyaknya komoditi yang potensial yang perlu dikembangkan lebih luas lagi, maka kegiatan pemasaran dan kelembagaan pasar harus ditangani secara serius.

Keterkaitan jumlah tenaga kerja dan tenaga terampil di zona pertanian dan zona industri merupakan kendala yang perlu diperhatikan dalam hal pengembangan usaha agribisnis di daerah ini.

Dengan demikian untuk lebih meningkatkan usaha pertanian dapat dilakukan melalui Pola Usaha Besar dan Pola Usaha Bersama.

1. Pengembangan dengan Pola Usaha Besar, dengan lebih banyak melibatkan pengusaha swasta. Agar investor nasional tertarik menanamkan modal di bidang agribisnis ini diperlukan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan/pengurusan Hak Guna Usaha (HGU), demikian pula birokrasi untuk permohonan dan pencairan kredit dipersingkat, persyaratan perkreditan diperlunak khususnya dalam hal penyediaan modal sendiri (self financing) atau garansi proyek.
2. Pengembangan usaha melalui usaha bersama, koperasi atau gabungan usaha kecil. Dengan memperhatikan kondisi dan potensi di daerah Aceh serta jenis usahanya (pertanian, tambak), maka skala usaha yang cocok untuk pengembangan pertanian antara 100-200 hektar per unit usaha, dengan melibatkan petani kecil antara 20- 40 petani, sedang pengelolaannya dengan sistem koperasi.

Pentahapan pengembangan unit-unit usaha bersama di masing-masing kabupaten mengikuti potensi lahan, tanaman yang diprioritaskan dan ketersediaan tenaga kerja. Pengembangan unit usaha di masing-masing kabupaten seperti pada tabel lampiran.

2. TEKNOLOGI

Dalam upaya pengembangan pertanian teknologi maju sangat diperlukan, terutama untuk komoditi pertanian yang akan diekspor. Penerapan teknologi baru dapat dilakukan menurut kajian-kajian sebelumnya baik yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pemerintah dan Universitas.

Sarana penunjang lain yang diperlukan untuk pengembangan pertanian adaah pembangunan kebun-kebun bibit untuk tanaman perkebunan maupun tanaman pangan, hortikultura dan tanaman industri. Karena sampai saat ini belum dibangun sarana pembibitan.

Teknis pembangunan kebun bibit dapat dilakukan pemerintah atau pengusaha swasta daerah. Sarana lain adalah Pusat Informasi Pertanian atau Pusat Informasi Agribisnis, diperlukan terutama dalam hal pengumpulan data/informasi dan penyebaran informasi. Untuk penyebaran informasi atau penerapan teknologi tepat guna dapat bekerjasama dengan koperasi atau Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat atau melalui kelompok-kelompok tani.

3. MANAJEMEN

Manajemen adalah suatu faktor produksi yang jarang diperhitungkan padahal manajemen adalah faktor yang sangat menentukan dalam proses produksi. Suatu lembaga yang mengembangkan ketrampilan manajemen perlu dibentuk dan dikembangkan.

Ketrampilan manajemen yang dikembangkan tidak dalam pengertian yang teoritis, tapi praktis, dan sesuai dengan sasaran tidak saja pengusaha-pengusaha besar, pengusaha-pengusaha kecil dan menengah tidak saja di ibukota-ibukota kabupaten tapi juga di kecamatan-kecamatan dan di desa-desa.

Lembaga ini perlu didukung oleh perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan negara, dan koperasi. Peserta-peserta latihan perlu diberikan kesempatan job training, latihan kerja di proyek-proyek, perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan demikian, pengetahuan manajemen akan dilengkapi dengan ketrampilan praktis dengan pengalaman teknis dan profesi manajemen. Sekaligus lembaga ini perlu memikirkan dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan

wiraswasta-wiraswasta dan tingkah laku kewiraswastaan baik di kalangan pengusaha maupun di kalangan bukan pengusaha.

Aspek lain dari manajemen ini yang sangat perlu dipertimbangkan adalah manajemen koperasi. Manajemen koperasi sangat penting artinya karena koperasi mengelola kehidupan ekonomi banyak orang, jutaan orang. Karena itu, kami mengusulkan dibentuknya suatu perusahaan atau koperasi jasa manajemen proyek-proyek koperasi, sebut saja misalnya LMUKA.

LMUKA melaksanakan suatu proyek koperasi dalam suatu jangka waktu tertentu sehingga berjalan baik dan mampu meneruskan menjalankan proyek tersebut andaikata ditinggalkan oleh LMUKA. Jadi KJMK membangun dan melaksanakan proyek, sekaligus membina dan memperkokoh kelembagaan koperasi dan didukung oleh anggota-anggotanya. Sedangkan proyek yang dilaksanakan itu adalah milik koperasi dan LMUKA mendapat fees untuk jasa pelaksanaan proyek dan pengembangan kelembagaan koperasi. Aspek lain dari kelembagaan, adalah memantau pengelolaan komoditi apakah akan dilaksanakan oleh usahatani rakyat, koperasi, perusahaan swasta, perusahaan negara atau PIR.

4. MODAL

a. Untuk Usahatani Rakyat

Permodalan untuk usahatani rakyat diharapkan dilakukan dengan suatu bentuk kredit atau bentuk-bentuk pinjaman yang disediakan oleh perbankan, seperti KUPEDes, KUT dan lain-lain.

b. Untuk Usaha Koperasi

Untuk proyek-proyek pembangunan dari koperasi, modal dari perbankan diharapkan akan lebih lancar dengan adanya LMUKA. Dengan pelaksanaan proyek dan pembinaan kelembagaan oleh LMUKA, lembaga perbankan akan lebih terjamin tentang pengelolaan dan pengembalian kredit dari proyek yang dibiayainya.

c. Untuk Usaha Swasta

Untuk proyek-proyek perusahaan swasta dana perbankan menghendaki adanya dana sendiri (self-financing) yang cukup berarti. Penyediaan dana sendiri ini perlu dilakukan dengan cara bergotong royong, sehingga memungkinkan penarikan dana perbankan untuk pelaksanaan proyek. Penyediaan dana sendiri juga dapat dikonsolidasikan dengan mengikutsertakan PT Bahana untuk proyek-proyek agro-industri.

d. Untuk Proyek PIR

Agar proyek-proyek PIR bisa terlaksana, maka kebijaksanaan permodalan perlu ditempuh demikian :

- d.1. perusahaan inti mendapat pinjaman penuh untuk pelaksanaan pembangunan perkebunan plasma.
- d.2. perusahaan inti mendapat kemudahan finansial yang lebih baik dalam pembangunan perkebunan inti dan unit pengolahannya.

5. KEWIRASWASTAAN

Usaha pertanian baik di zona pertanian maupun di zona industri umumnya terbatas pada usahatani-usahatani kecil. Terlebih-lebih dengan berkembangnya sektor industri, investor di bidang pertanian kurang sekali. Usahatani kecil dengan sendirinya tidak menciptakan lapangan kerja yang luas. Dengan tetap membiarkan sektor pertanian tidak berkembang akan semakin sulit untuk mengharapkan sumbangan yang besar dari sektor ini bagi pertumbuhan ekonomi daerah Aceh. Oleh karena itu disamping pengembangan sektor pertanian dalam skala usaha kecil perlu pula untuk mengembangkan sektor pertanian dalam skala besar seperti komoditi perkebunan.

Pengembangan komoditi ini membutuhkan investasi dari kelompok pengusaha dan manajer karena kelompok inilah yang

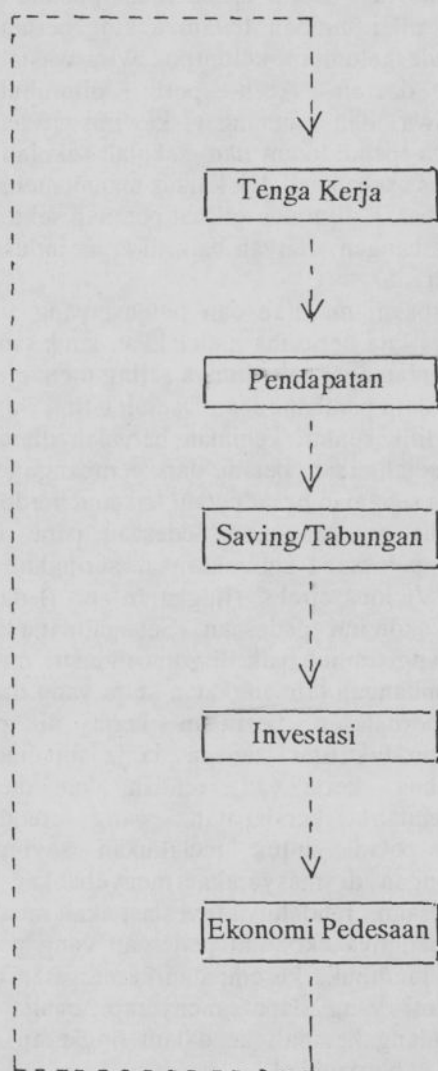
paling menentukan dalam mengkombinasikan sumberdaya alam, modal, tenaga kerja dan teknologi. Dengan demikian pengembangan inovasi dalam usaha menciptakan kesempatan kerja baru dan nilai tambah dalam sektor pertanian sangat tergantung kepada kelompok-kelompok wiraswasta ini. Untuk pengembangan daerah Aceh perlu ditumbuhkan dan dimantapkan jiwa dan semangat kewiraswastaan melalui lembaga-lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah kejuruan, politeknik, kursus usaha kecil dan kursus manajemen.

Dari pembahasan di muka terlihat peranan sektor pertanian terhadap pengembangan wilayah baik di zona industri maupun di zona pertanian.

Dengan berbagai masalah dan potensi yang ada tersebut sudah selayaknya kita berusaha meletakkan landasan yang kuat bagi sektor pertanian agar selanjutnya saling menunjang dengan sektor industri dalam pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

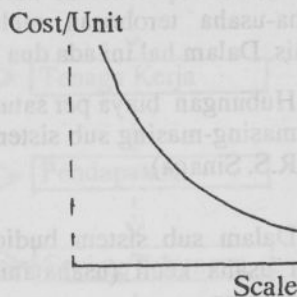
Untuk itu, titik sentral kegiatan haruslah diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani dan pembangunan wilayah pedesaan dimana sebagian besar petani tersebut berdomisili.

Dalam usaha pembangunan pedesaan para pakar pembangunan dan pelaksana kebijaksanaan seringkali terperangkap ke dalam "Vicious circle" (lingkaran setan) dari problem pengembangan ekonomi pedesaan. Sebagaimana terlihat dari permasalahan yang timbul baik di zona industri maupun zona pertanian perkembangan laju angkatan kerja yang tinggi di satu pihak dan keterbatasan lapangan kerja di pihak lain menyebabkan produktifitas tenaga kerja menjadi rendah, produktifitas tenaga kerja yang rendah akan menyebabkan pendapatan rendah, pendapatan yang rendah tidak memungkinkan petani untuk melakukan saving/tabungan, rendahnya tabungan di masyarakat menyebabkan rendahnya investasi di pedesaan, rendahnya investasi akan mengakibatkan kurang berkembangnya ekonomi pedesaan yang pada gilirannya tidak dapat membuka kesempatan-kesempatan baru dalam kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan selanjutnya berulang kembali ke dalam lingkaran setan yang tidak berujung dan berpangkal.

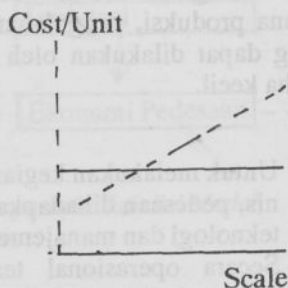


Gambar 1. "Vicious Circle" Kegiatan Ekonomi di Pedesaan

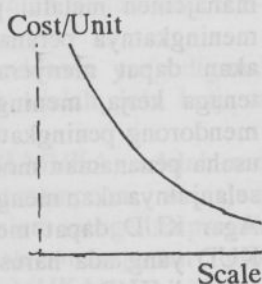
- (1) Pra produksi/Penyediaan Sarana



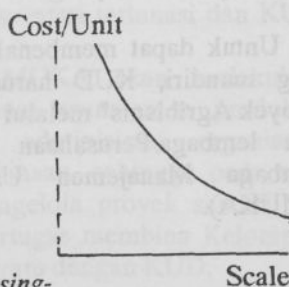
- (2) Budidaya Tanaman/Tambak/Ternak



- (3) Pengolahan



- (4) Pemasaran



Gambar 2.

Hubungan Biaya dengan Skala Usaha pada masing-masing Sub-sistem Agribisnis

Untuk dapat keluar dari lingkaran setan ini perlu adanya usaha-usaha terobosan melalui pengembangan sistem agribisnis. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu dipertimbangkan.

1. Hubungan biaya per satuan output dengan skala usaha pada masing-masing sub sistem dari sistem agribisnis (Sumber : R.S. Sinaga).

Dalam sub sistem budidaya tanaman (2) terlihat bahwa skala usaha kecil (usahatani rakyat) lebih efisien dari skala usaha besar.

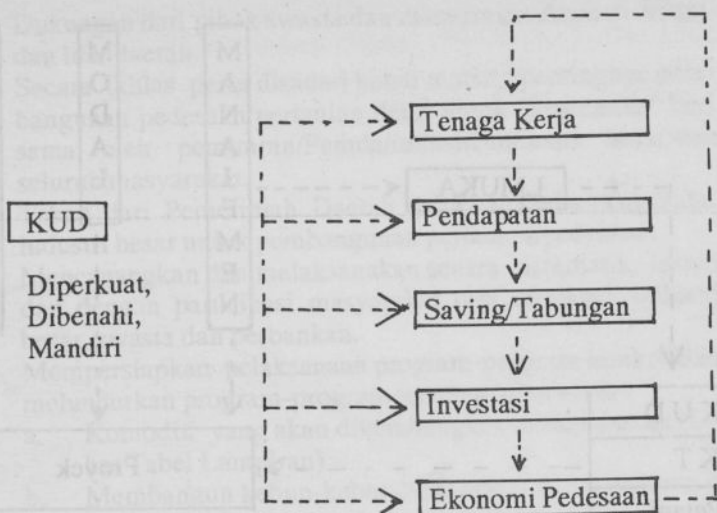
Sedangkan dalam sub sistem pra produksi/penyediaan sarana produksi, pengolahan dan pemasaran skala usaha besar yang dapat dilakukan oleh koperasi/swasta lebih efisien dari usaha kecil.

2. Untuk melakukan kegiatan pengembangan sistem Agribisnis, pedesaan dihadapkan pada masalah kekurangan modal, teknologi dan manajemen.

Secara operasional terobosan dapat dilakukan dengan memperbaiki kondisi permodalan, teknologi dan manajemen melalui peningkatan peranan KUD. Dengan meningkatnya peranan KUD dalam perekonomian desa akan dapat menyerap dan meningkatkan produktifitas tenaga kerja, meningkatkan pendapatan petani anggota, mendorong peningkatan usaha simpan pinjam, mendorong usaha penanaman modal/investasi di pedesaan yang untuk selanjutnya akan mengembangkan ekonomi pedesaan.

Agar KUD dapat menjalankan peranannya dengan baik, KUD yang ada harus diperkuat, dibenahi sehingga dapat menjadi KUD yang mandiri.

Untuk dapat membenahi KUD agar dapat menjadi KUD yang mandiri, KUD harus mempunyai dan melaksanakan "Proyek Agribisnis" melalui bantuan manajemen yang diberikan oleh lembaga/Perusahaan Swasta yang bergerak sebagai Lembaga Manajemen Usaha Koperasi dan Agribisnis (LMUKA).



Gambar 3. Peranan KUD dalam Memperbaiki kondisi Modal, Teknologi dan Manajemen.

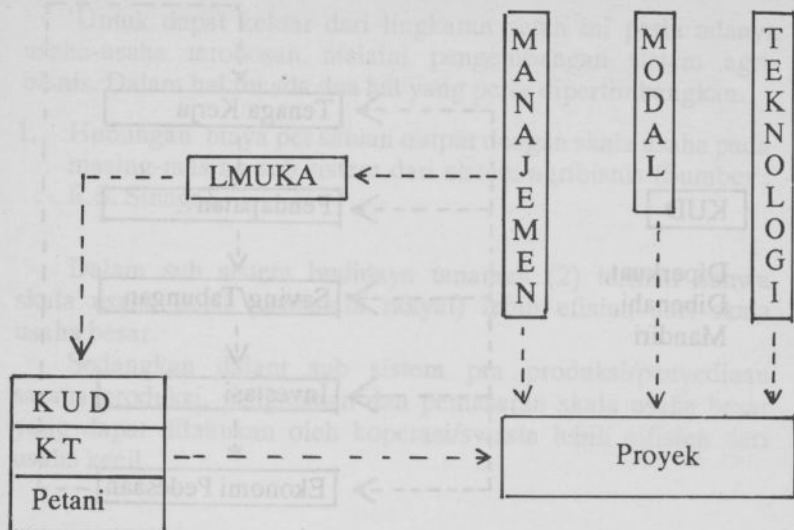
Proyek-proyek dapat dilakukan untuk skala usaha 100-200 Ha

Pola manajemen serta modal pendanaan yang digunakan dalam rangka pengembangan proyek adalah pola kerja sama "Management Contract"

Program Manajemen Contract (LMUKA) adalah mengalihkan dan mengembangkan kemampuan manajemen, teknologi serta kepemimpinan KUD dalam mengelola proyek.

Dalam kaitan ini, pengelolaan manajemen proyek sementara akan dilakukan oleh LMUKA dan lama pengelolaannya diperkirakan sampai investasi terlunasi dan KUD dipandang telah mandiri.

Selama mengelola proyek LMUKA akan melakukan pembinaan terhadap KUD mengenai manajemen produksi, pemasaran, keuangan, personalia, administrasi, organisasi/kelembagaan dan manajemen pembinaan, sehingga pada saat pelepasan, KUD telah mampu mengelola proyek sendiri. Di samping itu LMUKA juga telah bertugas membina Kelompok Tani sehingga kelembagaannya menyatu dengan KUD.



Gambar 4. Pola pembinaan KUD melalui LMUKA

IV. PENUTUP

Dari pembahasan yang telah disajikan di muka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijaksanaan operasional pembangunan di Daerah Istimewa Aceh dapat dilakukan melalui pembangunan pertanian dan pedesaan di masing-masing zona.

Agar pembangunan Daerah Istimewa Aceh dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dukungan dari Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, Bappenas, Departemen Keuangan dan departemen-departemen teknis yang lain seperti Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian dan lain-lain. Hal ini penting mengingat pendapatan daerah Aceh yang berasal dari ekspor cukup besar sedangkan anggaran pembangunan Pemerintah Daerah belum cukup memadai.

2. Dukungan dari pihak swasta dan masyarakat Aceh di dalam dan luar daerah.
 3. Secara ikhlas perlu disadari benar tentang pentingnya pembangunan pedesaan/pertanian demi untuk "keamanan" bersama oleh pemimpin/Pemda/industri-industri besar/dan seluruh masyarakat.
 4. Tekad dari Pemerintah Daerah dan pengusaha-pengusaha industri besar untuk pembangunan pertanian/pedesaan.
 5. Mencanangkan dan melaksanakan secara sistematis, lestari dan dengan partisipasi masyarakat luas termasuk industri besar, swasta dan perbankan.
 6. Mempersiapkan pelaksanaan program-program konkrit dan meluncurkan program-program tersebut antara lain :
 - a. Komoditi yang akan dikembangkan di tiap daerah (Lihat Tabel Lampiran)
 - b. Membangun kebun-kebun bibit secara besar-besaran di tiap wilayah, dengan bantuan industri-industri besar atau sumber lainnya (Lihat Tabel Lampiran)
 - c. Penyiapan latihan bagi penyediaan kader-kader pembangunan pedesaan yang berasal dari masyarakat sendiri.
 - d. Penyebaran bibit-bibit dan penanaman dengan penyuluhan dan pemeliharaan.
 - e. Proyek-proyek perbaikan sarana/prasarana ekonomi.
 - f. Mengerahkan lembaga-lembaga masyarakat seperti alim ulama, tuha Peuet, seniman seniwati lokal, untuk gerakan pembangunan pedesaan. Demikian pula dengan para cendekiawan, sarjana dan tokoh-tokoh yang berada di luar daerah.
 7. Menyiapkan seperangkat kelembagaan yang efektif untuk maksud itu.
-

* *Dr. Ir. H. M. Amin Aziz*
Direktur Pelaksanaan Pusat Pengembangan Agribisnis

Tabel L 1. Komposisi penduduk Daerah Istimewa Aceh berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan (1985).

PENDIDIKAN	JUMLAH PENDUDUK (ORANG)	% TERHADAP TOTAL
1. Tidak/belum pernah sekolah	151.538	13,88
2. Tidak/belum tamat SD	258.843	22,35
3. Sekolah Dasar	478.215	41,29
4. SMTP	150.456	12,99
5. SMTA	* 109.260	9,43
6. Diploma I/II	2.622	0,24
7. Akademi/ Diploma III	3.125	0,27
8. Universitas	4.034	0,35
TOTAL	1.158.093	100,00

Sumber : Indikator Ekonomi April 1988.

Tabel L : 2. Perkembangan Penduduk Berumur 10 tahun ke atas menurut lapangan usaha di DI Aceh Tahun 1986-tahun April 1988

Lapangan Pekerjaan	1986		1987		April 1988	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1. Pertanian	777.556	66,73	742.118	67,96	815.326	70,41
2. Industri	45.457	3,90	48.378	3,46	15.418	1,33
3. Lainnya	342.125	29,36	346.225	31,71	327.349	28,26

Sumber : Indikator Ekonomi, BPS.

Tabel L : 3. Program Pengembangan Komoditi Pertanian

		Tanaman Keras		Tanaman Setahun	Lain-lain
		Perkebunan Besar	Perkebunan Rakyat	Usahatani Rakyat	Usahatani Rakyat
3.1.1.	Aceh Barat	1. Kelapa Sawit	1. Kelapa Hibrida	1. Padi 2. Cassava	1. Rumput laut
3.1.2.	Aceh Selatan	1. Kelapa Sawit	1. Pala 2. Kemiri	1. Padi 2. Cassava	1. Rumput laut
3.1.3.	Aceh Tenggara	1. Timber Estate 1.1. Kayu Gaharu 2. Kopi	1. Tebu 2. Madu Lebah	1. Nilam 2. Kapulaga 3. Cassava	
3.1.4.	Aceh Tengah	1. Timber Estate 1.1. Kayu merah 1.2. Bahan kertas	1. Kopi 2. Jeruk 3. Apel	1. Bawang Putih 2. Kapulaga	
3.1.5.	Aceh Timur	1. Kelapa Sawit 2. Karet	1. Karet 2. Lada 3. Kelapa Hibrida 4. Pisang	1. Padi 2. Jagung Hibrida	1. Udang
3.1.6.	Aceh Utara	1. Karet	1. Karet 2. Lada 3. Kelapa Hibrida 4. Buah-buahan	1. Padi 2. Kedelai	1. Udang
3.1.7.	Aceh Pidie	1. Coklat	1. Lada 2. Melinjo 3. Kelapa Hibrida	1. Padi 2. Kedelai	1. Udang
3.1.8.	Aceh Besar	1. Jambu mete	1. Jambu mete 2. Lada 3. Kelapa Hibrida 4. Buah-buahan : - Mangga - Rambutan - Durian	1. Kedelai 2. Jagung Hibrida	1. Udang
3.1.9.	Sabang				

Tabel Lampiran : 4.

Banyaknya Pencari Kerja Diperinci Menurut Tingkat Pendidikan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Tahun 1987/1988.

Tingkat Pendidikan	Yang Belum Ditempatkan pada akhir Tahun ini		Yang Terdaftar Dalam Tahun ini		Yang Ditempatkan Dalam Tahun ini.	
	Laki2	Wanita	Laki2	Wanita	Laki2	Wanita
1. SD dan yang tidak tamat						
- Buta Huruf	6	3	6	2	-	-
- Tidak Tamat	6.487	13	1.595	52	-	-
- SD dan yang Setingkat	10.848	96	5.081	190	1.194 (6,3)	4 (1,2)
2. SLP dan yang Sederajat	2.035	220	1.460	804	217 (6,2)	26 (2,5)
3. SLA dan yang Setingkat	14.242	2.867	12.484	4.776	2.054 (7,7)	764 (9,9)
4. Sarjana Muda	536	245	812	435	275 (20,4)	115 (16,9)
5. Sarjana	348	418	763	342	107 (9,6)	87 (11,4)
TOTAL :	34.502	3.862	22.201	6.601	3.847 (6,8)	996 (9,5)

Sumber :

Aceh Dalam Angka, 1987

Angka () menunjukkan %

Tabel Lampiran : 5.

Banyaknya pencari kerja Sarjana dan Sarjana Muda yang belum ditempatkan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Tahun 1987/1988.

Tahun	Sarjana Penuh		Sarjana Muda	
	Laki-laki	Wanita	Laki-laki	Wanita
1983/1984	68	7	196	108
1984/1985	118	56	345	91
1985/1986	133	42	355	27
1986/1987	348	418	436	215
1987/1988	231	147	330	195

Sumber :
Aceh Dalam Angka, 1987

Tabel : 6. Produksi per hektar komoditi tanaman pangan di zone Industri dan Pertanian Tahun 1985 dan 1986

(ton)

No	Komoditi	Z. Industri		Z. Pertanian	
		1985	1986	1985	1986
1.	Padi	3,75	3,69	3,18	3,29
2.	Kacang tanah	9,79	-	10,08	-
3.	Kacang hijau	7,95	8,00	8,00	8,10
4.	Kacang kedele	9,51	9,90	8,22	8,38
5.	Jagung	11,42	11,83	11,64	11,90
6.	Ubi kayu	10,08	10,90	11,24	11,25
		9,08	9,98	8,95	8,96

Sumber : Aceh Dalam Angka Tahun 1985 dan 1986

Tabel Lampiran : 7. Alternatif Rencana Pentahapan Pengembangan Unit Usaha Perkebunan Rakyat di Daerah Istimewa Aceh.

(Ha).

Kabupaten	Komo diti						Total	Keterangan :
		1988	1989	1990	1991	1992		
1. A. Barat	1	500	750	1000	1500	1500	5.250	Komoditi : 1. Karet 2. Kelapa Sawit 3. Kelapa Hibrida 4. Cengkeh 5. Coklat 6. Nilam 7. Pala 8. Kopi 9. Teh 10. Tembakau 11. Kardamon
	2	1000	2000	3000	4500	4500	15.000	
	3	500	500	750	1750	1750	5.250	
	4	200	200	200	450	450	1.500	
	5	500	1500	1500	1750	2750	8.000	
	6	200	200	300	300	500	1.500	
2. A. Selatan	1	500	1000	2500	3000	3000	10.000	
	2	2000	3000	5000	7500	7500	25.000	
	3	500	1000	1500	2750	3000	8.750	
	4	200	200	200	500	750	1.850	
	6	200	3.00	500	1500	2000	4.500	
	7	200	500	1000	1500	1500	4.700	
3. A. Tenggara	1	1000	1000	1000	1500	1500	6.000	
	3	500	500	500	750	750	3.000	
	4	200	200	200	500	500	1.600	
	5	1000	1000	2500	4000	4000	12.500	
	6	500	750	1750	2250	4000	9.250	
	8	1000	1500	2000	2000	2000	8.500	
	9	300	300	1500	1500	1500	5.100	
	10	200	200	200	500	500	1.600	
4. A. Tengah	11	100	100	250	250	500	1.200	
	6	1000	2000	2000	2500	2500	10.000	
	8	2500	3000	3500	5000	5000	19.000	
	9	1000	1000	1500	2000	2500	8.000	
	10	1000	1000	1500	1500	1500	6.500	
	11	300	300	500	750	750	3.100	

RN/DI-Aceh/arie-02

Tabel Lampiran 8.
Alternatif Pengembangan Kebun-kebun Bibit di Daerah Istimewa Aceh

Kabupaten	Perkebunan/Kehutanan	Tanaman Pangan
1. Aceh Barat	1,2,3,4,5,16	18,20,22,25,26
2. Aceh Selatan	1,2,3,4,6,7,9,10,13	18,20,22,23,25,26
3. Aceh Tenggara	1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	16,18,19,23,24,25
4. Aceh Tengah	7,8,9,11,12,13,14,15	17,18,19,23,24,25
5. Aceh Timur	1,2,3,13	17,20,24,25,26,27
6. Aceh Utara	1,3,5,13	17,20,21,25,26,27,28
7. Aceh Pidie	5,6,7,9,10,13	

Tabel lampiran : 9. Nilai Ekspor dan Jumlah Penerimaan Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (1984/1985)

No	Propinsi	Total Ekspor (Rp. 1000.000)	Total Anggaran Daerah TK II TK II (Rp. 1000.000)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	D.I. Aceh	3.194.282,30	28.795	2.982.743
2.	Sumatera Barat	159.681,69	70.465	3.711.258
3.	Kalimantan			
	Timur	4.065.710,40	30.485	1.517.634
4.	Jawa Timur	799.735,98	147.494	31.372.620
5.	Sulawesi			
	Tenggara	35.243,47	22.402	1.123.703
6.	D.I. Yogyakarta	148,71	22.089	2.940.716

Sumber : Indikator Ekonomi, BPS, Januari 1987

Statistik Indonesia, BPS, 1987

Tabel lampiran : 10 Ekspor Daerah Istimewa Aceh menurut Nilai dan Macam komoditi, tahun 1985 dan 1986

(US \$ 1000)

No	Komoditi	1985	1986
1.	Kopi Robusta	30.235,36	36.155,02
2.	Kopi Arabika	8.161,18	17.281,99
3.	Karet SIR 20	4.783,34	509,72
4.	Karet RSS	413,64	38,90
5.	Minyak Kelapa Sawit	1.907,36	518,43
6.	Biji Kelapa Sawit	-	-
7.	Kayu logs	-	-
8.	Kayu gergajian	7.097,19	5.123,76
9.	Udang segar	2.813,54	2.964,45
10.	Arang kayu	576,39	552,29
11.	Rotan saga	3,00	63,41
12.	Rotan Manau	15,34	140,57
13.	Pinang bulat	-	620,86
14.	Pinang belah	-	170,00
15.	Minyak pala	-	10,62
16.	Pala	8,46	26,47
17.	Bunga pala	218,27	102,59
18.	Plywood	2.160,27	6.407,40
19.	Pulpwood	244,45	369,75
20.	Minyak ikan hiu	16,61	857,59
21.	Kulit pinang	2,5	1,82
22.	Hati rotan	-	9,64
23.	Minyak Nilam	-	-
24.	Pinang berkulit	5,06	-
25.	Pinang biji	879,68	-
26.	Ubur-ubur	8,41	-

Sumber : Aceh Dalam Angka, 1985 dan 1986.

DAERAH ISTIMEWA ACEH

JAMBU METE

LADA

KELAPA HIBRIDA

KEDELAI

JAGUNG HIBRIDA

UDANG

BUAH-BUAHAN

- Mangga

- Rambutan

- Durian

COKLAT

LADA

MELINJO

KELAPA HIBRIDA

PADI

KEDELAI

UDANG

A. PIDIE

HATCHERI

A. BARAT

KELAPA SAWIT

KELAPA HIBRIDA

PADI

CASSAVA

RUMPUT LAUT

KARET

LADA

KELAPA HIBRIDA

BUAH-BUAHAN

PADI

KEDELAI

UDANG

TIMBER ES TATE

KAYU MERAH

BAHAN KERTAS

KOPI

BBAP

A. UTARA

A. TENGAH

JERUK

APEL

PUTIH

TEBU

KAPULAGA

TIMBER ES TATE

KAYU

GAHARU

KOPI

TEBU

COKLAT

A. TENGGARA

A. SELATAN

KELAPA SAWIT

PADI

CASSAVA

RUMPUT LAUT

KARET

KELAPA SAWIT

KARET

LADA

KELAPA HIBRIDA

PISANG

PADI

JAGUNG HIBRIDA

UDANG

A. TIMUR

UDANG

ES

U

MADU LEBEH

NILAM

KAPULAGA

CASSAVA

KETERANGAN :

- ◊ KEBUN BIBIT KELAPA SAWIT
- ▲ KEBUN BIBIT KELAPA HIBRIDA
- KEBUN BIBIT KARET
- KEBUN BIBIT COKLAT
- △ KEBUN BIBIT NILAM
- KEBUN BIBIT KOPI

BBAP :

(Balai Budidaya Air Payau).

IBRAHIM HASAN : TALAM DI TENGAH SEBUAH JAMUAN

O

L

E

H

BARLIAN AW

Ibrahim Hasan : Talam di Tengah Sebuah Jamuan

Oleh Barlian AW

Suatu hari, di sebuah ruang ber AC dingin. Di luar udara amat gerah. Lelaki tegap itu, memutarakan kursinya, lalu membelakangi tiga tamu yang baru lima menit dia terima di ruang kerjanya. Ada kesan amarah yang amat sangat dari raut wajahnya. Satu di antara tamunya, terus berbicara, dan sekonyong-konyong pula lelaki itu memutar kembali tempat duduknya. "Apa betul seperti yang saudara katakan?" tanyanya dengan nada sedikit keras di balik wajahnya mulai benderang.

Lelaki itu, Ibrahim Hasan, Rektor Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, kala itu. Saya mengenang dan mengenang peristiwa 10 tahun yang lampau itu, seperti juga saya terkenang tatkala suatu siang, Agustus 1986, ia dilantik sebagai Gubernur Aceh.

Kenangan itu terutama bagaimana akhirnya sebagai penguasa kampus Ibrahim Hasan menyetujui usul tiga mahasiswa - muridnya - untuk melaksanakan Mosma (Masa Orientasi Studi Mahasiswa) - sebuah bentuk perpeloncoan yang dimodifikasikan. Padahal, lewat konsep NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) yang diluncurkan Daoed Joesoef, hal semacamnya adalah "haram" hukumnya.

Tetapi karena yang kami tawarkan adalah sebuah bentuk yang amat khas, tanpa melanggar ketentuan - malah menggambarkan tradisi awal masa tahun akademik, Ibrahim Hasan mengatakan *welcome*. Ia amat menghargai konsep yang bagus, prima, apalagi inovatif.

Kepadanya jangan coba-coba menawarkan gagasan yang tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Ia memang seorang ilmuwan yang sangat menghargai logika.

Agaknya inilah yang terus tercermin dalam sikapnya. Ia mengetahui kapan harus kompromatif, dan kapan pula harus kompromis. Komitmennya dengan kebenaran, telah memberikan keyakinan dan optimistis yang kadang-kadang dinilai berlebih-lebihan. Ia mau saja dikritik, asalkan kritik itu justru memperkaya dan menyempurnakan konsep dasar. "Kalau Anda merasa konsep pembangunan zona industri dan zona pertanian itu lemah, silahkan Anda kritik. Saya mau konsep ini bisa

dipertanggungjawabkan secara ilmiah," katanya kepada seorang dosen yang mengambil disertasi doktornya dalam masalah zona pertanian.

Tetapi sosok Ibrahim Hasan bukan hanya sekedar pribadi yang terbuka. Keterbukaan itu, ibarat sebuah talam, selain menampung, tentu saja isi yang termuat di dalamnya harus sesuai. Kepada para pengisi talam - para penyaran - hendaknya sadar akan pentingnya kualitas makanan yang minta ditampung, dan kemudian dihidangkan di sebuah jamuan paling bergengsi.

Tampaknya itulah yang paling sering dikatakan oleh Ibrahim Hasan, bahwa membangun Aceh bukan pekerjaan dia sendiri. Itulah maka, ia ibarat "talam" tempat menampung makanan lalu dijadikan konsumsi - yang dalam bahasanya - lalu disebut konsep pembangunan Aceh.

Yang sudah pasti, sebagai konsumsi, makanan itu tidak hanya harus sesuai dengan selera, tetapi juga yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, yaitu masyarakat Aceh. Dan - lebih-lebih lagi - sang tamu yang menyantap makanan di "jamuan Ibrahim Hasan" itu - bisa mengatakan kepada handai taulannya, bahwa mereka benar-benar telah menemukan menu makanan yang diramu dengan resep yang jitu dan oleh juru masak yang arif pula.

Pentingnya kualitas makanan pengisi talam ini kemudian dijabarkan dengan perangkat dan infrastruktur pemerintahan serta pranata kemasyarakatan secara menyeluruh. Dialah yang selalu menekankan agar aparat harus orang yang tidak saja mengetahui, tetapi bisa memahami. Dialah yang menginginkan lembaga Bappeda itu kokoh. Ialah yang menginginkan pimpinan organisasi politik dan kemasyarakatan itu berkualitas. Dia pulalah yang mengharapkan semakin banyak para penyiap dan pengisi makanan itu punya sense dan citarasa tinggi.

Bagaimana agar mereka punya citarasa itu ? Ya, antara lain dengan meraih ilmu. Dan untuk itu harus ada lembaga pemberi ilmu - perguruan tinggi - penyandang dana. Itu dia, Yayasan Malem Putra. Untuk yang lain berbagai lembaga pun ada.

Sama dengan saat seperti dia menjabat rektor, ketika menjadi Gubernur, iapun seorang pengeliling. Hampir seluruh kecamatan - 138 buah - di Aceh, rasanya tidak satu yang belum pernah ia kunjungi, termasuk yang terisolir seperti Pulau

Banyak, di leher Samudera Hindia, dan Serbajadi di pelukan pedalaman Aceh Timur.

Di penggalan dasawarsa 1970 an dan awal 1980 an, kita sering memergokinya di sebuah lorong becek antara dua gedung darurat di Fakultas Keguruan. Sepatu karet putih yang dikenakannya di ketemaraman pagi untuk kegiatan senam pagi, terlihat berlumpur.

Itulah bagian dari "kunjungan kerja" nya sebagai Gubernur Unsyiah" pada waktu itu.

Dua belas tahun kemudian, saya melihat lagi sepatu lain di kaki Ibrahim Hasan berlumuran lumpur, ketika ia berjalan di atas pematang sawah di Desa Neusok Aceh Besar. Ia meninjau desa tersebut sembari melihat kegiatan penanaman pohon oleh KNPI dalam program pemanfaatan halaman meunasah-program yang menjadi obsesinya.

Tatkala ia merasakan ada lengketan lumpur di sol sepatunya, sebenarnya ia sedang merasakan getaran kerakyatan di jiwanya.

Dan itu ia nikmati benar-benar . Kenikmatan akan bias-bias spektrum kerakyatan itu dirasakan, dan terus diusahakan, bahkan dengan cara yang orang lain tak menyadarinya. Ia mengundang Tgk Adnan PMTOH ke pendopo, ia meminta Udin Pelor untuk bertutur dengan getaran seninya. Dari sana suara-suara rakyat, dari sana ada nyanyian bathin, sebagaimana juga nyanyian bathin itu ia nikmati ketika gema suara azan dari masjid raya menerobos celah-celah pendopo.

Ketika ia duduk bersimpuh di atas sajadah dengan kain sarung dan baju putih berleher bulat, untaian biji-biji tasbih mengitari jari-jari tangannya. Dua rakaat sembahyang subuh telah dilaluinya dalam sebuah piramida keimanan Islamnya yang kuta. Lewat sebuah jendela bathin, saya diam-diam menjenguknya diam-diam.

Saya melihat, di dadanya tanpa lencana kepala daerah. Safari dan kemeja lengan panjang khas miliknya jauh dari tempat ia bersimpuh. Bathin saya bergetar sebelum dan terus bergetar sebelum sebuah dialog bathin kami berlangsung dengan sengitnya.

"Saya tak mau hanya sekedar ngomong. Tapi mana konsep dan mana tenaga Anda?" Suara itu seperti mengusir saya. Tapi sekaligus mengundang kembali untuk "bertemu". Jadwalnya belum "tercatat" di buku ajudan. Barangkali di awal masa

jabatannya yang kedua. Atau dialog bathin itu terus berjalan tanpa diprotokoler oleh siapapun.

Selamat pagi pak ajudan, pertemuan kami selesai !

***Barlian. AW**

*Pengamat masalah-masalah
Sosial dan Wartawan
Serambi Indonesia*

Buku ini diterbitkan atas bantuan

PT. Putera Perdata Prospindo

PT. Buah Sejati

PT. Inaco Harapan

PT. Boswa Megapolis

PT. Citra Agung

PT. Mita Lestari

PT. Beutari Abdi Nusa

PT. Agra Wisesa Utama

PT. Pelita Nusa Perkasa

PT. Ramai Jaya Sejati